

Dr. H. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., CPS.

NASIONALISME DEMOKRASI

**Studi Terhadap Pemikiran Politik
Pengusaha Indonesia**



Gunung Djati Publishing

NASIONALISME DEMOKRASI
STUDI TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK
PENGUSAHA INDONESIA

Dr. H. Asep Abdul Sahid, M.Si., CPS.



Gunung Djati Publishing

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

NASIONALISME DEMOKRASI

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK

PENGUSAHA INDONESIA

Penulis: Dr. H. Asep Abdul Sahid, M.Si., CPS.

Diterbitkan Oleh:

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Desember 2021

Cover Designer: Rohmat Gunawan

ISBN: 978-623-99555-6-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit

KATA PENGANTAR

Adalah puji dan syukur yang pantas penulis panjatkan kepada Allah SWT pemilik jagat raya. Dengan kehendak dan kekuatan-Nya, naskah berjudul “Nasionalisme demokrasi: Studi Terhadap Pemikiran Politik Pengusaha Indonesia” ini dapat dipublikasikan dalam bentuk buku. Di sini, pengusaha Indonesia diposisikan sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia dengan Aburizal Bakrie menjadi sampel sekaligus sebagai subjek kajiannya. Ia dikaji dalam konteks aktor politik nasional berlatar pengusaha. Selama ini, pemikiran politik lebih banyak dikaji serta digali dari akademisi atau cendekiawan politik. Oleh karena itu, riset ini dapat melengkapi khazanah riset-riset pemikiran politik Indonesia pada umumnya.

Dalam buku ini digambarkan bahwa tema-tema pemikiran politik yang menjadi pokok perhatian subjek riset cenderung lebih berpusat pada tema ekonomi kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi. Adapun implikasi normatif dari tema-tema pemikiran politiknya ditemukan pada dua

aspek, yakni pada aspek wacana di masyarakat serta di pemerintah, dan aspek peta pemikiran politik Indonesia. Untuk aspek yang pertama ditemukan bahwa di antara pemikirannya yang telah memberikan wacana besar di masyarakat luas dan juga pemerintah adalah gagasan nasionalisme baru. Sementara untuk aspek kedua ditemukan bahwa posisi pemikiran politik dalam peta pemikiran politik Indonesia cenderung sebagai sintesis dari kategori pemikiran politik developmentalis integralis dan kritis pluralis. Sintesa pemikiran politik yang ditawarkannya berkategori developmentalis progresif.

Buku ini selain dapat digunakan sebagai sumber bahan kajian bagi mahasiswa ilmu politik, mahasiswa ilmu pemerintahan, dan mahasiswa sosial lainnya, namun juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Termasuk masyarakat luas yang melek politik dan sosial.

Atas publisnya buku ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu, langsung atau tidak, atas terselesaikannya publikasi buku ini. Terutama terima kasih penulis haturkan kepada

segenap pimpinan dan sivitas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Demikian juga bagi seluruh kolega yang terus melaksanakan pengembangan Ilmu Politik di Indonesia, baik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maupun di lingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU). Terima kasih juga dihaturkan kepada pimpinan Gunung Djati Publishing yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat membawa manfaat bagi pembangunan politik dan penguatan inovasi pengembangan ilmu politik guna meningkatkan mutu kehidupan semesta kemanusiaan. *Walakhir*, harus secara terbuka diakui bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang disampaikan oleh para pembaca yang budiman. Kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan pijakan bagi upaya meniti perbaikan dan menata perubahan.

Bandung, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Problematika Relasi Pengusaha dan Politik	1
B. Perihal Nasionalisme-Demokrasi	22
C. Peta Pemikiran Politik Indonesia	31

BAB 2

PERIHAL ABURIZAL BAKRIE	52
A. Keluarga dan Pendidikan	52
B. Aktivitas Bisnis dan Organisasi	58
C. Sebagai Kader Partai Golkar	63
D. Kelompok Usaha Bakrie	71
E. Karya Tulis dan Publikasi	80
F. Obsesi Politik	84

BAB 3

PEMIKIRAN NASIONALISME-DEMOKRASI

ABURIZAL BAKRIE	90
A. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	90
1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	90
2. Negara, TNI dan Otonomi Dunia Usaha	97
3. Dunia Usaha dan Otonomi Daerah ...	105
4. Pengusaha dan Budaya Suap	111
B. Nasionalisme	117
1. Keutuhan Wilayah dan Keadilan Sosial	117
2. Soal Pri-Nonpri: Urgensi Pembauran Etnis Cina di Indonesia	120
C. Demokrasi	126
1. Pemerintah yang Berwibawa dan Keseimbangan Peran	126
2. Pengakuan Terhadap Perbedaan dan Keberagaman	132
3. Demokrasi Ekonomi yang Produktif ..	136

BAB 4

IMPLIKASI PEMIKIRAN NASIONALISME

DEMOKRASI PADA PETA PEMIKIRAN

POLITIK INDONESIA 144

- A. Implikasi Normatif-Posisi Developmentalis
 Progresif 144
- B. Nasionalisme dan Demokrasi:
 Berparadigma Ekonomi 170
- C. Demokrasi Bernafas Nasionalisme 198

BAB 5

PENUTUP 208

DAFTAR PUSTAKA 215

TENTANG PENULIS 228

BAB 1

P E N D A H U L U A N

A. Problematika Relasi Pengusaha dan Politik

Penelitian ini merupakan studi pemikiran aktor politik, terutama aktor politik yang berlatar pengusaha nasional Indonesia. Pengusaha yang tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi dan pelaku bisnis namun juga sebagai kekuatan politik. Kekuatan yang muncul ke permukaan kehidupan politik Indonesia pasca Reformasi secara langsung dalam ragam bentuk aktivitas kekuasaan. Kekuatan yang pada masa Orde Lama dan Orde Baru tidak nampak karena mereka lebih banyak beraktivitas politik secara tidak langsung dan terbuka. Saat itu kekuatan politik lebih berputar dalam lingkaran kalangan militer (ABRI), teknokrat kampus, birokrat tinggi, dan politisi karir.

Aspek yang diteliti pada studi ini adalah pemikiran politik dengan fokus pada implikasi terhadap peta pemikiran politik Indonesia. Adapun subjek penelitiannya adalah Aburizal

Bakrie dengan data penelitian atau objek material yang dibatasi pada tahun 1994 sampai tahun 2004. Di sini pemikiran politik Aburizal Bakrie tidak dapat dilepaskan dari relasi pengusaha dengan dunia politik yang sangat dinamis.

Dalam konteks sistem politik negara Indonesia, dinamika hubungan pengusaha dengan dunia politik, setidaknya oleh Dwight Y. King¹, dikategorikan menjadi empat periode. Pengkategorian itu berdasarkan perbandingan sejarah (*comparative history*) dari kegiatan kaum pengusaha (atau pebisnis) sebagai kelompok kepentingan di Indonesia. *Periode pertama* abad ke-18 dan 19 adalah masa pencarian identitas kaum pengusaha (kelompok kepentingan), *periode kedua* masa pendudukan Jepang 1942-1945 adalah masa pancaroba, *periode ketiga* periode revolusioner 1945-1959 adalah masa coba-coba,

¹ Dwight Y. King, *Interest Group and Political Linkage in Indonesia 1800-1965*, (Sidney: Northern Illinois University Allen and Unwin, 1982). Lihat Juga, Faisal Siagian, *Dinamika Pengaruh Kelompok Bisnis dalam Politik: Trend Indonesia Menuju Negara Korporatis*, (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS, 1994) Hlm 385.

dan *periode keempat* masa 1959-1965 adalah masa akomodasi.

Pembagian atau pengkatagorian dinamika hubungan pengusaha dengan politik seperti di atas, diakui Faisal Siagian tidaklah memuaskan dan dinilai kurang canggih. Karena itu, Siagian menambahkannya dengan pendekatan periode 1965 sampai sekarang (1994-pen). Pada masa tersebut, untuk mengamati sepak terjang dinamika kelompok pengusaha dalam politik Indonesia, sangat terkait dengan *trend* perkembangan ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru, yakni menuju ke sistem pasar bebas dengan peran pertumbuhan kapitalisme domestik yang begitu pesat.² Ian Chalmers³, yang dikutip Faisal Siagian, melihat *trend* itu sangat dominan atau mengarah pada sistem kapitalisme internasional. Ada tiga gejala dari fenomena pada saat itu: (1) adanya swastanisasi perusahaan-perusahaan negara; (2) tumbuhnya kelompok bisnis utama

² Ibid., hlm. 387.

³ Ian Chalmers, *Indonesia in 1990; Democratization and Social Forces* (Southeast Asian Affairs, Singapura, 1991), Hlm. 110. Lihat Juga Siagian., Loc Cit

dalam bentuk konglomerat domestik; (3) keterlibatan PPP (putera-puteri presiden) Soeharto dalam aktivitas bisnis swasta.⁴

Apa yang telah dirincikan oleh Ian Chalmers di atas, menurut Siagian⁵, sangat beralasan, karena pada kenyataannya memang telah terjadi pertumbuhan suatu kelompok kapitalisme swasta domestik yang sangat menonjol baik aset *property*-nya maupun semangat pengaruh ekonomi dan politiknya. Dalam sisi semangat pengaruh politik kaum pengusaha, sejak tahun akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, diakui juga oleh Arief Budiman⁶, bahwa kaum pengusaha telah mendapatkan

⁴ Ibid. Kecenderungan tersebut terjadi menyusul tiga kebijaksanaan pemerintah Indonesia yaitu: *pertama*, arah kebijaksanaan yang menekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, *kedua*, kebijakan untuk meningkatkan ekspor nonmigas serta menumbuhkan industri-industri di dalam negeri supaya berorientasi ekspor, dan *ketiga*, melanjutkan deregulasi sektor jasa dan perbankan, sehingga mempertinggi daya saing pihak swasta menghadapi pihak swasta (kapitalisme asing).

⁵ Ibid

⁶ Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia* (Clyton, Victoria: Monash Paper on Southeast Asia No 22, Monash University, 1990). hlm. 393. Lihat juga Siagian., Op Cit., hlm. 388.

tempat yang sejajar dengan kelompok politik formal (partai politik) yaitu PPP, PDI, Golkar dalam hal sektor yang berpengaruh dalam politik Indonesia.

Perlu dicatatkan disini, bahwa *pertama*, pada era Orde Baru pengaruh politik yang dimiliki diantara kelompok pengusaha tidaklah menyebar dan merata, melainkan tertumpuk pada kelompok pengusaha yang memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran kekuasaan, dalam hal ini adalah kedekatan dengan lingkaran keluarga cendana. Di luar lingkaran itu, kelompok pengusaha, baik secara ekonomi maupun secara politik tidaklah diperhitungkan, bahkan lebih ekstremnya lagi mereka disingkirkan. *Kedua*, kekuatan atau pengaruh politik yang dimiliki pengusaha tidak otonom dan lebih bersifat semu, dalam arti sesungguhnya sekuat apapun pengaruh politik para pengusaha senantiasa digantung oleh *bureaucratic policy* yang menghasilkan konglomerat jago kandang⁷, dan posisi Soeharto

⁷ Faisal Siagian mencontohkan kasus bobolnya Bapindo dengan Golden Key-nya, kasus Bank Duta dan bangkrutnya Bank Summa menunjukkan, bahwa dalam jangka tertentu bisa saja terjadi negara

sebagai personifikasi negara yang sangat dominan atas masyarakat sipil.

Dinamika pengaruh politik yang melekat pada kelompok pengusaha tidak berhenti sampai lengsernya Soeharto sebagai simbol kekuatan Orde Baru, 21 Mei 1998, namun berlanjut sampai era Reformasi. Pada era ini, dengan sistem politik keterbukaan dan kebebasan, sebagai bagian dari sistem politik demokrasi, telah melahirkan banyak keluasan bagi pengusaha untuk berpartisipasi dalam segala sektor pembangunan nasional, termasuk pembangunan politik. Tak heran misalnya, secara terang-terangan dan terbuka banyak pengusaha berpartisipasi dalam setiap *event* politik, mulai dari sebagai penyandang dana kampanye, pengumpul suara (*vote getter*), perebutkan kursi menteri, sampai menjadi kandidat presiden atau wakil presiden.

memaksakan kemauannya kepada kelompok pengusaha, karena secara terus-menerus kelompok pengusaha sudah merongrong sumber-sumber ekonomi negara. Termasuk disini konflik politis antara penguasa negara dengan pengusaha industri perbankan dan jasa yang merupakan bagian dari formasi sosial. Lihat Siagian., Op Cit., hlm. 389.

Untuk partisipasi yang disebutkan terakhir pada lima puluh tahun ke belakang sulit ditemukan, baik pada era Orde Lama maupun era Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa dengan sistem keterbukaan, walaupun belum sampai menduduki posisi terpuncak dalam jabatan politik negara (sebagai presiden), seorang tokoh pengusaha, yakni Muhammad Jusuf Kalla dapat terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres langsung 2004, di mana sebelumnya, jabatan wakil presiden, sebagaimana disebutkan di atas, hanya bersirkulasi antara kalangan militer, birokrasi, teknokrat kampus, dan politisi karier.

Pokok Permasalahan

Salah satu tokoh pengusaha nasional yang telah banyak menyedot perhatian masyarakat umum dan media saat itu adalah Aburizal Bakrie (atau akrab dipanggil bang Ical). Ia selain disibukan dengan dunia usahanya, juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Aburizal Bakrie dikenal bukan saja sebagai tokoh pengusaha dan organisatoris, tetapi juga sebagai aktor politik.

Dalam konteks itu, misalnya M. Chatib Basri⁸ menyebut Aburizal Bakrie sebagai seorang tokoh dengan “beragam atribut” sebagai “pengusaha dan politisi”. Ical menurutnya merupakan seorang tokoh pelbagai warna dengan keragaman minat yang terentang mulai dari ekonomi, humaniora, dan politik. Pandangan senada yang lebih mendalam lagi disampaikan Indra J Piliang. Ia melihat betapa Aburizal Bakrie selain sebagai aktor bisnis dan aktor politik juga menyimpan sejumlah potensi pemikiran, tidak hanya memiliki perspektif yang nyaris detail atas soal-soal ekonomi, melainkan juga mendalami soal-soal kebangsaan secara luas⁹.

Dari ketokohan Aburizal Bakrie, baik tokoh pengusaha maupun tokoh politik, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti adalah *pertama*, Aburizal Bakrie merupakan tokoh pengusaha yang

⁸ M. Chatib Basri adalah Direktur Riset LPEM-UI. Lihat, Lalu Mara Satria Wangsa, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004).

⁹ Lihat Indra J. Piliang, *Horison Pemikiran Aburiza Bakrie*, dalam buaku *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004) hlm. i.

bukan sekedar peduli kepada kemajuan dunia usaha, tetapi berani “melawan arus” atau berbeda haluan dengan pengusaha arus utama, ia berani ‘berkonfrontasi’. Misalnya, kasus keputusan beraniannya Aburizal untuk maju menjadi calon Ketua Umum Kadin Indonesia meskipun tidak mendapatkan ‘restu’ dari presiden Soeharto, sehingga memunculkan kasus “perseteruan” dengan A.R. Ramly¹⁰ sebagai calon Ketua Umum Kadin yang direstui Presiden Soeharto.

Kedua, Aburizal Bakrie merupakan tokoh pengusaha yang energik-pantang menyerah, berwawasan luas, dan senantiasa berorientasi kemasyarakatan. Hal itu setidaknya menurut Andi F. Noya¹¹, dibuktikan ketika krisis menghantam Indonesia, ada satu titik dimana para pengusaha nasional tidak tahan, Aburizal Bakrie mampu, bukan saja bertahan, tapi melejit kembali ke orbit.¹²

¹⁰ A.R. Ramly adalah mantan Direktur Utama PT. Timah, PT. Pertamina, dan mantan Duta Besar Amerika Serikat

¹¹ Andi F. Noya adalah Pemimpin Redaksi Harian Media Indonesia

¹² Dalam konteks bangkit atau bangkrutnya suatu perusahaan, menurut kacamata analisis ekonomi politik Faisal Basrie diantaranya terkait erat dengan tingkat kompetisi dan

Menariknya lagi perlu disampaikan disini bahwa menurut Indra J Piliang¹³, ketika krisis melanda, sebagian besar pengusaha melarikan diri ke luar negeri, atau memindahkan pabrik-pabriknya ke negara-negara lain yang lebih murah upah buruhnya. Mereka tidak ingin mengambil bagian dalam proses *recovery economy*. Akibatnya, krisis menjadi kian dalam, dengan tebaran kaum miskin dan pengangguran di banyak tempat. Namun, berbeda dengan pengusaha lain, Aburizal Bakrie tetap berada di Indonesia, menyelesaikan utang-utang perusahaannya, berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, lantas pelan-pelan bangkit dari badai krisis.

Sehubungan dengan itu, tidak mengherankan jika jauh-jauh hari sebelum krisis datang, Aburizal Bakrie telah banyak mendapatkan penghargaan, baik untuk level

managemen. Berkaitan dengan itu, ia mencontohkan misalnya, kebangkrutan atau ditutupnya suatu perusahaan adalah hal yang biasa. Penyebabnya sangat beragam, bisa karena kalah bersaing atau karena salah urus. Lihat Kompas, *Dua Bank Ditutup, Karena Apa?*, 12/4/2004.

¹³ Indra J. Piliang adalah peneliti CSIS.

nasional maupun lintas-nasional. Di antaranya dapat disebutkan di sini adalah *Businessman of the Year* dari Harian Umum Republika tahun 1995, *The Outstanding Young People of The World* dari *the Junior Chamber of Commerce* tahun 1986 dan penghargaan *ASEAN Business Person of The Year* dari *ASEAN Business Forum* tahun 1997¹⁴.

Ketiga, Aburizal Bakrie merupakan sedikit dari banyak tokoh pengusaha yang berani terjun ke dunia politik praktis secara langsung dan terbuka. Berkaitan dengan itu, Indra J. Piliang menyebutkan bahwa Aburizal Bakrie adalah sederet pengusaha di Indonesia yang berani secara terbuka menyatakan dirinya sebagai bagian dari partai politik tertentu¹⁵, yakni sebagai anggota atau kader partai Golkar.

¹⁴ Lihat Buletin POKJA EKKU DPP Partai Golkar *Dari Konvensi Menuju Presiden RI; Apa Kata Mereka?* (Jakarta: Edisi Eksklusif, 2004) Hlm. 8.

¹⁵ Satria Wangsa., Op Cit., hlm. ii. Pada umumnya pengusaha cenderung pragmatis dan hati-hati, sehingga untuk penyelamatan dan mengembangkan bisnisnya, para pengusaha dalam bidang politik lebih suka bermain di belakang layar. Dengan itu, mereka bisa dengan mudah berpindah-pindah partai yang sekiranya sedang berkuasa dan untuk mendapatkan pengaruh bisnis dan politik. Menurut Didik J. Rachbini, pengusaha seperti itu, adalah *rent seeking economy* alias pemburu rente ekonomi. Lihat Didik J.

Aksi politik praktis Aburizal Bakrie yang paling menonjol, setidaknya menurut penulis guna keperluan penelitian ini adalah (1) Aburizal memutuskan untuk ikut berkompetisi politik sebagai calon ketua umum kelompok kepentingan Kadin Indonesia 1994; (2) Aburizal Bakrie memutuskan untuk ikut kompetisi politik sebagai peserta Konvensi Nasional Pemilihan Presiden Partai Golkar 2003-2004; (3) Ical pada Pilpres 2004 memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden yang tidak diajukan Partai Golkar. Dan (4) aksi politik Aburizal Bakrie dalam menduduki jabatan politik Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Bertolak dari sejumlah aksi politik tersebut di atas, tidak heran juga, jika Indra J Piliang¹⁶ telah meletakkan Aburizal Bakrie pada dimensi baru dalam hidupnya, yakni sebagai “politikus”. Bahkan dalam konteks lingkaran Partai Golkar pasca Konvensi Nasional, Aburizal Bakrie, menurut Piliang, telah menempatkan Aburizal

Rachbini, *Ekonomi Politik; Paradigma dan Teori Pilihan Publik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

¹⁶ Satria Wangsa., Op Cit., hlm. iv.

sebagai bagian dari “lapisan politisi generasi mendatang”.¹⁷

Dan, *keempat*, yang paling menarik dari sosok ketokohan Aburizal Bakrie adalah sumbangan pemikirannya. Ternyata Ical selain sebagai praktisi, baik praktisi dunia usaha maupun praktisi politik, juga sebagai tokoh yang berpotensi besar dalam melahirkan banyak gagasan atau pemikiran, tidak hanya pemikiran ekonomi tapi juga pemikiran politik, terutama yang berkaitan dengan topik kemasyarakatan, keadilan, demokrasi, kekuasaan dan negara. Sampai saat ini (paling tidak saat tesis ini disusun), tema pokok pemikiran politik Aburizal Bakrie yang paling mengemuka adalah “nasionalisme”, “demokrasi” dan “pembangunan ekonomi yang berorientasi rakyat”. Tema nasionalisme, demokrasi, dan pembangunan ekonomi pada dasarnya bukan hal baru, tetapi

¹⁷Belakangan, cap sebagai politisi pendatang baru di atas, pada gilirannya Aburizal Bakrie berdasarkan hasil Munas VII Partai Golkar (16-20 Desember 2004 di Bali) lalu, ditunjuk menjadi salah satu anggota penasehat Partai Golkar periode 2004-2009 seiring terpilihnya trio pengusaha (Yusuf Kalla, Surya Paloh, dan Agung Laksono) masing-masing menjadi ketua umum, ketua penasehat dan wakil ketua umum.

tawaran pemikiran yang diberikan Aburizal memberi warna “khas” yang berbeda terhadap wacana “pemikiran praksis” yang berkembang, seperti khas-nya dari nasionalisme Aburizal adalah, sebagaimana dikategorikan Rizal Mallarangeng adalah “nasionalisme baru”.¹⁸

Sejauh ini, misalnya, tema-tema pemikiran tersebut di atas oleh M.S. Hidayat¹⁹ diakui sangat bagus dan dibutuhkan untuk mengantisipasi demokratisasi di masa depan. Dengan tebaran berbagai pemikiran atau gagasannya, dalam pandangan Indra J Piliang, ia berperilaku ‘politik’ seperti *the man of ideas*²⁰.

Dan *kelima*, dewasa ini eksistensi ketokohan Aburizal Bakrie makin dipertegas dengan kedudukan politiknya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersat (KIB). Dengan itu, suka atau tidak suka, Aburizal menjadi sumber rujukan akademis, juga sumber berita bagi para media massa, baik media

¹⁸ Wawancara dengan Rizal Mallarangeng di Freedom Institute, Jln. Irian No. 8, Jakarta, 20/12/2004.

¹⁹ M.S. Hidayat adalah politisi Partai Golkar dan Ketua Umum Kadin Indonesia 2004-2009

²⁰ Satria Wangsa, Op Cit., hlm ii.

cetak maupun media elektronik. Karenanya, luasnya pemberitaan atau sorotan media massa terhadap derap langkah Aburizal Bakrie bisa dijadikan salah satu indikator untuk menilai bobot tokoh tersebut di mata publik. Termasuk alasan-alasan penting lain sebelumnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, diduga kuat segala kegiatan politik dari tokoh pengusaha Aburizal Bakrie ini merupakan cerminan dari pemikiran politik yang telah banyak terpublikasikan. Permasalahannya, *pertama*, bagaimana nasionalisme dan demokrasi dalam pemikiran politik Aburizal Bakrie? Dan *kedua*, bagaimana implikasi pemikiran politik Aburizal Bakrie terhadap peta pemikiran politik di Indonesia?

Penelitian ini memfokuskan pada dua fase kehidupan politik Aburizal Bakrie sepanjang tahun 1994-2004, yakni fase pengusaha kritis-pragmatis dan fase poitisi pengusaha²¹. Untuk

²¹ Pembagian fokus perhatian di atas lebih didasarkan upaya peneliti untuk memudahkan dalam klasifikasi pemikiran dan aksi politik Aburizal Bakrie. Untuk fase pertama didasari asumsi bahwa Aburizal dalam mengartikulasi obsesi politik dan bisnisnya

yang *pertama*, fase pengusaha kritis-pragmatis. Ke-kritisannya pada fase ini, ditunjukkan oleh Aburizal Bakrie (1) ketika pada tahun 1994, pencalonan dirinya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia ditentang oleh Soeharto; (2) selama menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, Ical kerap kali berani mengeluarkan pemikiran yang berbeda dengan kebijakan pemerintah rezim Soeharto; dan (3) kemudian di dalam menyalurkan kekritisannya Ical banyak melahirkan pemikiran. Pada konteks ini adalah pemikiran nasionalisme, demokrasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan *Kedua*, fase politisi pengusaha. Fase ini diduga kuat menjadi cerminan dari pemikiran politik dan intensitas kegiatan politik yang dibangun sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana implikasi pemikiran politik Aburizal Bakrie tersebut terhadap pemikiran

melalui kelompok kepentingan. Sementara itu, untuk fase kedua lebih berdasarkan asumsi bahwa Aburizal dalam mengartikulasikan obsesi politiknya dijabarkan melalui partai politik, yakni Partai Golkar.

politik Indonesia. Baik implikasi normatif maupun implikasi empirik.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengungkap dan menggambarkan pemikiran politik Aburizal Bakrie mengenai Nasionalisme Demokrasi. Selain itu, bertujuan untuk menggambarkan implikasi pemikiran politik Aburizal Bakrie tersebut terhadap peta pemikiran politik di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pemikiran politik Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian relatif masih jarang yang mengambil subjek penelitiannya yang berlatar pengusaha. Hal itu misalnya ditandai oleh sulitnya penulis dalam menemukan bahan pustaka yang membahas secara khusus dan utuh mengenai pemikiran politik tokoh pengusaha, termasuk tokoh pengusaha Aburizal Bakrie. Hal itu dimungkinkan karena pembahasan Aburizal Bakrie dari perspektif politik masih dianggap kurang menarik sebab tidak relevan dengan kiprah beliau, di mana Aburizal Bakrie lebih

dikenal dengan sosok pengusahanya, ketimbang sosok politisi, apa lagi sebagai sosok akademisi.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali tulisan yang membahas tentang Aburizal Bakrie. Misalnya dari perspektif atau aspek yang berbeda, di awal tahun 2004, Yayasan Kadin Indonesia menerbitkan buku Aburizal Bakrie yang disunting oleh Imam Sucipto Umar²² tentang kiprah dan pemikiran ekonomi Indonesia. Buku tersebut hendak menyampaikan pesan pada kita bahwa Aburizal Bakrie sebagai tokoh pengusaha besar, sesuai dengan judul bukunya, merupakan seorang “Renaissans ekonomi Indonesia” atau “simbol kebangkitan ekonomi Indonesia”. Buku ini lebih bersifat suntingan dari berbagai pemikirannya dan cenderung bersifat ‘campur sari’ dari kacamata ekonomi.

Kemudian, pustaka yang dapat dikatakan “mirip” dengan rencana dan topik penelitian ini adalah buku yang menggambarkan sumbangan pemikiran Aburizal Bakrie, yakni “Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan

²² Imam Sucipto Umar, *Aburizal Bakrie; Renaissans Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004)

Pembangunan Ekonomi” yang disusun oleh Lalu Mara Satria Wangsa dan *dilaunching* pada tanggal 13 Oktober 2004. Dikatakan hampir mirip dengan penelitian ini, dikarenakan buku dimaksud mencoba mempetakan dan menggambarkan pemikiran-pemikiran Aburizal Bakrie dari tahun 1994-2004. Relevansi studi tersebut terletak pada salah satu aspek dari penelitian ini, yakni menguraikan pemikiran Aburizal Bakrie.

Terdapat perbedaan menonjol antara pustaka di atas dengan penelitian yang disusun ini. Hal itu setidaknya terletak pada, *pertama*, variabel pembahasan. Studi di atas hanya membahas variabel pemikiran dari Aburizal Bakrie, sementara penelitian ini lebih jauh dilihat dari aspek implikasinya terhadap peta pemikiran politik di Indonesia.

Kedua, tema pemikiran pada buku “Merebut Hati Rakyat” sangat didominasi oleh tema-tema ekonomi ketimbang tema politik. Ini artinya, dalam fokus pembahasan buku tersebut lebih banyak dilihat dari perespektif ekonomi. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada perespektif politik. Dan *ketiga*, organisasi (atau

sistematika) tulisan pada studi di atas dipandang tidak utuh, tidak mendalam, dan terpenggal-penggal. Sementara, penelitian ini lebih bersifat utuh dan mendalam tentang ketokohan Aburizal Bakrie dari perespektif politik. Ini menjadi konsekuensi positif dari metodologi yang digunakan dalam penelitiannya.

Studi serupa juga pernah terbit pada tahun 1998 dengan penyusun Nasir Tamara. Studi tersebut diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Aburizal Bakrie: Bisnis dan Pemikirannya”. Jika melihat isi dari bab per bab, harus sekali lagi dikatakan bahwa buku tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena buku tersebut lebih mengedepankan pendekatan ekonomi. Itu artinya segala pemikiran Aburizal Bakrie yang dituliskan adalah pemikiran ekonomi.

Adapun penelitian akademis yang memfokuskan pada pemikiran Aburizal Bakrie di Indonesia 1994-2004, juga masih belum peneliti temukan. Kalau pun ada hanya sampai pada penelitian terhadap lembaga bisnis yang dipimpinnya (Kelompok Usaha Bakrie), sebagai organ atau unit analisis. Misalnya, penelitian yang

dilakukan oleh Muhammad Taufik²³ mengenai lembaga usaha pers yang dilakukan oleh Group Bakrie.

Penelitian ini tidak sama sekali menjelaskan posisi dari pemikiran Aburizal Bakrie, namun lebih terfokuskan pada variabel terakomodasinya kepentingan perusahaan pers Bakrie Group oleh penguasa Orde Baru. Kesimpulan tesisnya disebutkan bahwa diakomodirnya kepentingan usaha pers Aburizal Bakrie oleh kekuasaan Orde Baru ditentukan atau dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan Bakrie Group dalam mendekati diri dengan pusat kekuasaan negara, yakni dalam hal itu adalah lingkaran Cendana.

Kerangka Teori

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa aspek pada penelitian ini adalah pemikiran politik kaum pengusaha Indonesia, yaitu tentang

²³ Muhammad Taufik, *Hubungan Kepentingan Pengusaha dan Penguasa Dalam Bisnis Pers; Studi Kasus Bisnis Pers Group Bakrie* (Jakarta: Tesis PPs Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2002).

nasionalisme dan demokrasi, dengan fokus mengenai implikasinya terhadap peta pemikiran politik Indonesia. Untuk menggambarkan aspek dan fokus penelitian dimaksud, dipaparkan terlebih dahulu konsepsi teori nasionalisme-demokrasi dan peta pemikiran politik Indonesia.

B. Konsepsi Nasionalisme-Demokrasi

Kata nasionalisme merujuk pada paham ideologi kebangsaan yang menuntun manusia dalam tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dari situ lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara-bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk idealitas nasional atas kebangsaan.²⁴

Konsepsi nasionalisme berangkat dari atau merujuk pada wujud bangsa atau *nation*. Bangsa dalam pengertian mutakhir, sebenarnya baru

²⁴ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 24.

dikenal pada akhir abad ke-18, yaitu dengan munculnya paham nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi (individu) harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan dalam Kamus Politik, Nasionalisme adalah per-a-saan atas dasar kesamaan asal-usul, rasa kekeluargaan, rasa me-miliki hubungan-hubungan yang lebih erat dengan sekelom-pok orang daripada dengan orang-orang lain, dan mempunyai perasaan berada di bawah satu kekuasaan. Nasionalisme diperkuat oleh adanya tradisi-tradisi, adat istiadat, dongeng-dongeng dan mitos-mitos, serta oleh satu bahasa yang sama; semangat kebangsaan.²⁵

Stanley Benn, sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid, menyatakan bahwa dalam mendefinisikan istilah “nasionalisme” setidaknya ada lima hal, yaitu:

1. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme);

²⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 431.

2. Dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain;
3. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan;
4. Doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan; dan
5. Nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu.²⁶

²⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 37.

Kemudian, berdasarkan proses pembentukannya, nasionalisme, kata Nurcholis Madjid,²⁷ mengandung beberapa prinsip umum, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*), yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi;
2. Kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme;
3. Kesamaan (*equality*), sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan antitesis dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter;
4. Kepribadian (*identity*), yang lenyap karena negasi kaum kolonial; dan
5. Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara nation.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

Sebelum paham nasionalisme muncul, telah ada paham *kosmopolis*, yakni, paham yang mengajarkan bahwa manusia bukan warga sesuatu negara, tetapi warga dunia. Tanah air setiap manusia adalah dunia seluruhnya. Sebagai bukti misalnya tercermin dalam Imperium Romawi yang berdiri tidak berdasarkan atas bangsa Romawi, tetapi atas keperkasaan Tentara Romawi dan Hukum Romawi yang meliputi hampir seluruh bangsa pada waktu itu. Kemudian beriringan dengan kemajuan zaman dan dinamika kebangsaan melalui fase reformasi dan pencerahan, perlahan tapi pasti paham kosmopolis memudar dan mulai digantikan oleh paham nasionalisme. Sehingga realitas sejarah menunjukkan, sejak akhir abad ke-18 sampai abad ke-20 paham nasionalisme sudah dianut oleh hampir seluruh negara di dunia ini.

Namun demikian, dalam perkembangan dan praktiknya, paham nasionalisme di beberapa negara mengalami fase berlebih-lebihan pandangan yang mengarah pada nasionalisme sempit atau *chauvinisme*. Paham *chauvinisme* atau nasionalisme sempit ialah suatu paham yang

terlalu mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Seperti terbukti dalam sejarah, paham ini pernah dianut oleh Adolf Hitler yang menyatakan bahwa bangsa Jerman adalah keturunan bangsa Aria yang berhak menguasai bangsa-bangsa lain; Benito Musolini mengklaim bahwa bangsa Italia adalah pewaris sah dari Imperium Romawi; dan bangsa Jepang mengklaim bahwa mereka merupakan keturunan Dewa Matahari.

Sementara ini konsepsi demokrasi dapat ditelusuri, salah satunya, pada pernyataan Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people and for people*” atau “demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan atau mendapat ‘restu’ dari rakyat.

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang bagi keberlangsungan

suatu sistem demokrasi yang baik. Menurut Robert A. Dahl setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *Pertama*, para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan. *Kedua*, Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan berperiodik. Para pejabat ini dipilih melalui Pemilu. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosiasional, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan

kelompok kepentingan. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif.²⁸

Sejauh ini, paling tidak sampai ketika penelitian ini disusun, tumpuan atau titik tolak studi demokrasi tidaklah tunggal, namun telah lama bergeser dan berkembang menjadi multi-titik tolak. Misalnya sejak medio tahun 1980-an, studi demokrasi yang dilakukan oleh para teoritis, baik dalam kerangka menemukan jati diri (keaslian) konsep demokrasi maupun dalam kerangka mengkritisi eksistensi demokrasi, senantiasa bertumpu pada tiga fokus analisis, yakni *state* (negara), *society* (masyarakat), dan *market* (pasar). Artinya studi demokrasi tidak lagi hanya pada satu tumpuan, seperti Negara, tetapi telah menyebar dan tersebar dengan tiga tumpuan tersebut. Namun demikian, dalam hal hidup dan keberjalannya ketiga fokus analisis demokrasi itu biasanya tidaklah tegak berdiri secara bersamaan dalam ren-tang waktu tertentu, melainkan tegak berdiri secara bergantian dan saling menggeser.

²⁸ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Dalam satu rentang waktu tertentu misalnya, konsep *state* menjadi titik tolak yang sangat dominan, sementara konsep *society* dan *market* berposisi *devian* dalam segala upaya pembahasan konsep dan praktik demokrasi. Sebaliknya konsep *state* menjadi titik tolak *devian* dalam rentang waktu lainnya atau berikutnya karena tergeser oleh titik tolak konsep *society* atau pun konsep *market*. Ini artinya studi demokrasi sampai saat ini tidaklah statis, namun sangat dinamis. Itu semua menandakan bahwa dari mulai awal kelahirannya sampai saat ini, konsep demokrasi telah mengalami pertumbuhan secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat.

Lepas dari cara hidup dan berdiri tegaknya studi demokrasi di atas, hemat penulis ketiga tumpuan dari studi demokrasi itu pada gilirannya dapat dikatakan telah melahirkan warna-warna demokrasi, yakni demokrasi berwarna negara (“demokrasi Negara” atau “*democratisation of state*”); demokrasi berwarna masyarakat (“demokrasi masyarakat” atau “*democratisation of society*”); dan

demokrasi berwarna pasar (“demokrasi pasar” atau “*democraton of market*”). Demokrasi dalam pemikiran Aburizal Bakrie tentunya, terutama dalam kaitannya dengan penelitian ini, tidak bisa lepas dari ketiga titik-tolak kajian di atas.

C. Peta Pemikiran Politik Indonesia

Secara umum pemikiran politik merupakan penjelmaan dari obsesi, potensi intelektual & sosialisasi politik, dan representasi realitas lingkungan sosial dengan pusat perhatian mengenai negara, masyarakat dan perilaku politik kekuasaan.²⁹ *Pertama*, pemikiran politik sebagai penjelmaan dari “obsesi” setidaknya diutarakan oleh A. Rahman Zainudin. Ia mengemukakan bahwa dengan memperhatikan pemikiran para pemikir politik sepanjang sejarah, dapat

²⁹Ketiga topik di atas (masyarakat, kekuasaan, dan negara), merupakan tema-tema pokok yang menjadi indikasi ketika melakukan kajian pemikiran politik seorang tokoh. Hal itu, setidaknya dicontohkan oleh Ahmad Suhelmi ketika menggali berbagi pemikiran politik para tokoh pemikir Barat. Dalam kajiannya, ia tidak terlepas dari ketiga topik tersebut, baik penggalian dari tokoh praktisi politik, akademisi, filsuf, maupun agamawan. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 2001).

diperhatikan bahwa setiap pemikir mempunyai obsesinya masing-masing. Menurutnya, mengambil kesimpulan dari pemikiran seorang pemikir tanpa memperhatikan obsesi utamanya, mungkin sekali akan menyampaikan kita kepada suatu kesimpulan yang salah atau sekurang-kurangnya tidak tepat.³⁰

Lebih jauh A. Rahman Zainuddin³¹, menjelaskan bahwa yang dimaksud obsesi disini adalah jenis pemikiran yang mencekam di benak sang pemikir itu sepanjang waktu, karena masalah itu amat dominan dan amat penting dibandingkan dengan yang lain-lain sehingga jarang sekali ia dapat melepaskannya dari padanya. Orang yang mempunyai obsesi, tidak enak melihat kenyataan yang ada. Ia tidak dapat

³⁰ Lihat A. Rahman Zainuddin, *Machiavelli dan Kekuasaan; Peranan Obsesi Dalam Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 4 (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1989), hlm. 101.

³¹ *Ibid.*, hlm. 102.

Yang dimaksud pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Pemikiran politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat politik, dan hal-hal yang berkenaan dengan nilai, norma, etika, moralitas dan idealisme politik. Lihat, A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 7 (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1990), hlm. 3 dan 13.

menerima kenyataan itu. Ia ingin mengubah kenyataan itu menjadi sesuatu yang lain yang menurut pandangannya jauh lebih baik, sesuai dengan obsesinya.

Kedua, pemikiran politik sebagai penjelmaan dari “potensi intelektual” dan “sosialisasi politik” pernah dijelaskan oleh Alfian. Dalam bukunya “Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia”, dijelaskan bahwa pemikiran seseorang antara lain dipengaruhi oleh potensi intelektual yang dimilikinya, dan proses sosialisasi yang pernah dilaluinya³². Agen yang bisa menjadi sarana aktualisasi potensi intelektual dan sosialisasi politik adalah institusi pendidikan dan keluarga.

Ketiga, pemikiran politik sebagai penjelmaan dari “representasi realitas sosial” ditekankan oleh Nazaruddin Sjamsuddin dan David Thomson. Keduanya senada berpendapat bahwa kaitan antara pemikiran politik seseorang dengan realitas yang terjadi di masyarakat pada

³² Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 9.

masalahnya.³³ Realitas sosial dimaksud dapat berbentuk lingkungan bisnis dan lingkungan politik. Lingkungan bisnis adalah karakteristik perusahaan. Sementara lingkungan politik dapat mencakup lingkungan kelompok kepentingan (semisal HIPMI dan KADIN) dan tentunya mencakup pada kedekatan dengan aktivis politik atau partai politik tertentu.

Agak lebih tajam, Nazaruddin, mengutarakan bahwa studi pemikiran politik, tidak hanya menjelaskan “apa” yang dipikirkan oleh para pemikir politik itu, melainkan juga “mengapa” masalah itu mereka pikirkan. Dengan demikian, Nazaruddin secara khusus berpandangan, suatu pemikiran politik disamping menampilkan bagaimana interpretasi dan tanggapan para pemikir terhadap keadaan dan nilai-nilai tersebut dengan dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing.³⁴ Bertolak dari pandangan itu, realitas sosial dan latar belakang

³³ Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, (ed), *Soekarno; Pemikiran politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1993). Lihat juga, David Thomson, *Pemikiran-Pemikiran Politik* (Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia, 1986), hlm. 19.

³⁴ Nazaruddin., *Ibid.*,

yang mempengaruhi pemikiran seorang tokoh dapat berupa realitas lingkungan bisnis ataupun realitas lingkungan politik.

Dan *keempat*, tema-tema yang menjadi pusat perhatian pemikiran politik adalah sangat dinamis. Pada mulanya, seperti yang disampaikan di awal, tema yang menjadi pusat perhatian pemikiran politik adalah masalah negara³⁵. Pada era berikutnya kajian atau pemikiran politik bergeser pada pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dan *post-behavioral*.³⁶ Sesuai dengan pergeseran yang dialami pemikiran politik, tema-tema aktual dalam pemikiran politik ikut bergeser dan dinamis diantaranya, sebagaimana telah disugestikan Ahmad Suhelmi dalam memaparkan fase-fase pemikiran politik Barat, selain soal kekuasaan dan negara adalah soal keadilan, *good and clean governance*, otonomi, ekonomi politik,

³⁵ A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik AIPI, NO. 7, 1990), hlm. 9.

³⁶ Lihat Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) hlm. 12.

demokrasi, kebangsaan atau nasionalisme, partisipasi di bidang politik, dan lain-lain³⁷.

Sampai disini, dengan merujuk pada deretan kerangka teori di atas, dapat disimpulkan bahwa studi tentang pemikiran politik seorang tokoh akan membahas tentang tiga variabel, yakni, *pertama*, variabel latar belakang kehidupan atau biografi sang pemikir sebagai faktor yang mempengaruhi segala pemikirannya. Adapun faktor-faktor biografi tersebut meliputi (1) lingkungan keluarga dan pendidikan. (2) aktivitas bisnis dan organisasi kelompok kepentingan. (3),

³⁷Tentang pemahaman lebih lanjut ragam dari tema-tema pemikiran politik di atas, seperti dicontohkan Muhammad Azhar yang dituangkan pada *footnote* bukunya “Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat, dapat dilihat dalam berbagai bacaan berikut: A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992); Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 2001); Jalaluddin Rahmat, *Kepemimpinan Politik dan Cita Keadilan: Perspektif Sejarah Islam al-Hikmah*, No. 8 Ramadhan 1213 H, hlm 86; Nurcholis Madjid, *Kaum Muslimin dan Partisipasi Sosial Politik: Masalah Hak-Hak Individu dan Sosial yang Tak Teringkari* (Jakarta, Yayasan Wapaf Paramadina, 1992); Deddy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), dan lain-lain.

kedekatan dengan aktivitas politik atau partai politik tertentu. Dan (4) adalah obsesi politik dan sejumlah karya tulis. *Kedua*, variabel tema-tema penting yang menjadi fokus perhatian sang pemikir dan alasan-alasan argumentatif mengapa tema itu menjadi perhatiannya. Dan *ketiga*, variabel aksi politik atau partisipasi politik sang pemikir. Sangat banyak para pemikir politik yang tidak hanya menggulirkan gagasan ideal normatifnya tetapi juga berusaha juga terlibat langsung dalam percaturan politik praktis.

Dalam konteks Indonesia, studi pemikiran politik model di atas setidaknya telah melahirkan peta pemikiran politik tersendiri. Misalnya yang seringkali menjadi rujukan akademis dalam pemetaan pemikiran politik Indonesia adalah hasil penelitian Herbert Feith & Lance Castles mengenai pemikiran politik di Indonesia. Dalam pengantar bukunya edisi Indonesia³⁸, Feith dan Castles berhasil mengelaborasi peta pemikiran politik Indonesia ke dalam dua periode, yakni pemikiran

³⁸ Lihat Herbert Feith & Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995)

politik Indonesia 1945-1965 dan Indonesia pasca 1965 atau Indonesia Orde Baru.

Untuk periode pertama, pemikiran politik Indonesia diklasifikasikan menjadi lima aliran, yakni, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme³⁹. Dalam perjalanannya, baik Feith maupun Castles mengatakan bahwa tidak satu pun dari aliran-aliran itu yang menghilang sama sekali dalam periode berikutnya, namun dua atau tiga di antaranya lenyap atau menjadi marjinal dalam wacana politik yang penting.⁴⁰

Dari lima pemikiran politik di atas yang menunjukkan indikasi cenderung berkesinambungan nyata adalah Islam, Sosialisme Demokratis, dan Tradisionalisme Jawa. Sementara kedua aliran pemikiran politik lainnya cenderung secara perlahan lenyap atau terpinggirkan bersamaan dengan perkembangan politik praksis. Misalnya, dalam analisa Feith dan Castles dijelaskan, komunisme umumnya lenyap dari pembicaraan politik publik bersamaan dengan

³⁹ Ibid., hlm. xxv.

⁴⁰ Ibid.

tekanan politik Orde Baru berupa penumpasan PKI dan perkembangan di luar negeri, seperti perang-perang Cina-Vietnam, pembaruan intern di RRC dan Uni Soviet (sekarang Rusia), yang banyak ditafsirkan sebagai bergerak ke kapitalisme.⁴¹

Sementara itu, Nasionalisme Radikal juga telah surut dari kejayaannya. Seperti halnya Komunisme, hal ini sebagian karena adanya paksaan dari luar; sejumlah besar aktivis PNI sayap kiri ditumpas dari kehidupan masyarakat dalam tahun-tahun setelah 1966⁴². Meskipun demikian, dalam pandangan Feith dan Castles, banyak ide-ide pokok nasionalisme radikal tetap bertahan dalam masyarakat, misalnya rumusan atau pokok pemikiran anti-imperialisme dan anti-ketergantungan. Menurutnya, diantara kalangan tokoh pemerintah, pengaruh nasionalisme radikal diwakili oleh tokoh-tokoh “nasionalis ekonomi” seperti BJ Habibie (akademisi), Ginanjar Kartasasmita (Politisi-Pengusaha Golkar), dan Ibnu Sutowo (Pengusaha Nasional).⁴³

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid, hlm xxvi

⁴³ Ibid.

Setelah memaparkan lima aliran pemikiran politik di atas, Feith dan Castles beralih pada pemaparan pemikiran politik pada periode Orde Baru. Mereka berdua melihat bahwasanya terdapat dua aliran pemikiran politik yang berperanan tinggi, yakni “developmentalis integralis” dan “kritis pluralis”⁴⁴. Menurutnya, aliran pemikiran “developmentalis integralis” dapat dilihat dalam pemikiran politik Soeharto sendiri dan tokoh-tokoh pemerintahan lainnya seperti almarhum Ali Murtopo, Widjojo Nitisastro, Sumitro Djojohadikusumo, almarhum Nugroho Noto Susanto dan Jusuf Wanandi (pengusaha).⁴⁵

Adapun pokok pemikiran politik developmentalis integralisnya terletak pada (1) memprioritaskan pembangunan ekonomi, (2) stabilitas, (3) keamanan dengan pengaruh militer yang dominan, dan (4) keserasian sosial. Selain itu adalah (5) keutuhan wilayah dan (6) pemerintah

⁴⁴ Diakui oleh Feith dan Castles sendiri bahwa pengkalisifikasian pemikiran politik dengan sebutan-sebutan di atas masih *debateble* dan tidak diyakininya tepat. Namun demikian, sebutan dengan kedua cap tersebut telah didahului dengan mencoba-coba sebutan yang lain. Dan hasilnya sebutan itulah yang dianggap relevan pada saat itu. Lihat *Ibid.*, hlm. xxviii.

⁴⁵ *Ibid.*

yang kuat⁴⁶. Untuk urutan yang disebutkan satu sampai empat merupakan unsur dari developmentalis, sedangkan poin lima dan enam merupakan bagian dari unsur integralis.

Sementara itu sifat umum dari aliran pemikiran politik periode kedua yakni “kritis pluralis” dirincikan oleh Feith dan Castles kepada dua unsur besar, *pertama* “kritis” meliputi liberal reformis, yakni (1) mencegah korupsi, (2) memberantas unsur kesewenang-wenangan dalam tata kerja pemerintah, (3) menegakan *rule of law*, (4) emansipasi masyarakat kecil, (5) pembongkaran berbagai instrumen negara yang mengawasi kehidupan politik atau masyarakat lainnya. Dan *kedua* “pluralis” meliputi berbagai fungsi negara, yakni (6) hak-hak organisasi, (7) otonomi daerah, (8) otonomi komunitas etnis.⁴⁷

Pengkalisifikasian peta pemikiran politik Indonesia di atas sedikit banyaknya akan memberikan panduan yang berguna bagi segala upaya studi pemikiran politik terlebih-lebih bila dikaitkan dengan aksi atau partisipasi politiknya,

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., hlm xxix.

termasuk upaya penelitian mengenai studi terhadap pemikiran dan partisipasi politik Aburizal Bakrie. Kegunaannya kerangka teori tersebut, setidaknya dijumpai pada upaya peneliti dalam mengklasifikasikan segala pemikiran politik serta mengkonfirmasikannya dengan praktek-praktek politik atau aksi politik Aburizal Bakrie. Hal itu diperlukan sebagai tesis akhir dari penelitian ini.

Penelitian tentang pemikiran politik kaum pengusaha Indonesia, dalam hal ini Aburizal Bakrie 1994-2004 menggunakan pendekatan kualitatif⁴⁸. Untuk strategi penentuan pendekatan kualitatif, John W Cresswell misalnya berpandangan bahwa terdapat sejumlah tradisi dalam studi pendekatan ini, yakni, *Etnografis*, *Grounded Theory*, *Studi Fenomenologis*, dan *Studi Kasus (case study)*.⁴⁹ Tradisi-tradisi tersebut

⁴⁸ Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.

⁴⁹ John W. Cresswell, *Research design: Qualitative & Quantitative Approaches* (California: SAGE Publication Inch, 1994), hlm. 11-12.

memandang tentang peran dari seorang peneliti dalam praktek penelitiannya.

Untuk yang *pertama*, dalam *etnografis*, peneliti membaur dengan populasi subjek. *Kedua*, *grounded theory*, pada penelitian ini peneliti menurunkan sebuah teori dengan beragam tahap pengumpulan data, kemudian membandingkan data yang ditemukan dengan teori. *Ketiga*, *fenomenologis*, dalam hal ini peneliti menyelubungi (*brackets*) pengalamannya sendiri guna memahami pendapat para informan. Dan *keempat*, studi kasus, peneliti mengumpulkan informasi secara mendetail dengan cara menerapkan variasi prosedur pengumpulan data selama satu periode waktu yang terlebih dahulu ditetapkan.

Dilihat dari periode atau masa penelitiannya, penelitian tentang pemikiran Aburizal Bakrie 1994-2004 ini dapat terkatagorikan penelitian *prospektif*, yakni periode penelitiannya berlangsung sejak saat penelitian sampai penelitian selesai. Dalam hal ini, menurut Abdul Azis, bila melihat masa dari penelitian, terdapat dua katagori, yakni *prospektif* dan

restropektif (*post facto*). Untuk prospektif merupakan penelitian studi kasus yang periodenya maju ke depan. Sedangkan *restrospektif* adalah jenis penelitian studi kasus yang periodenya mundur terhitung dari periode kontemporer.⁵⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Deskriptifnya terletak pada upaya penulis untuk menggambarkan berbagai pemikiran politik Aburizal Bakrie dalam kurun waktu 1994-2004 dari sejumlah sumber data yang tersedia. Sementara itu sifat analitisnya terletak pada bagaimana penulis mencari informasi mengenai implikasi pemikiran politik Aburizal terhadap peta pemikiran politik di Indonesia.

Dalam pandangan Endah Triastuti⁵¹ jenis penelitian deskripsi lebih menekankan pada upaya menyajikan gambaran yang lengkap mengenai

⁵⁰ Abdul Azis, *Memahami Fenomenologis Lewat Studi Kasus*, dalam Burhan Bungin ed., *Analisa dan Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 20-21.

⁵¹ Lihat Endah Triastuti, *Jenis-Jenis Penelitian*, (Jakarta: Materi Kuliah MPS FISIP UI, 2001), hlm. 34. Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian deskripsi ini, menurut Indah si peneliti sebelumnya telah memiliki definisi yang jelas mengenai subjek penelitiannya. Karena itu, menurutnya yang dilakukan lebih akurat dibandingkan dengan penelitian eksplorasi.

Berdasarkan itu, penulis ingin menggambarkan dan menganalisis lebih mendalam tentang tema-tema apa saja yang menjadi fokus perhatian pemikiran politik Aburizal Bakrie, dan bagaimana implikasi terhadap peta pemikiran politik di Indonesia.

Lebih jauh Triastuti menyebutkan bahwa tujuan penelitian deskripsi sendiri adalah diantaranya, 1) menyajikan tentang informasi dasar; 2) menghasilkan gambaran tentang sebuah kelompok individu; 3) menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan; dan 4) menciptakan seperangkat katagori atau pengklasifikasian⁵².

⁵² Triastuti, *Ibid.*, hlm. 35.

Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data⁵³ sekunder sebagai bahan studi pendahuluan. Yakni pengumpulan data dasar, seperti data diri (nama, usia, pendidikan

⁵³ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak akan bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Jika hal demikian terjadi, maka tidak ada lain jalan bagi si peneliti kecuali menukar masalah yang ingin dipecahkan. Ibid

Untuk metode atau teknik pengumpulan data menurut Irawan Soeharto secara umum dalam dilakukan melalui angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, analisis isi, dan tes proyeksi. *Pertama*, angket atau *self-administered questionnaire* adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. *Kedua*, wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). *Ketiga*, observasi secara luas berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. *Keempat*, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Lihat Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Rosyda Karya), hlm. 65.

dan jenis usaha); *profil company*; dan keputusan partai politik. Data sekunder ini tidak mentah-mentah diterima begitu saja, tetapi diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Pengolahan itu meliputi: pengklasifikasian data.

Tahap kedua yang dilakukan adalah pengumpulan data primer melalui studi pustaka dan wawancara terhadap nara sumber utama. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari nara sumber pertama. Oleh karena itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data berupa tema-tema dan naskah-naskah yang dihasilkan sendiri oleh Aburizal Bakrie, baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, hasil wawancara, kutipan pernyataan di media massa, maupun tindakan politik yang banyak diberitakan media.

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman dari berbagai data yang dipandang kurang jelas dan atau membutuhkan penjelasan. Oleh karena itu, fungsi dan posisi wawancara dalam mendapatkan data primer hanya bersifat

pelengkap dari data-data primer lainnya, yang dianggap sudah mencukupi untuk penelitian ini.

Adapun rencana teknik wawancara yang akan digunakan adalah, *pertama open ended*, yakni peneliti memberi kesempatan nara sumber untuk mengeluarkan pandangan dan pengetahuannya atas objek penelitian, dari sini nara sumber bisa dijadikan informan kunci. Dan *kedua*, wawancara berlangsung singkat sesuai dengan matriks pedoman fokus wawancara yang telah dibuat.

Analisis data dalam penelitian tentang pemikiran Aburizal Bakrie 1994-2004 ini dilakukan sejak atau selama pengumpulan data. Hal itu sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, di mana analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan⁵⁴.

⁵⁴ Hal itu berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana analisis data dalam kuantitatif dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua dan biasanya diolah dan dianalisis dengan

Dalam pandangan Imam Suprayogo dan Tobroni⁵⁵, dengan telah menetapkan masalah penelitian, sesungguhnya peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

Sementara itu dalam proses analisis data dilaksanakan melalui empat tahap⁵⁶, yakni *pertama*, analisis sejak atau selama pengumpulan data. Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan analisis meliputi: 1) menetapkan fokus penelitian,

secara computerized berdasarkan metode analisis yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Lihat Suprayogo dan Tobroni Op Cit., hlm. 192.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Menurut Miles dan Huberman (1984) juga Yin (1987), yang dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat langkah-langkah analisis data dimaksud merupakan satu kesatuan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Lihat Ibid., hlm 194 dan 196.

apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah; 2) penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpulkan; dan 3) penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi dan dokumen) berikutnya.

Tahap *kedua* adalah reduksi data, yakni tahapan untuk proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Dalam proses ini, penulis melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode setelah ditranskrip. Kemudian tahap *ketiga* adalah penyajian data. Pada tahap ini penyusun akan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Adapun penyajian data dimaksud adalah naratif ringkasan. Penyajian naratif diupayakan supaya bisa dilengkapi dengan matriks dan bagan. Semua itu dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Kegiatan analisis berikutnya atau *keempat* adalah menarik kesimpulan atau

penafsiran. Yakni penulis mencoba mencari makna, arti, pola-pola, penjelasan, aluran sebab akibat, dan proposisi data-data dari hasil pengumpulan data di atas.

BAB 2

PERIHAL ABURIZAL BAKRIE

A. Keluarga dan Pendidikan

Bang Ical panggilan akrab dari Ir. H. Aburizal Bakrie adalah anak sulung dari empat bersaudara buah pasangan H. Achmad Bakrie dengan Hj. Rosniah. Aburizal lahir di Jakarta, 15 November 1946⁵⁷, lima puluh delapan tahun lalu. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakang pengusaha gigih dan sukses. Karenanya, ia mewarisi segala bakat dan naluri usaha besar dari keluarganya tersebut, terutama dari ayahanda H. Achmad Bakrie.

Pendidikan yang ditempuh Aburizal Bakrie, mulai dari SD sampai SMA diselesaikannya di Jakarta. Menelusuri perjalanan pendidikan Aburizal bakrie ini berawal pada tahun 1958 tercatat lulus dari sekolah tingkat dasar. Menurut hasil “penyelidikan” ranking satu di sekolahnya

⁵⁷ Lihat Bambang Soesatyo, *HIPMI: Gerakan & Pemikiran* (Jakarta: Pustaka Aksara, 1995), hlm. 196.

sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi baginya. Bahkan selain prestasi itu, kepercayaan untuk menjadi ketua murid senantiasa disandingnya. Hal yang sama juga dipertunjukkan Aburizal Bakrie ketika ia duduk di Sekolah Tingkat Pertama begitu juga di Sekolah Tingkat Atas. Masing-masing lulus pada tahun 1961 dan 1964. Sementara pada tahun 1973, Ical tercatat sebagai lulusan Elektro Institute Teknologi Bandung (ITB). Sebelum mengenal ITB, Ical pernah dikirim ayahnya kuliah di Jerman, 1966. Ia gagal dan pulang setelah delapan bulan disana. Alasannya, iklim yang tidak cocok. Akhirnya ia meneruskan ke ITB, sampai menjadi insinyur elektro, 1973.⁵⁸

Selama menimba ilmu elektronik di ITB, Ical banyak aktif (sebagai aktivis) di berbagai kegiatan kemahasiswaan, sehingga tidak heran jika Ical akhirnya pernah terpilih sebagai Ketua Umum Senat dan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) ITB, pelatih karate Unit Kegiatan Mahasiswa ITB dan salah seorang pendiri Masjid Salman di

⁵⁸ Lihat, [www. Tempo/apa & siapa. com](http://www.Tempo/apa&siapa.com)

lingkungan almamaternya.⁵⁹ Dari sinilah segala organisasi kemahasiswaan ITB tersebut, serta merta menjadi kawah candra dimuka Aburizal dalam menggodok jiwa kepemimpinan di kemudian harinya, baik pada kepemimpinan bisnis maupun kepemimpinan politik

Kenangan manis pada masa-masa di ITB yang tak bisa dilupakan sampai sekarang, menurut Ical adalah ketika mapram ITB tahun 1970. Seorang Cami (calon mahasiswi) Jurusan Teknik Penyehatan, Taty Murnitriati, berhasil mencuri hati Ical. Mereka intim, dan setelah mereka berpacaran tiga tahun, Taty dinikahinya. Kini mereka dikaruniai tiga anak, yakni Anindya Nivian, Anindhita Anestia, dan Anindra Ardiansyah.

Dalam pandangan Iman Sucipto Umar⁶⁰, petuah ayahanda tercintanya Aburizal, yakni “jangan berada dalam kegelapan dengan bayangan

⁵⁹ Lihat, Iman Sucipto Umar, *Aburizal Bakrie: Renaisans Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004), hlm. 19.

⁶⁰ Ibid

sebagai sahabat”⁶¹, senantiasa memotivisir Aburizal Bakrie dalam menjaring banyak kawan lewat organisasi. Hal itu tentunya relevan dengan jaringan organisasinya, sebagaimana dipaparkan di atas. Dari sini terlihat, bahwa pengaruh sang ayah (almarhum) sangat dominan dalam membentuk perilaku organisasi dan cita-cita sosial-politiknya.

Pengaruh sang ayah tersebut, juga dirasakan Ical dalam bidang bisnis, terutama ketika Ical diamanti untuk meneruskan kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie yang didirikan oleh ayahnya Ahmad Bakrie sejak tanggal 10 Februari 1942 di Teluk Betung Lampung.⁶² Petuah atau pemikiran Ahmad Bakrie

⁶¹ Sekedar sebagai pengayaan, petuah ayahandanya Aburizal Bakrie juga dituliskan oleh Lalu Mara Satria Wangsa dalam bukunya dengan redaksi agak berbeda, yakni “...jangan biarkan dirimu di tempat yang gelap. Di sana, bayanganmu pun akan meninggalkanmu....”. Lihat, Lalu Mara Satria Wangsa, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004)

⁶² Secara kelembagaan badan hukum usaha, Kelompok Usaha Bakrie mengalami dinamika, yakni, dari status C.V. Bakrie (Comanditair Venootschap) berubah menjadi N.V. Bakrie (Naamloze Venootschap) pada tahun 1952, kemudian pada tahun 1971 bentuk badan hukum N.V. diganti menjadi P.T. (Perseroan

yang terus berdampak pada kepemimpinan dan aktivitas usaha Aburizal Bakrie adalah masyarakat sebagai orientasi pengembangan usaha Group Bakrie. Ahmad Bakrie selalu mengingatkan generasi penerusnya untuk terus berusaha sehingga jumlah orang yang “makan” bersama Group Bakrie semakin bertambah pula⁶³. Untuk itu, misalnya, dalam setiap kesempatan Ical kerap kali menyampaikan kata-kata “...Kita mesti menciptakan sesuatu untuk masyarakat.”⁶⁴

Menurut Nasir Tamara⁶⁵, masyarakat tampaknya menjadi kata kunci dalam pengembangan usaha Group Bakrie (termasuk

Terbatas). Lihat, Nasir Tamara, *Aburizal Bakrie: Bisnis dan Pemikirannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 40-42.

Pada tahun 1988, Group Bakrie memasuki era baru. Pada masa itu kepemimpinan di group ini beralih pada generasi kedua Bakrie. Anak tertua Ahmad Bakrie, yakni Aburizal Bakrie mendapat kepercayaan untuk memegang estafeta kepemimpinan. Ibid., hlm. 43.

⁶³ Ibid., hlm. 51. Misalnya, pada tahun 1990 Ahmad Bakrie menargetkan agar perusahaannya mempekerjakan 100.000 orang. Target ini tercapai dengan baik. Sebab pada tahun 1991, perusahaan Group Bakrie mempekerjakan lebih dari 11.000 orang. Target ini pun dilanjutkan Ical dengan mempekerjakan 25.000 orang pada tahun 2000.

⁶⁴ Lihat, pidato Aburizal Bakrie pada Republika, sesaat setelah terpilih menjadi Tokoh Bisnis Republika 1995. Tamara, Op Cit., hlm. 50.

⁶⁵ Ibid.

jiwa kepemimpinannya). Ini, sebagaimana diisyaratkan di atas, bukan hanya menjadi pemikiran Aburizal Bakrie saja, melainkan juga merupakan “ warisan” dari almarhum Ahmad Bakrie. Setidaknya ada tiga prinsip idealisme yang selalu menjadi perhatian Ahmad Bakrie dan kemudian diwariskan pada kepemimpinan Ical.

Pertama, bahwa negara ini telah mencapai kemerdekaan dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Pengorbanan ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Kemerdekaan harus diisi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Group Bakrie harus memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik untuk kepentingan masyarakat, nusa, dan bangsa.⁶⁶

Kedua, terciptanya pemerintahan yang baik dengan situasi politik yang baik. Situasi ini memungkinkan bagi pengusaha bagi pengusaha untuk berkarya dan berinovasi di dunia usaha. Generasi Group Bakrie merasakan betul betapa pemerintah yang kurang mapan dan stabilitas yang tidak terjamin, ikut menyusahkan para

⁶⁶ Ibid

pengusaha dalam melakukan kegiatan bisnis. Untuk itu, Group Bakrie harus membantu pemerintah, baik dalam mempertahankan situasi yang ada atau untuk memajukan masa depan bangsa.⁶⁷

Dan *ketiga*, Group Bakrie tidak berarti apa-apa jika tidak mempunyai manfaat yang nyata bagi masyarakat. Masyarakat menjadi pembeli produk yang dihasilkan oleh Group Bakrie. Dengan demikian, sebenarnya mereka ikut andil membesarkan usaha Group Bakrie. Untuk itu, keuntungan yang diperoleh Group Bakrie harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini, Group Bakrie memiliki kegiatan non-komersial, antara lain bidang sosial, pendidikan, agama, dan olah raga.⁶⁸

B. Aktivitas Bisnis dan Organisasi

Dalam tulisan visi misi Aburizal Bakrie, ditegaskan kembali bahwa perjalanan seorang

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid, hlm. 50-51. Dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, Group Bakrie tidak hanya memberi ikan saja, melainkan juga menyediakan kail.

pimpinan Aburizal Bakrie, sejak lahir sudah ditakdirkan sebagai seorang *entrepreneur* dan pemimpin. Perjalanan hidup pria yang akrab dipanggil Ical ini kaya dengan aktivitas dan pengalaman memimpin beragam organisasi baik bidang bisnis, profesi, politik, sosial dan lainnya. Ruang gerakannya tidak terbatas pada sektoral tapi melintas batas sampai kemanca negara.⁶⁹

Di dunia bisnis, nama Ical, dikenal luas secara internasional karena sukses mengembangkan Kelompok Usaha Bakrie (KUB). Ical adalah *chairman* Kelompok Usaha Bakrie; Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk; Direktur Utama PT Bakrie Nusantara Corporation dan lain sebagainya.⁷⁰

Ical mewarisi usaha mendiang ayahnya, H. Achmad Bakrie, Bakrie Group yang memang telah menjelma menjadi kelompok usaha yang besar. Untuk memudahkan dan melancarkan operasional usaha, Ical lalu membagi kelompok usaha Bakrie menjadi tiga: Bakrie & Brither,

⁶⁹ Lihat, Derap Langkah Sang Pemimpin, dalam Visi Misi Aburizal Bakrie calon presiden 2004

⁷⁰ Soesatyo, 194

Bakrie Investindo dan Bakrie Nusantara Corporation. Sedangkan dari sisi usaha, Ical membaginya dalam tujuh direktorat: manufaktur, jasa dan keuangan, agroindustri dan pangan, pertambangan, properti dan hiburan, perdagangan, serta pengembangan usaha.⁷¹

Langkah lainnya, dengan melakukan dua pembenahan. *Pertama*, memperkuat dan memantapkan manajemen. *Kedua*, memperbaiki struktur permodalan. Dalam hal manajemen, Ical menyadari pentingnya masalah profesionalisme. Itu sebabnya Ical lantas merekrut sejumlah tenaga profesional dengan maksud mengarahkan Bakrie Group sebagai kelompok usaha yang profesional.⁷² Memang dalam konteks itu, sejak memegang kendali di Group Bakrie, Ical memisahkan antara manajemen dan pemilik. Pemilik tidak boleh merecoki urusan manajemen, kecuali jika mereka telah terbukti mempunyai kemampuan yang memadai. Pemilik hanya duduk sebagai komisaris

⁷¹ Ibid.

⁷² Salah satu langkah yang dianggap beraninya adalah dengan merekrut Tanri Abeng, manajer profesional yang diisukan bernilai Rp 1 Miliar, sebagai Presiden Direktur PT. Bakrie & Brither. Ibid., hlm. 194-195.

saja. Sementara manajemen dikelola secara profesional oleh manajer-manajer yang handal.⁷³

Selain sebagai pengusaha sukses, ayah tiga orang anak ini juga dikenal sebagai organisator yang ulung. Bersama Abdul Latief, Ical mendirikan organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tahun 1972.⁷⁴ Namanya kian banyak disebut dan berbagai organisasi menempatkan Ical di barisan pemimpin. Sebut saja HIPMI sebagai ketua umum (1977-1979),⁷⁵ Ketua umum Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia (1976-1989), Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (1989-1994), Anggota MPR RI thun 1988-1998, Anggota Dewan Pakar ICMI (2000-2005), Ketua umum Kadin Indonesia dua kali secara berturut-turut, yakni periode 1994-1999 dan periode 1999-2004,⁷⁶ Anggota Penasehat DPP Partai Golkar (2004-2009), dan sekarang tercatat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

⁷³ Tamara., Loc Cit

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Lihat Buletin POKJA EKKU, *Dari Konvensi Menuju Presiden RI* (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2004) hlm. 8.

Dalam lingkup regional maupun internasional, Bang Ical dipercaya memimpin sebagai presiden di sejumlah organisasi ternama seperti *Asen Chamber of Commerce & Industry*; *International Councillor*, *Asia Society*; *Asean Business Forum* dan Asosiasi kerja sama Bisnis Indonesia-Australia.⁷⁷

Dalam tulisan “Derap Langkah Sang Pemimpin” disebutkan bahwa sesungguhnya terpaan organisasi dan kepemimpinan Aburizal telah diterimanya sejak usia muda. Sejak usia muda bahkan masa kanak-kanak dan remaja, Ical memang terlatih untuk memimpin organisasi seperti ketua kelas di setiap tingkatan sekolahnya. Dan tentunya saat kuliah di Elektro ITB Ical telah dipilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa ITB dan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Maka tidak berlebihan bila kemudia *The Junior Chamber of Commerce (Jaycees)*, Nagoya Jepang memberikan penghargaan untuk Ical sebagai “*The Ten*

⁷⁷ Ibid.

Outstanding Young People of the World”, tahun 1986.⁷⁸

Penghargaan lain diperolehnya dari *The Asean Business Forum* sebagai “*Asean Business Person of The Year*” tahun 1997. Harian Republika juga menganugerahinya penghargaan serupa yakni “*Business man of Year*” pada tahun 1995.⁷⁹

C. Sebagai Kader Partai Golkar

Sebagaimana disebutkan di pendahuluan bahwa Aburizal Bakrie adalah salah satu dari deretan pengusaha Indonesia yang berani secara terbuka menyatakan dirinya sebagai bagian dari partai politik, dalam hal ini Partai Golkar. Ini tentunya menjadi menarik, karena setidaknya menurut Indra J Piliang, terdapat pameo umum yang berlaku untuk seorang pengusaha, yakni uang dijadikan sebagai ideologi sehingga partai apapun yang memerintah, sang pengusaha akan berusaha mendekatinya dengan berbagai cara, lalu mencari peluang untuk membangkitkan bisnisnya, baik berdasarkan proyek-proyek

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

pemerintah, maupun regulasi yang disusun pemerintah atas bidang usaha tertentu.⁸⁰

Kemudian, ketika pemerintah itu jatuh atau tidak didukung lagi oleh rakyat pada pemilihan umum, sang pengusaha dengan cepat beralih kepada kelompok atau partai politik untuk mendapatkan pengaruh politik. Terminologi umum untuk pengusaha seperti ini adalah *rent seeking economy* alias pemburu rente ekonomi.⁸¹

Interaksi Aburizal Bakrie dengan Golkar (sekarang Partai Golongan Karya) dapat dikatakan berlangsung cukup lama, baik di lingkungan keluarga maupun dalam aktivitas organisasi. Ideologi, misi dan visi organisasi politik yang ia kenal itu secara perlahan terinternalisasi dalam dirinya ketika ia mulai berinteraksi dengan berbagai kegiatan politik Golkar. Meskipun belum pernah menduduki posisi top struktural kepengurusan di setiap tingkatannya, Ical tidak pernah luput dari kegiatan Golkar. Sehingga kerap kali Aburizal dalam bidang politik diidentikan dengan lingkaran partai Golkar.

⁸⁰ Satria Wangsa., Op Cit., hlm. ii.

⁸¹ Ibid.

Tercatat, bahwa sudah 20 tahun Aburizal Bakrie menjadi kader Golkar, bahkan mempunyai NPAG (nomor Pokok Anggota Golkar) yang kecil, yakni di bawah angka seribu.⁸²

Golkar sebelum menjelma jadi partai politik, sesuai dengan namanya, adalah “Golongan Fungsional”. Golongan inilah merupakan cikal bakal bagi lahirnya partai Golongan Karya pada era Reformasi sekarang ini. Pada tanggal 20 Oktober 1964⁸³, golongan fungsional atau golongan karya, setelah dilegalisasi sebagai bagaian dari MPRS dan Fron Nasional, mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat SEKBER GOLKAR, yang diketuai pertama kalinya oleh Brigjen Djuhartono. Kepemimpinan ini setahun kemudian diserahkan kepada Mayjen Suparto Sukowati karena Djuhartono mendapatkan tugas baru.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan Lalu Mara, di Wisma Bakrie, Lt. 4, Jakarta, 13/12/2004

⁸³ Tanggal 20 Oktober itulah selanjutnya ditetapkan sebagai Hari lahir (HARLAH) Golongan Karya (sekarang Partai Golkar)

⁸⁴ Lihat A. Syamsul Zakaria dan Indra Muchlis Adnan, *Konvensi Nasional Pemilihan Presiden, Perbandingan Partai Golkar di Indonesia dengan Partai Republik & Partai Demokrat di Amerika Serikat* (Yogyakarta: AdiCita, 2004), hlm. 137.

Pada masa Orde Baru, Golongan Karya tumbuh dan berkembang bersama dengan eksponen-eksponen Orde Baru lainnya, menjadi pelopor pembaharuan kehidupan politik berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai upaya mengisi cita-cita proklamasi. Pada munas pertama Golkar ditetapkan adanya Dewan Pembina Golkar dan memilih Soeharto sebagai ketuanya.⁸⁵

Dengan kekuatan dan kekuasaan yang begitu besar pada masa Orde Baru, Golkar selain berhasil memuncaki setiap Pemilu, juga mampu mencetak kebijakan-kebijakan yang menarik segenap kelompok profesi dan kelompok usaha untuk mendekat pada Golongan Karya. Disinilah banyak kelompok usaha yang banyak menyesuaikan dengan praktik sistem politik tersebut, misalnya yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bakrie, baik pada masa generasi pertama, maupun pada masa generasi kedua Aburizal

⁸⁵ Ibid, hlm. 138 dan 140.

Bakrie. Dalam konteks itulah, Aburizal mulai banyak berinteraksi dengan lingkaran Golkar, sebagai golongan politik peserta tetap Pemilu di Indonesia⁸⁶. Selain itu, Golongan Karya serta merta menjadi golongan politik yang berkuasa atau golongan politik pemerintah .

Perjalanan realitas politik demikian itu, berlangsung sangat panjang yakni kurang lebih 32 tahun. Seiring dengan gerakan Reformasi mahasiswa dan rakyat, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto 21 Mei 1998, maka dominasi Golongan Karya pun ikut memudar. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan Reformasi, dan sebagai sikap responsif atas tuntutan itu, Golongan Karya menyelenggarakan musyawarah luar biasa pada tanggal 9-11 Juli 1998. Melalui Musyawarah Nasional luar Biasa (MUNASLUB) tersebut Golongan Karya bertekad memperbaharui diri sesuai tuntutan dan semangat reformasi.

⁸⁶ Golkar pada setiap Pemilu di masa Orde Baru selalu berhasil memuncaki perolehan suara dengan angka yang selalu mencolok. Adapun dua peserta pemilu lainnya, yakni PPP dan PDI, tidak bisa banyak berbuat untuk dapat mengalahkan Golkar. Bahkan kedua parati tersebut sampai batas-batas tertentu, cenderung hanya sekedar menjadi pemanis saja.

Untuk gerakan pembaharuan itu, Munaslub akhirnya mempecayakan pada kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung.⁸⁷ Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Golongan Karya ditetapkan menjadi Partai Golongan Karya (atau Partai Golkar). Dengan menjadi partai politik, Golkar bertekad untuk berketetapan membangun “Golkar Baru Paradigma Baru”.

Diantara pembaharuan sebagai implementasi dari paradigma baru Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung adalah; *pertama*, dihapusnya Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasehat. Dewan Pembina yang pada masa Orde Baru diketuai oleh presiden, kini sudah tidak lagi. Dewan pertimbangan di provinsi yang sebelumnya diketuai oleh gubernur dan Dewan Penasehat di kabupaten/kota yang sebelumnya diketuai oleh bupati juga dihapus.⁸⁸

Kedua, diubahnya struktur kepemimpinan partai. Secara struktural dan dalam konteks

⁸⁷ Ibid, hlm. 143.

⁸⁸ Ibid, hlm. 144.

kader, Partai Golongan Karya tidak lagi mempunyai hubungan politik internal dengan pemerintah. Dengan perubahan ini, proses pengambilan keputusan internal Partai Golkar hanya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sendiri. Dan *ketiga*, Partai Golongan Karya mempunyai institusi penasehat yang secara struktural tidak membawahi kepengurusan Partai Golongan Karya di setiap tingkatan. Para penasehat diangkat berdasarkan senioritas dalam kekaderan dan nasihatnya tidak mengikat partai.⁸⁹

Sebagai akibat perubahan struktur kepemimpinan dalam tubuh Partai Golongan Karya, pemilihan Pimpinan Partai Golkar tidak lagi berasal dari atas (*top down*), tetapi dari bawah (*bottom up*). Perubahan ini juga memberikan gambaran bahwa Partai Golkar tidak lagi identik sebagai partai pemerintah.⁹⁰ Penataan organisasi dan konsolidasi Partai Golkar ternyata mampu mengembalikan kepercayaan rakyat. Diantara kebijakan atau keputusan politik yang mampu

⁸⁹ Ibid, hlm. 145.

⁹⁰ Ibid

mengukuhkan tekad di atas, serta sekaligus mendongkrak citra partai adalah dilaksanakannya demokratisasi internal partai melalui keputusan politik “Konvensi Nasional Pemilihan Presiden”.

Keputusan politik yang dianggap cerdas dan populer itu, telah mengantarkan banyak kalangan untuk terlibat di dalamnya. Diantara yang terpanggil atau terlibat dalam konvensi itu adalah Aburizal Bakrie. Ical menjadi salah satu kandidat presiden pada konvensi tersebut dengan latar belakang pengusaha dan merupakan orang lama sebagai kader Partai Golongan Karya. Tindakan politik inilah, yang makin mengukuhkan akan kedekatan loyalnya Aburizal dengan Partai Golkar atau pada masa Orde Baru, yakni Golongan Karya. Selain kegiatan puncak itu, dalam lingkaran Partai Golkar, Aburizal dikenal juga aktif ceramah ekonomi sebagai nara sumber diskusi politik partai Golkar, juru kampanye nasional, donatur tetap bagi segala kegiatan partai Golkar, penyumbang dana kampanye, dan kegiatan politik lain-lainnya.

D. Kelompok Usaha Bakrie

Dalam Harian Umum Suara Merdeka (31/10/2004) dikatakan bahwa nama Aburizal Bakrie sangat identik dengan Bakrie & Brother. Aburizal Bakrie, memang tidak bisa dipisahkan dari kelompok usaha yang dirintis oleh ayahnya, almarhum Achmad Bakrie. Bukan lantaran mendapat warisan keluarga kalau namanya menjadi istimewa dalam konstalasi bisnis konglomerat di Indonesia. Ical dianggap sukses meneruskan usaha keluarga, bahkan hingga generasi ketiga.⁹¹

Tanggung jawab kala menerima estafet kepemimpinan Bakrie tidak ringan. Sebagai generasi penerus, lelaki penyuka olah raga karate dan tenis ini dituntut melebihi sukses sang ayah. Namun berkat tekun belajar dan berorganisasi, termasuk jatuh bangun, akhirnya usaha Aburizal membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Ical, Bakrie tumbuh menjadi perusahaan konglomerasi.⁹² Anak perusahaannya telah

⁹¹ Lihat, Suara Merdeka, *Pendekar Ekonomi Tanpa Beban*, 31/10/2004

⁹² Ibid.

merambah ke bidang industri, lembaga keuangan, peternakan, perkebunan, media massa, properti, telekomunikasi, pertambangan, agrobisnis, bahkan perbankan sebelum akhirnya dibekukan. Beberapa perusahaannya bahkan tercatat sebagai perusahaan publik dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar di beberapa negara.

Aburizal memang sukses membesarkan Kelompok Usaha Bakrie. Namun krisis 1998 yang membuat porak-poranda hampir semua perusahaan juga membuat kelompok usaha Bakrie limbung. Dengan pinjaman luar negeri yang lumayan gede membuat Bakrie menghadapi masalah besar. Namun, lagi-lagi, berkat kepiawaiannya Kelompok Usaha Bakrie tidak tenggelam. Hanya saja keluarganya tidak lagi menjadi pemegang mayoritas saham Bakrie.⁹³

Berdasarkan hal di atas, Kelompok Usaha Bakrie, yang di dalamnya Aburizal Bakrie menjadi “icon”, dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok bisnis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim politik. Sejarah dari

⁹³ Ibid.

kelompok bisnis yang didirikan oleh Achmad Bakrie ini menunjukkan bahwa mereka selalu mampu bertahan dan berkembang walaupun terjadi pergantian pemerintahan.

Kelompok Usaha Bakrie dirintis di era akhir kolonial Belanda, kokoh pada zaman penjajahan Jepang, tetap bertahan di era kepemimpinan Soekarno, serta berkembang pesat di era Orde Baru.⁹⁴ Dan pertahanan kokoh pun diperlihatkan Kelompok Usaha Bakrie ketika Indonesia memasuki era Reformasi yang terlebih dahulu dihadap oleh badai krisis ekonomi maha dahsyat.

Dalam pandangan Mohammad Taufik, kemampuan Kelompok Usaha Bakrie untuk bertahan dalam setiap perubahan kekuasaan itu, menunjukkan mereka selalu mampu menjalin kerjasama dengan penguasa. Kemampuan melakukan adaptasi dalam setiap pergantian kekuasaan ini, menunjukkan mereka mampu

⁹⁴ Lihat Muhammad Taufik, *Hubungan Kepentingan Pengusaha dan Penguasa Dalam Bisnis Pers; Studi Kasus Bisnis Pers Group Bakrie*, Tesis (Jakarta: Tesis PPs Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2002) hlm. 78.

membaca perubahan politik.⁹⁵ Bertahannya Kelompok Usaha Bakrie di era kepemimpinan Orde Baru tidak lepas dengan kemampuannya menselaraskan diri dengan pemerintah dan elit penguasa. Kelompok-kelompok bisnis yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah atau tidak mempunyai kedekatan dengan elite penguasa Orde Baru akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya, seperti kelompok usaha Aslam dan Arkam yang berkembang pesat di era kepemimpinan Soekarno, namun bangkrut di era pemerintahan Soeharto.⁹⁶

Kemampuannya dalam menselaraskan dengan perubahan iklim politik, terlebih pada era kepemimpinan Orde Baru, Kelompok Usaha Bakrie serta merta menjadi konglomerat pribumi terkemuka yang berdimensi internasional yang mampu bersaing dengan kelompok bisnis raksasa lainnya, seperti Salim Group, Astra Group, Sinar Mas Group, Bimantara Group, Citra Lamtoro

⁹⁵ Ibid, hlm. 92.

⁹⁶ Ibid.

Gung Group, Humpuss Group, Barito Pasific Group, dan Gudang Garam.⁹⁷

Dalam hasil penelitian Mohammad Taufik, dikatakan bahwa di era Orde Baru tidak banyak pengusaha pribumi warisan era Soekarno yang bisa bertahan. Kelompok usaha yang tidak bisa menyesuaikan dengan iklim politik Orde Baru secara perlahan mengalami kemerosotan karena tekanan politik. Pengusaha yang besar di era kepemimpinan Soekarno, seperti Rahman Tamin, Abul Ghani Aziz dan Agus Nuin Dasaad, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan iklim politik Orde Baru, secara perlahan bisnisnya mengalami kebangkrutan.⁹⁸

Dalam kata pengantar buku Yoshihara Kunio, Arief Budiman melihat bahwa pemerintah Orde Baru membangun partner swasta dengan cara memberi fasilitas khusus seperti proteksi dan monopoli kepada pengusaha yang dianggap loyal secara politis. Akibatnya para penguasa yang tumbuh di era Orde Baru sebagian besar adalah

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 242-250. Lihat juga Taufik, ibid

kapitalisme semu (*erzast kapitalism*). Mereka besar karena payung politik, tapi tidak mempunyai kemampuan teknologi dan manajerial yang bagus, sebagai persyaratan untuk bersaing dalam sistem ekonomi pasar⁹⁹. Dengan itu Yashihara Kunio berkesimpulan bahwa kapitalisme yang muncul di Orde Baru adalah sebagai kapitalisme semu. Kapitalisme yang dibesarkan karena perlindungan penguasa dengan pola patron dan klein.¹⁰⁰

Mengomentari keraguan di atas, juga sekaligus mengomentari kemampuannya Kelompok Usaha Bakrie dalam menselaraskan dengan dinamika politik, Aburizal Bakrie dalam

⁹⁹ Ibid, hlm. xxiv-xxv.

¹⁰⁰ Ibid. Sri Mulyani, ekonom Universitas Indonesia, melihat adanya ketidakadilan dari pemerintah Orde Baru, karena selalu memberikan keistimewaan dan fasilitas khusus kepada kelompok usaha yang menjadi kroninya. Fasilitas istimewa tersebut dalam bentuk fasilitas bebas pajak, lokasi murah untuk lahan bisnisnya, maupun berbagai konsesi dan monopoli izin yang sangat mencolok. Lihat Sri Mulyani, *Kapitalisme Global dan Krisis Kepercayaan Terhadap Rezim Soeharto*, dalam Dedi N. Hidayat dkk (ed), *Pers Dalam Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 16-17.

sebuah wawancara¹⁰¹, mengakui bahwa perkembangan dan kemajuan bisnis keluarganya itu tidak lebih karena usaha keras dan profesionalisme. Di era Orde Baru, Aburizal mengaku tidak pernah mendapat proteksi khusus dari pemerintah. Apa yang dilakukannya semata-mata bisnis murni lewat mekanisme pasar terbuka. Pengembangan Kelompok Usaha Bakrie, baik berupa perluasan usaha, perluasan pasar dan memasuki jenis bisnis baru, selalu berdasarkan perhitungan bisnis.

Bahkan Aburizal Bakrie merasa sangat jauh dari pusat kekuasaan di era Orde Baru. Ical melihat perkembangan konglomerat Orde Baru pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan pengusaha nonpri atau pengusaha WNI keturunan. Kenyataan ini muncul karena penguasa lebih berpihak kepada pengusaha nonpri yang hanya berjumlah 3 persen namun menguasai aset ekonomi nasional sebesar 70 persen. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Ical

¹⁰¹ lihat hasil wawancara dengan Aburizal Bakrie yang dilakukan oleh Mohammad Taufik di Gedung Great River Indonesia, 13/3/2001.

pernah mengusulkan UU khusus untuk melindungi kepentingan para pengusaha pribumi.¹⁰²

Indikasi lain yang menunjukkan Kelompok Usaha Bakrie mampu beradaptasi dengan iklim sosial politik dan ekonomi di era Orde Baru yakni aktifnya Aburizal Bakrie dan Nirwan D. Bakrie dalam berbagai kelompok kepentingan atau organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Aburizal Bakrie pernah aktif di organisasi profesi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).¹⁰³ Sedangkan Nirwan aktif di kepengurusan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia).

Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Horison Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 13 Januari 1994. Aburizal menggantikan Sukamdani Sahid Gitosardjono,

¹⁰² Taufik, Loc Cit

¹⁰³ Di kedua organisasi profesi tersebut, Aburizal Bakrie pernah menduduki jabatan puncak menjadi ketua umum. Bahkan di Kadin, Ical dipercaya untuk menduduki jabatan ketua umum dua kali secara berturut-turut, yakni periode 1994-2004.

yang dikenal dekat dengan Soeharto.¹⁰⁴ Terpilihnya Aburizal ini menunjukkan bahwa Kelompok Usaha Bakrie mampu menyesuaikan diri dengan iklim politik.

Menurut pandangan Mohammad Taufik, karena tampilnya Aburizal sebagai ketua umum Kadin sesungguhnya sudah pasti mendapat restu dari pemerintah Soeharto¹⁰⁵. Berkenaan dengan itu, Taufik mengutip teori korporatisme model Philip Schmitter yang menjelaskan bahwa keberadaan unit kepentingan dalam suatu negara diatur oleh lembaga yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal serta direstui negara. Seperti untuk mengendalikan para pengusaha, pemerintah Orde Baru hanya mengakui keberadaan Kadin. Semua pengusaha diharuskan menjadi anggota Kadin agar mudah dikontrol oleh

¹⁰⁴ Taufik, hlm. 107.

¹⁰⁵ Penilaian Taufik demikian di atas bertolak belakang dengan apa yang diberkan dalam buku, Aburizal Bakrie: *Renaissance Ekonomi Indonesia*, yang disunting oleh Iman Sucipto Umar. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa Aburizal Bakrie dalam pencalonannya menjadi ketua umum Kadin justru ditentang oleh Soeharto. Dalam hal itu, Soeharto lebih merestui AR Ramly bekas Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lihat, Iman Sucipto Umar, *Aburizal Bakrie: Renaissance Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004)

penguasa. Organisasi pengusaha di luar Kadin tidak diakui atau tidak direstui.¹⁰⁶

Lebih lanjut Schmitter menjelaskan, unit-unit anggotanya tidak saling bersaing, serta keberadaannya direstui atau dibentuk negara. Secara teoritis tidak mungkin seseorang yang terpilih menjadi pimpinan organisasi strategis seperti Kadin, adalah orang yang mempunyai sikap bersebrangan dengan penguasa Orde Baru. Seorang yang terpilih sebagai pimpinan organisasi yang diakui pemerintah, harus bersikap kooperatif dan akomodatif dengan kepentingan penguasa.¹⁰⁷

E. Karya Tulis dan Publikasi

Aburizal Bakrie adalah tokoh pengusaha yang selain sibuk menjalankan roda bisnis dan relasi politiknya juga produktif melontarkan gagasan-gagasan atau pemikirana segar yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, negara dan kekuasaan. Jika kebanyakan pengusaha tidak banyak bicara, Aburizal mampu menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

pokok pikirannya. Dia bisa berbicara runtut, logis, dengan gaya bahasa yang tenang. Itu selalu diperlihatkan dalam setiap kesempatan.¹⁰⁸

Namun demikian, disayangkan, Aburizal belum pernah menulis sebuah buku yang komprehensif dan mendalam yang mendeskripsikan pemikirannya itu. Menurut Lalu Mara Satria Wangsa, yang sudah tiga belas tahun terakhir selalu mendampingi Aburizal Barie dalam kegiatan bisnis dan dalam aktivitas keseharian Aburizal, sebagai komitmennya “untuk ada kontribusi pada masyarakat”, Aburizal sesungguhnya berkeinginan kuat untuk menulis buku yang cukup komprehensif tentang “Pembangunan politik-ekonomi Indonesia” dan “buku autografi”. Namun karena kesibukan, keinginan kuatnya harus tertunda terus.¹⁰⁹

Kini, kesibukan Aburizal Bakrie makin bertambah, seiring dengan pengangkatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada

¹⁰⁸Dan yang paling nyata ketika menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya saat tampil sebagai kandidat presiden dalam Konvensi Partai Golkar. Suara Merdeka, 31/10/2004.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Lalu Mara Satria Wangsa di Wisma Bakrie lantai 4, Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2004.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2004-2009. Karenanya segala rencana menulis buku itu tampaknya sulit terwujud. Pemikiran-pemikiran Aburizal Bakrie yang dipublikasikan merupakan bunga rampai berbagai persoalan yang dihimpun dari berbagai makalah, artikel, atau hasil wawancara yang dilakukan berbagai media massa dengan dirinya. Selain itu, Aburizal juga memberi kata pengantar buku yang terkait dengan proses politik ataupun ekonomi.

Selain mempublikasikan kumpulan tulisan dalam bentuk buku, ada buku lain yang diterbitkan seputar sepak terjang politik Aburizal Bakrie. Buku ini merupakan kumpulan pemberitaan atau hasil wawancara berbagai media massa tentang berbagai persoalan aktual. Dalam tulisan atau wawancara yang tersebar itu, dinamika gagasan atau pemikiran politik Aburizal Bakrie dapat diikuti secara cermat.

Berikut ini adalah buku atau publikasi terbatas Aburizal Bakrie yang telah tersebar secara luas, diantaranya:

1. Nasir Tamara, *Aburizal Bakrie; Bisnis dan Pemikirannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998)

2. Nsair Tamara, *Alzier, Fenomena Politik di Era Reformasi* (Jakarta: 2003)
3. Imam Sucipto Umar (Penyunting), *Aburizal Bakrie; Renaissans Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004)
4. Lalu Mara Satria Wangsa, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004)
5. Bambang Soesatyo, *HIPMI: Gerakan & Pemikiran* (Jakarta: Pustaka Aksara, 195)
6. Aburizal Bakrie, *Visi Kenegaraan, Ke-Golkar-an, dan Pemilu 2004: Sebuah Sumbangan Pemikiran untuk Partai Golkar* (Jakarta: 2003)
7. Aburizal Bakrie, *Perlunya Sistem Pembangunan Ekonomi Yang Realistis, dalam Buletin Edisi Eksklusif POKJA EKKU* (Jakarta:DPP Partai Golkar, 2003)
8. Aburizal Bakrie, *Sapta Sukses Pembangunan Ekonomi, dalam Buletin Konvensi* (Jakarta: Bakrie Tim, 2004)

9. Aburizal Bakrie, *Tiga Pilar Kebangsaan*, dalam Buletin Konvensi Partai Golkar (Jakarta: Bakrie Tim, 2004)
10. Aburizal Bakrie, *Transformasi Kebangkitan Indonesia*, dalam Buletin Konvensi Partai Golkar (Jakarta: Bakrie Tim, 2004)
11. Berbagai wawancara dan komentar serta pemberitaan di berbagai media massa.

F. Obsesi Politik

Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik bagi Aburizal Bakrie, menurut Rizal Malarangeng adalah tak terlepas dari dorongan “mimpi” yang dimiliki Aburizal Bakrie untuk mewujudkan keamanan ekonomi sebagai basis dinamis bagi kehidupan berdemokrasi.¹¹⁰ Berkaitan dengan dorongan “mimpi” tersebut, Aburizal Bakrie sendiri mengkonfirmasi kepada penulis, bahwa mimpi sebagai obsesi politik Aburizal bakrie adalah membangun

¹¹⁰ Lihat hasil wawancara dengan Rizal Mallarangeng, di freedom Institute, Jakarta, 20/12/2004.

infrastruktur sebagai prasyarat bagi berdirinya bangunan demokrasi.¹¹¹

Selain itu, Aburizal berpandangan bahwa politik adalah panggilan (*politic as vocation*) bagi setiap individu yang berkemampuan¹¹². Karena sebagai panggilan maka rumusannya menurut Aburizal adalah bagaimana kita bisa menghidupi politik (*for politic*), bukan sebaliknya justru politik dijadikan sumber kehidupan atau sumber penghasilan (*off politic*). Celakanya, selama ini, dalam pengamatan Aburizal, untuk yang disebutkan terakhir, *off politic*, cenderung melekat pada setiap politisi, baik yang berlatar belakang aktivis, akademis, militer, maupun yang berlatar belakang pengusaha yang dipandang sudah memiliki harta yang berkecukupan sebelumnya.

Berkaitan dengan itu, menurut Aburizal bahwa politik sesungguhnya harus ditempatkan pada posisi untuk memberikan jalan lebar bagi masyarakat luas dalam meningkatkan partisipasi

¹¹¹ Lihat hasil wawancara dengan Aburizal Bakrie di Kantor Menko Perekonomian, Lt. 4, Jakarta, 21/2004.

¹¹² wawancara dengan Aburizal Bakrie di Kantor Menko Perekonomian, Lt. 4, Jakarta, 21/2004.

bagi segala pembangunan nasional, termasuk pembangunan politik.¹¹³ Dalam pandangan Aburizal, berbagai krisis kemasyarakatan di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran, adalah dimungkinkan karena sistem kehidupan politik yang tidak kondusif bagi partisipasi masyarakat. Karena itu, menurutnya diperlukan sistem politik yang kuat dan bersih.

Untuk mencapai sistem politik yang kuat dan bersih, Aburizal mempersyaratkan tiga hal, *pertama*, penguasa atau pemerintah yang bersih (*good and clean goverment*). Salah satu indikator bagi pemerintah yang bersih adalah pemerintah sebagai pimpinan politik nasional harus terbebas dari praktek suap. *Kedua*, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)¹¹⁴. Meskipun bukan orsinal gagasan dari Aburizal, yakni dari program Kadin di bawah pimpinannya,

¹¹³ Wawancara dengan Aburizal Bakrie

¹¹⁴ Good Corporate Governance (GCG) adalah program Kadin bidang Pranata dan Etika Bisnis. Disebutkan bahwa yang dimaksud *good corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pertanggungjawaban, akuntabilitas, kesetaraan dan transparansi. Lihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Seri Pemahaman GCG, Bidang Pranata dan Etika Bisnis*, 2003.

konsep tersebut dalam pandangan Aburizal, pengusaha merupakan segmen masyarakat yang bisa menggerakkan nasionalisme baru bagi bangsa Indonesia. Karenanya, dalam konteks itu, pengusaha disyaratkan untuk tidak melakukan praktek penyuapan kepada pengambil kebijakan. Dengan terbebas dari praktek budaya suap-menyuap, persaingan diantara pengusaha akan kondusif dan sehat. Sehingga akan menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional yang signifikan.

Dan *ketiga*, adanya partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, Aburizal menilai dunia usaha akan mengalami keterlambatan dan cenderung labil. Demikian juga berlaku pada dunia politik Indonesia yang tengah melakukan praktek demokrasi pasca otoriterian Orde Baru. Dalam konteks itu, di setiap kegiatan, Aburizal Bakrie kerap kali melontarkan “pentingnya kita untuk selalu berorientasi masyarakat”. Dengan itu, menurutnya kita wajib memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan rakyat.

Bertolak dari lontaran tiga pemikiran di atas, Ical berkeyakinan bahwa dengan bekal ilmu dan kemampuan memimpin organisasi profesional dan kemasyarakatan yang ia geluti sejak masih di dunia kampus hingga masuk dalam dunia bisnis profesional, dan dengan upaya keras bersama seluruh komponen anak bangsa tersebut, kita melangkah bersama membangun bangsa tercinta ini mensejahterakan lebih dari 200 juta rakyat Indonesia yang berdisiplin. Penjabaran dari itu, menurut Ical bisa dengan membangun “nasionalisme baru” melalui pembangunan ekonomi, demokrasi, dan nasionalisme terbuka.¹¹⁵

Meskipun kalimat di atas disampaikan pada konteks kompetisi calon presiden konvensi nasional Partai Golkar, kalimat itu secara substansi disampaikan juga di saat dua momentum politik berikutnya, yakni, *pertama*, ketika memberi dukungan Aburizal terhadap pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo pada pemilihan presiden langsung putaran pertama, 5 Juli 2004, serta memberi dukungna kepada

¹¹⁵ Wawancara dengan Aburizal Bakrie di Kantor Menko Perekonomian Lt. 4, Jakarta, 21/12/2004

pasangan SBY-JK pada putaran kedua Pilpres 2004. Dan *kedua*, menjelang penyusunan Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Mohammad Yusuf Kalla (SBY-MJK) setelah pasangan tersebut terpilih menjadi presiden-wakil presiden RI 2004-2009 pada Pilpres putaran kedua 20 September 2004.

BAB 3
PEMIKIRAN NASIONALISME-DEMOKRASI
ABURIZAL BAKRIE

Pada bab ini disajikan objek material dan objek formal penelitian berupa naskah-naskah dan tema-tema pemikiran politik Aburizal Bakrie yang berhubungan dengan nasionalisme dan demokrasi. Tema-tema pemikiran ini didapatkan dari berbagai sumber. Berikut di bawah ini tema-tema pemikiran politik dimaksud.

A. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Aburizal Bakrie melihat bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kewajiban konstitusional bagi semua pihak, bukan sekedar tanggung jawab sosial atau

panggilan kesetiakawanan sosial semata.¹¹⁶ Dari itulah, bisa dipahami mengapa Aburizal dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan cenderung berparadigma integralistik, dimana ia menyebutkan, pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui integralistik.¹¹⁷

Berkaitan dengan itu, menurut Aburizal, pemberdayaan ekonomi rakyat juga harus mengacu pada konsep satu kesatuan ekonomi, demokrasi ekonomi Indonesia, serta idealisasi keseimbangan struktur perekonomian dan struktur dunia usaha itu sendiri¹¹⁸. Dalam hal ini Aburizal mengisyaratkan bahwa hal itu sudah tidak memadai jika upaya-upaya pemberdayaan tidak sekaligus dikaitkan dengan realitas-realitas

¹¹⁶ Lihat, Lalu Mara Satria Wangsa, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004). Hlm. 167.

¹¹⁷ Selain berparadigma integralistik, juga Aburizal Bakrie dapat dikatakan cenderung berparadigma konstitusionalis. Hal itu, tak terlepas dari pandangan kuatnya mengenai urgensi konstitusi sebagai payung hukum bagi upaya pengaturan pemberdayaan ekonomi rakyat Indonesia.

¹¹⁸ Ibid.

baru perekonomian global, yang antara lain kini diwarnai oleh makin menajamnya persaingan.¹¹⁹

Aburizal Bakrie menegaskan bahwa agenda pemberdayaan ekonomi rakyat harus sekaligus dipersepsikan sebagai taruhan ketangguhan dan kemandirian. Hal itu menurutnya sangat penting agar tidak terjadi yang besar dan kuat semakin maju dan kuat, sebaliknya yang kecil dan lemah makin terpuruk dan serba kesulitan. Dalam hal ini perekonomian nasional justru akan diuji ketangguhannya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi yang merupakan realitas baru perekonomian dunia.¹²⁰

Berkaitan dengan pandangannya bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat harus integralistik dan memperhatikan realitas global, maka Aburizal Bakrie menekankan bahwa agenda pemberdayaan ekonomi rakyat (untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing kuat), setidaknya harus dikaitkan dengan tiga hal krusial.¹²¹ *Pertama,*

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid., hlm. 168.

konsekuensi dari realitas-realitas baru dalam perekonomian global. *Kedua*, adaptabilitas basis institusi perekonomian nasional sebagai bangsa, yang terdiri dari pelaku utama ekonomi, penentu kebijakan, semua aturan dan kebijakan menyangkut ekonomi, penentu kebijakan, serta semua aturan dan kebijakan menyangkut ekonomi, perdagangan, dan investasi. *Ketiga*, basis budaya yang mencakup nilai-nilai, visi, pola pikir, dan perilaku dalam menggerakkan proses ekonomi dan proses bisnis itu sendiri.¹²²

Untuk hal krusial pertama, dalam konteks ini Aburizal mengemukakan realitas global baru mengenai munculnya aturan main, tolak ukur, dan standarisasi yang berlaku secara internasional, multinasional, dan global. Dalam kaitan ini, menurutnya, keberhasilan manajemen perekonomian suatu bangsa, atau suatu organisasi bisnis misalnya, sudah tidak lagi ditandai sekedar dari faktor pertumbuhannya yang relatif tinggi. Pertumbuhan yang tinggi dan stabil tetap merupakan isyarat kesinambungan

¹²² Ibid.

dan perkembangan. Namun, faktor lainnya, seperti hak-hak sosial pekerja dan masyarakat umumnya, dewasa ini sudah dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan tersebut. Konsekuensinya, negara atau dunia usaha harus melakukan transformasi manajemen sumber daya, terutama perubahan pendekatan dari manajemen *shareholder* manajemen *stakeholder*.¹²³

Dalam perspektif inilah, misalnya untuk konteks dunia usaha atau pengusaha, Aburizal menyarankan agar para pekerja sudah tidak bisa lagi diasumsikan sekedar sebagai faktor produksi, masyarakat luas sebagai konsumen yang pasif, serta lingkungan sebagai penyedia bahan baku dan tempat pembuangan limbah belaka. Semuanya mesti ditempatkan sebagai komponen *stakeholder*, yang kepentingan-kepentingannya harus diakomodasi dalam menyusun strategi maupun desain bisnis mereka.¹²⁴

Karena itu, Aburizal Bakrie juga mempersyaratkan bahwa dunia usaha yang

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid, hlm. 169.

diharapkan menjadi ujung tombak kemitraan integralistik ini harus memperhatikan beberapa hal penting. Diantara paling menonjol, menurutnya ialah perlunya pergeseran basis keunggulan (komparatif apalagi kompetitif) suatu ekonomi, atau suatu organisasi usaha, dari sumber daya alam ke kecerdasan otak manusia yang umumnya dikategorikan ke dalam iptek dan informasi.¹²⁵

Lebih lanjut Aburizal Bakrie menjelaskan bahwa pergeseran model itulah yang lebih jauh dirumuskan sebagai *knowledge-based economy*. Dengan makin terspesialisasi iptek dan informasi yang dikuasai, atau yang dijadikan basis keunggulan suatu produk, maka produk yang bersangkutan berpeluang besar untuk lebih kompetitif. Pada level individu, hal ini juga berarti keharusan untuk menguasai minimal satu bidang keilmuan tertentu, dan dengan itulah bersangkutan membangun kompetensinya secara terus menerus.¹²⁶

¹²⁵ Ibid, hlm. 170.

¹²⁶ Ibid.

Selain hal di atas, agar kemitraan integralistik pengusaha dalam pemberdayaan ekonomi rakyat terbumikan sehingga dunia usaha bisa lebih riil dalam mendukung mewujudkan segala visi ekonomi kerakyatan, dalam pandangan Aburizal bahwa pengusaha atau dunia usaha harus lebih mengedepankan integritas etika dan moralitas kerakyatan.¹²⁷ Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena Aburizal melihat bahwa sejauh ini pengusaha lebih menempatkan uang di atas segala-galanya¹²⁸. Bahkan, dengan mengutip lansiran Siswono Yudohusodo, Aburizal mencontohkan banyaknya pengusaha yang “membeli” politisi untuk mengamankan segala jaringan bisnisnya.

Berdasarkan itulah, Aburizal berpandangan bahwa para pengusaha seperti itulah yang kembali menempatkan kekuasaan politik sebagai panglima. Konsekuensinya mereka sulit untuk melakukan peran dalam pembangunan

¹²⁷ Ibid, hlm. 174.

¹²⁸ Begitu pula sebaliknya diperlukan kemitraan pemerintah sebagai penentu kebijakan yang tidak menempatkan posisi politik di atas segalanya. Lihat Ibid., hlm 179.

perekonomian yang berbasiskan rakyat dan keadilan secara menyeluruh. Untuk itu, menurutnya diperlukan komitmen bersama untuk terus melakukan koreksi internal dalam memajukan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia.¹²⁹

2. Negara, TNI dan Otonomi Dunia Usaha

Pandangan Aburizal Bakrie mengenai hubungan peran negara dengan dunia usaha seringkali mengkaitkannya dengan variabel peran pemerintah atau aparatur negara dan peran militer. Untuk yang pertama misalnya, Aburizal memberikan tujuh nuktah tentang peranan penting aparatur negara bagi peningkatan partisipasi dunia usaha.¹³⁰ Ketujuh nuktah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, siapa pun pelaku bisnis di Indonesia, tidak akan ada yang tidak mengakui bahwa dalam proses kegiatan mereka peran

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Lihat Nasir Tamara, *Aburizal Bakrie: Bisnis dan Pemikirannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 325.

aparatur selalu mereka hadapi.¹³¹ *Kedua*, apakah peranan aparatur itu dinilai sebagai hal yang positif atau kadangkala negatif, namun jelas bahwa dalam proses pembangunan yang melibatkan kaum usaha dan masyarakat luas, amat strategis untuk menghitung peranan aparatur negara.¹³² *Ketiga*, tak pelak lagi, penamaan “kolusi”, adanya “*high risk economy*” adalah contoh-contoh buruk tentang hubungan kerja dengan pemerintah dan kalangan usaha, dimana komoditasnya adalah kolusi dan wewenang pemerintah yang ada pada akhirnya mengorbankan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Proses penggusuran tanah, proses aksi buruh yang menuntut UMR dilaksanakan, proses mekanisme tender yang dinilai tidak transparan, itu semua mempunyai efek negatif dalam iklim usaha secara nasional.¹³³

Keempat, hal-hal yang diungkapkan tersebut semakin sulit untuk dibiarkan di masa-masa mendatang. Globalisasi perekonomian yang

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

menghasilkan suatu ekonomi terbuka atau “*open economy*” adalah proses di mana setiap kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya, amat terbuka untuk diketahui semua kalangan yang ada di dunia.¹³⁴ *Kelima*, ekonomi terbuka kita mensyaratkan juga satu keterbukaan dari kalangan aparatur dan masyarakat sendiri. Deregulasi ekonomi yang telah berlangsung sejak 1983 dan masih akan berlangsung dalam waktu-waktu mendatang, merupakan salah satu cara, namun bukan satu-satunya cara, dalam membuat ekonomi kita lebih terbuka, termasuk keterbukaan pelayanan jasa-jasa pemerintah. Apa yang disebut “*public accountability*” bukan hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa, tetapi juga berlaku bagi lingkup pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah.¹³⁵

Keenam, dengan perkataan lain, “*open economy*” yang kita punyai ini dan akan terus meningkat keterbukaannya, akhirnya mau tidak mau juga menyangkut akan adanya masyarakat

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid., hlm 325-326.

yang lebih terbuka atau “*open society*”.¹³⁶ Dan *ketujuh*, berkenaan dengan hal-hal di atas, dibutuhkan suatu dialog yang bersifat kontinyu antara aparaturnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kalangan usaha dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan dan kemitraan positif antara pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat atau rakyat.¹³⁷

Lebih tegas lagi, berbicara tentang posisi masyarakat dalam kepentingan pemerintah dan pengusaha, Aburizal Bakrie menekankan bahwa *pertama* negara atau pemerintah tidak bisa lagi selalu menempatkan masyarakat sebagai obyek keputusan, tetapi pemerintah pun harus bisa menempatkan masyarakat sebagai mitra, yang juga memiliki aspirasi dan cita-cita sosialnya masing-masing. Bahkan, pada aspek-aspek tertentu justru masyarakatlah yang harus tampil lebih ke depan.¹³⁸

¹³⁶ Ibid. Dalam rangka keterbukaan itu, Aburizal melihat bahwa peran serta negara atau dalam hal ini aparaturnya pemerintah menjadi lebih menonjol dalam-waktu-waktu sebelumnya.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Satria Wangsa, *ibid*, hlm. 168-169

Kedua, dengan realitas demikian Aburizal berpandangan bahwa organisasi usaha yang telah mapan dan kuat harus dapat memahami bahwa negara atau pemerintah memiliki mandat konstitusi untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat atau rakyat. Dengan demikian, negara atau pemerintah memang wajar memihak komponen-komponen ekonomi rakyat, umpamanya dengan memberi pengecualian atau pun kemudahan tertentu. Artinya, sejauh menyangkut pemberdayaan ekonomi rakyat, maka pengecualian tersebut justru diperlukan. Bahkan lebih dari sekedar wajar, pemihakan negara dimaksud perlu diangkat ke tataran yang sifatnya lebih strategis, yaitu penciptaan ekonomi politik nasional baru berupa politik ekonomi kerakyatan atau barangkali politik ekonomi keseimbangan.¹³⁹

Seperti disampaikan di awal bahwa selain variabel pemerintah dalam melihat posisi negara bagi peningkatan partisipasi dunia usaha adalah variabel militer atau dalam konteks Indonesia adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam

¹³⁹ Ibid., hlm. 173-174.

hal ini Aburizal berpandangan bahwa peran tentara perlu dikembalikan sebagai penjaga keamanan. Hal itu diperlukan karena menurut pengamatannya, keamanan Indonesia sangat centang perenang sehingga berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Padahal menurutnya keamanan merupakan faktor utama, khususnya yang menyangkut fisik pekerja.¹⁴⁰ Bahkan dalam sebuah wawancara Aburizal pernah menyampaikan bahwa masalah keamanan lebih diperhitungkan ketimbang masalah politik.¹⁴¹

Dalam konteks militer Indonesia di era Reformasi, Aburizal berpandangan bahwa peran keamanan harus tetap dipegang oleh TNI, kenapa demikian, karena TNI sebagai alat negara dipandang lebih siap ketimbang Polri. Dalam sebuah wawancara misalnya Aburizal, yang dikutip Iman Sucipto Umar¹⁴², menyampaikan bahwa TNI adalah satu-satunya lembaga yang saat ini yang

¹⁴⁰ Lihat, Iman Sucipto Umar, *Aburizal Bakrie: Renaisans Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004), hlm. 116.

¹⁴¹ Ibid. Sisi penting dari keamanan menurut Ical adalah penegakan hukum.

¹⁴² Ibid., hlm. 115.

paling siap.¹⁴³ Lebih mendasar lagi Aburizal memberikan alasan bahwa yang punya aparat teritorial paling lengkap menurutnya adalah TNI. Untuk mengembalikan peran TNI diperlukan payung politik. Kemudian untuk memperkuat pendapatnya, Aburizal mencontohkan peran militer di Amerika Serikat dalam dunia usaha ketika Los Angeles rusuh. Disitu diberlakukan darurat sipil, dua brigade tentara diterjunkan. Perintahnya, tembak mati bagi para biang rusuh. Menurutnya mereka bergerak karena ada payung hukum.¹⁴⁴

Sampai di sini kita bisa menyimak bahwa hubungan negara dengan dunia usaha dalam pandangan Aburizal Bakrie terletak pada sejauhmana aparat pemerintah membangun mitra positif dengan kalangan pengusaha dengan melibatkan peran serta masyarakat luas. Dan selain itu bagaimana juga pemerintah bisa

¹⁴³ Perlu disampaikan disini bahwa pandangan ini disampaikan pada konteks kegamangannya ketika bangsa ini diduga tengah menghadapi masa transisi yang berkepanjangan dan akan menjadi ancaman bagi alam kondusif pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

¹⁴⁴ Ibid.

menjamin keamanan melalui peran aktif dari tentara untuk mengamankan segala kativitas bisnis di Indonesia, termasuk iklim investasi.

Misalnya dengan menyitir pandangan Mahathir Muhammad pada pertemuan tokoh-tokoh bisnis dan pemerintahan negara-negara Asia di Malaysia, Aburizal mencatatkan bahwa tugas pemerintah, dalam konteks pemenuhan kebutuhan finansial untuk penyelenggaraan pemerintahan, sebenarnya sederhana, yaitu mengambil dana 30 % dari profit yang didapat pengusaha. Maka untuk mendapatkan jumlah dana besar, tugas pemerintah adalah mendukung pengusaha agar mencapai profit optimal. Untuk itu, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.¹⁴⁵

Salah satu prasyarat yang signifikan dari upaya penciptaan iklim investasi atau iklim bisnis lainnya adalah praktek pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu, menurutnya, termasuk dalam menyongsong perubahan tata

¹⁴⁵ Wangsa., Op Cit., hlm. 197.

pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan kebijakan politik Otonomi Daerah.¹⁴⁶

3. Dunia Usaha dan Otonomi Daerah

Menurut Aburizal Bakrie, bagi dunia ekonomi, prinsip-prinsip otonomi daerah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan sebuah sistem pemerintahan yang secara strategis memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintahan daerah. Hal ini semestinya diikuti porsi penerimaan keuangan bagi daerah yang lebih besar untuk membiayai pelaksanaan fungsinya yang makin luas (*money follow function*).¹⁴⁷

Berkaitan dengan Otonomi Daerah di atas, Aburizal berpendapat bahwa di Indonesia terdapat

¹⁴⁶ Ibid. Ical selanjutnya menyampaikan bahwa apa pun perubahan yang dilakukan dalam tata pemerintahan adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

¹⁴⁷ Ibid. Dalam kaitannya dengan iklim investasi, menurutnya penting untuk dicermati apakah kewenangan dan sumber pendapatan keuangan daerah otonomi di era desentralisasi ini telah meningkat secara berarti dibanding masa sentralisasi.

daerah yang kaya sumber alam (SDA) dan daerah yang miskin atau terbatas sumber daya alamnya¹⁴⁸. Menurut Ical, daerah yang kaya memiliki, antara lain: pertambangan umum, migas, kehutanan, dan perikanan.¹⁴⁹

Bagi daerah-daerah kaya SDA, dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah dan dengan dana bagi hasil sumber daya alam dari keempat sektor tersebut, jelas akan mendapatkan sumber pemasukan keuangan yang lebih besar dibanding yang didapati dalam sistem pemerintah sentralisasi. Dengan demikian secara teoritis--bila tidak salah menejemen atau dikorupsi--, menurutnya, besar peluang bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik bagi masyarakat umum (pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dll.) maupun bagi dunia usaha (perizinan, pajak daerah, dll.).¹⁵⁰

Sebaliknya, menurut Aburizal, bagi daerah-daerah yang sangat terbatas SDA-nya, secara

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 198-199.

umum bisa dikatakan hampir tidak ada perubahan signifikan dalam pendapatan daerah. Sumber keuangan daerah dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang didapat dari pemerintah pusat untuk mengisi celah fiskal (selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal) belum memadai karena tambahan beban finansial yang besar bagi daerah (yang signifikan adalah beban biaya akibat transfer pegawai negeri dari pusat ke daerah).¹⁵¹

Selain terdapat celah positif dari kebijakan otonomi daerah bagi dunia usaha, dalam pandangan Aburizal, terdapat juga implikasi yang potensial merugikan dunia usaha. Diantaranya adalah munculnya berbagai macam pungutan daerah baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun “sumbangan wajib” yang tidak semestinya, dan hanya menambah biaya usaha (ref. Studi KPPOD tentang peraturan daerah menemukan bahwa 30% dari sekitar 1.200 Peraturan Daerah masuk dalam katagori bermasalah “subtansial” dan “prinsipil”).¹⁵²

¹⁵¹ Ibid., hlm. 199.

¹⁵² Ibid.

Selain tambahan finansial, dalam pengamatan Aburizal, dunia usaha juga terbebani *opportunity cost* karena harus menangani hal-hal yang tidak semestinya, *dispute* dengan pemerintah daerah. Misalnya ditemukan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat korelasi positif antara daerah-daerah yang minim potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan distortifnya Peraturan Daerah (Perda) daerah-daerah tersebut bagi aktivitas dunia usaha.¹⁵³

Namun demikian, dalam menghadapi masalah Otonomi Daerah kaitannya dengan dunia usaha, Aburizal Bakrie mensugestikan empat hal yang mesti diyakini dan dihayati.¹⁵⁴ *Pertama*, bahwa pembangunan ekonomi mensyaratkan rentang waktu jangka panjang untuk memetik hasilnya. Menurutnya, sejalan dengan kesepakatan Johannesburg, pembangunan ekonomi mesti berdimensi *sustainable (economy)*

¹⁵³ Ibid., hlm. 199-200. Masalah otonomi daerah lain yang sempat Ical beberkan pada tulisan yang sama adalah masalah Kawasan Otorita Batam dan masalah pertanahan (yang merupakan unsur sangat vital dalam investasi).

¹⁵⁴ Ibid, hlm. 201.

development. Aspek-aspek untuk kepentingan generasi mendatang-dengan tidak mengabaikan kepentingan masa kini-harus menjadi semacam dogma untuk diterapkan. Prinsip ini mensyaratkan kesetaraan *mind set* penyelenggara pemerintah dan para *stakeholder* pembangunan ekonomi lainnya.¹⁵⁵

Kedua, dalam hal kompetensi, daerah-daerah otonomi harus mampu menghasilkan *blue print* mengenai *strategic plan* arah pembangunan ekonomi daerah yang *aplicable* dengan kelengkapan *action plan*. Tidak berhenti pada sekedar dokumen perencanaan pembangunan yang hanya tertumpuk sebagai arsip-arsip pemerintah.¹⁵⁶

Ketiga, di samping kompetisi menjadi titik tekan pengembangan ekonomi daerah, sangat disadari bahwa tidak satu pun daerah atau bahkan negara sekalipun yang bisa sepenuhnya independen. Independensi wilayah juga menjadi faktor yang penting diperhatikan dan karena itu sinergi kerja sama antar daerah otonomi juga

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Ibid., hlm. 202.

diperlukan. Selain pertimbangan skala ekonomi, kerja asama antar daerah mutlak diperlukan untuk memfasilitasi jenis-jenis usaha yang unit usahnya melintasi wilayah administrasi kabupaten/kota, bahkan provinsi.¹⁵⁷

Keempat, di luar beberapa hal di atas tersebut di atas, studi baru-baru ini yang dilakukan KPPOD mengenai Pemingkatan Daya tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota menunjukkan lima faktor utama yang mempengaruhi daya tarik investasi: kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, produktivitas dan tenaga kerja, serta infrastruktur fisik.¹⁵⁸ Untuk faktor kelembagaan, sebagai peringkat paling atas, indikasi kuatnya adalah *good governance*, dengan itu juga dunia usaha akan berlomba-lomba mewujudkan *good corporate governance*.¹⁵⁹

¹⁵⁷Ibid. Barangkali konsekwen dengan paradigma konstitusionalinya, Aburizal beralasan, pendapatnya di atas tak terlepas dari titah pasal 87 UU 22/1999, yakni, yang menghendaki adanya kerja sama antardaerah otonomi, dihapkan terjadi simbiosismutualisme yang saling menguntungkan dalam kerja sama yang diwujudkan dalam berbagai hal: ekonomi, kelembagaan pemerintah daerah, pendidikan, dll.

¹⁵⁸ Ibid., hlm. 204.

¹⁵⁹ Ibid.

Dengan konsep di atas, Aburizal mewanti-wanti, agar segala pelaksanaan otonomi daerah akhirnya benar-benar menjadi *part of the solution* dalam perbaikan berbagai sektor kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi *part of problem*. Sikap kenegarawanan semua unsur masyarakat, terutama para pemimpinnya, sangat diperlukan untuk merealisasikannya.¹⁶⁰

4. Pengusaha dan Budaya Suap

Salah satu gagasan menonjol dan menarik Aburizal Bakrie, meskipun gagasan ini bukan orsinal darinya, adalah ide tentang pakta anti suap,¹⁶¹ yang merupakan elaborasi atas gerakan

¹⁶⁰ Ibid., hlm 205.

¹⁶¹ Konsep Pakta Anti Suap (PAS) adalah penjabaran konsep politik ekonomi yang dideklarasikan Kadin bersama komponen dunia usaha lainnya. Pada saat itu (2003) Kadin berada dibawah kepemimpinan Aburizal. Dalam buku Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS) dijelaskan bahwa pengertian “Anti Suap” meliputi: tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak meminta, tidak memberi dan tidak menerima suap. Diantara katagori parktek-praktek suap dalam kacamata Kadin adalah *pertama*, Memberi suap untuk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain, yakni menyuap untuk memperoleh izin ekspor/impur, menyuap untuk mendapatkan kontrak atau hak istimewa, menyuap untuk meperoleh konsesi usaha tertentu, menyuap untuk memperoleh dana publik yang terbatas, menyuap untuk memperoleh komoditas bersubsidi, menyuap untuk memperoleh

pembasmian segala praktek korupsi sebagai respon dari tuntutan gerakan reformasi 1998. Hal itu dipandang penting dan mendesak juga ketika relasi antara pengusaha dan penguasa telah dianggap tidak sehat dan sangat mengganggu bagi penciptaan iklim perekonomian Indonesia. Dimana praktek korupsi di kalangan pengusaha dengan baju suap telah mendekati menjadi “bahaya laten”.¹⁶²

perlindungan usaha dari pesaing-pesaing, menyuap untuk memenangkan tender publik, menyuap untuk mempermudah dan mempercepat perolehan kredit, dan menyuap untuk mendapatkan lokasi perumahan umum. *Kedua*, memberi suap untuk menghindari atau mengurangi biaya, yakni, menyuap untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, menyuap untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan bea masuk, menyuap untuk menghindari kontrol harga, menyuap untuk pelayanan publik secara “khusus”, menyuap untuk mendapatkan penunjukan langsung mengerjakan proyek di lingkungan birokrasi, dan menyuap untuk tidak memberikan lisensi usaha kepada pesaing. Dan *ketiga*, memberikan suap untuk memperoleh pelayanan khusus, yakni, menyuap untuk memperoleh informasi dari “orang dalam”, menyuap untuk memperoleh layanan yang lebih cepat dan proses yang diperpendek, menyuap untuk memperoleh “peringatan dini” akan adanya suatu razia oleh polisi, menyuap untuk meringankan vonis atau membebaskan dari hukuman, dan menyuap untuk melindungi bisnis ilegal. Lihat, Kampanye Nasional Anti Suap (Jakarta: Kadin dan BTP, 2003) hlm. 9.

¹⁶² Dalam hal itu Faisal Basri memberikan gambaran dengan jelas kadar praktek korupsi di Indonesia. Bahwa Secara kuantitatif dan juga kualitatif tingkat keparahan dari korupsi di Indonesia

Berkenaan dengan itu, adalah menegaskan jika dari 133 negara bangsa-bangsa, Indonesia merupakan negara keenam dari jajaran negara paling korup di dunia. Peringkat tersebut tak banyak berbeda dari tahun lalu, yang menduduki

sangat parah. Jika kita membandingkannya dengan praktek-praktek pidana korupsi di tempat negara lain. Dari tahun ke tahun kasus-kasus korupsi ini semakin meningkat. Hasil penelitian dari IRC maupun dari TI (*Transparency International*) yang terbaru menanyakan kepada pelaku-pelaku bisnis di negara ini. Indikatornya tercermin dari mis-alokasi sumber daya yang mengakibatkan perlemahan di dalam sendi-sendi ekonomi yang membuat kita rentan dalam krisis. Hal inilah yang membuktikan bahwa dengan adanya tingkat korupsi yang tinggi menyebabkan degradasi pondasi ekonomi yang paling parah diantara negara-negara yang telah terkena krisis terutama krisis yang melanda negara-negara di Asia. Lihat *Media Transfarsansi Membangun Indonesia*, Edisi 23/8/2000.

Sementara itu dari sisi tata pengelolaan usaha dan pemerintahan, Faisal Basri mengutarakan bahwa dari sepuluh negara Asia (Singapura, Hongkong, Taiwan, India, Korea, Malaysia, Cina, Thailand, Filipina, dan Indonesia) yang diteliti oleh Bank Pembangunan Asia, Indonesia berada pada posisi paling buncit dalam penerapan good corporate governance selama tiga tahun terakhir. Lihat Kompas, 16/02/2004.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofyan Wanandi. Ia mengatakan, praktik suap dan korupsi yang terjadi saat ini sudah sangat parah, bahkan lebih buruk dari masa Orde Baru. Korupsi dan suap tidak lagi hanya terjadi di pusat, tetapi sudah menjalar sampai ke daerah-daerah sebagai efek samping otonomi. Ibaratnya, kalau pada masa Orde Baru korupsi atau suap dilakukan di bawah meja, di era reformasi ini malah meja-mejanya diambil. Benar-benar menyedihkan. Kompas, 25/10/23.

tempat keempat dari 102 negara yang disurvei. Hasil ini merupakan indeks persepsi korupsi Transparency International tahun 2003 yang dirilis pada hari yang sama di Jakarta oleh Transparency International Indonesia. Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Emmy Hafild mengatakan, Indonesia masuk peringkat ke-122 dari 133 negara yang disurvei.¹⁶³

Sehubungan dengan itu, Aburizal mengatakan, kita harus mulai menghentikan suap sekarang. Ini gerakan moral agar orang malu dan takut berbuat suap. Ical mengemukakan faktanya Indonesia adalah salah satu negara paling korup di dunia. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International tahun 2002 menempatkan Indonesia bersama Kenya pada peringkat ke-96 dari 102 negara dengan nilai IPK 1,9.¹⁶⁴ Aburizal juga mengemukakan produktivitas tenaga kerja hanya seperempat produktivitas tenaga kerja di Cina. Sehingga iklim usaha sangat tidak kompetitif. Apalagi kalau masih harus membayar biaya

¹⁶³ Kompas, 25/10/2003.

¹⁶⁴ Tokoh Indonesia, 2/10/2004.

macam-macam, dengan dalih uang terima kasih atau apa pun di setiap tingkatan, daya saing kita akan semakin terpuruk.

Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dibawah pimpina Aburizal Bakrie berikrar akan memerangi suap. Ada Pakta Anti Suap Dunia Usaha, ada Kampanye Nasional Anti Suap 2003-2004, ada Gerakan Nasional Anti Suap 2005-2015.¹⁶⁵ Dasar pemikiran tentang pentingnya pembasmian praktek suap, menurut Aburizal adalah *pertama*, bahwasanya praktek suap tidak sesuai dengan etika usaha. *Kedua*, praktek suap akan memporak-porandakan tatanan ekonomidan tatanan bisnis yang sehat. *Ketiga*, parktek suap merusak moral serta merendahkan harkat dan martabat bangsa. Dan *keempat*, praktek suap sangat berpotensi dan terbukti telah menyengsarakan kehidupan rakyat.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Kompas, *Kadin Memerangi Suap, Mungkinkah ?* Tajuk Rencana, 4/10/2003.

¹⁶⁶ Lihat Aburizal Bakrie, *Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia*, dalam Kampanye Nasional Anti Suap 2003-2004 (Jakarta: Kadin Indonesia, 2003), hlm. 2.

Selain dasar pemikiran di atas, dengan mengutip rumusan butir pertama dari delapan butir Paradigma Baru Kadin, Ical mengingatkan bahwa dunia usaha perlu secara tulus melakukan introspeksi, berani mengakui kekeliruan dan kesalahan di masa lalu, dan secara konkrit mengubah sikap dan perilaku ke arah terwujudnya praktek bisnis yang beretika.¹⁶⁷

Namun demikian dalam praktek pemberantasan budaya suap tersebut, nampaknya Aburizal 'gamang', ia mengakui sendiri bahwa dalam rangka inipun kita harus tetap berpikir realistis. Menurutnya kita tidak mungkin memberantas suap sampai pada akar-akarnya. Tegasnya yang ingin kita kerjakan adalah berupaya untuk menekankan peluang-peluang terjadinya suap seoptimal mungkin.

Lebih lanjut, Ical menjelaskan bahwa kitapun tidak utopis, kita tidak akan mampu menciptakan dunia usaha yang bersih secara sempurna. Kita sepenuhnya menyadari bahwa suap sampai tingkat tertentu akan selalu bersama

¹⁶⁷ Ibid.

kita. Namun, menurutnya kita tidak bisa berpangku tangan, melainkan harus berani untuk memulai memerangi suap demi masa depan yang lebih baik.¹⁶⁸

Di samping itu Aburizal mengatakan bahwa di antara para pengurus Kadin pun muncul skeptisisme, keraguan, keinginan ini akan bisa terlaksana. Namun, menurutnya, kalau tidak dimulai sekarang dan tidak diawali oleh kalangan dunia usaha, lalu siapa yang akan mulai menghentikan praktek suap-menyuap ini.¹⁶⁹

B. Nasionalisme

a. Keutuhan Wilayah dan Keadilan sosial

Dalam arti luas, menurut Aburizal Bakrie¹⁷⁰, nasionalisme harus didefinisikan sebagai upaya untuk menggapai keadilan sosial dan mempertahankan integritas negara; satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dengan itu, perlu adanya penyelesaian yang menyeluruh dan

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Kompas, Tajuk Rencana, 4/10/23.

¹⁷⁰ Lihat Visi Missi Aburizal Bakrie sebagai calon presiden Konvensi Nasional Partai Golkar 2004, dalam tiga pilar kebangsaan.

manusiawi terhadap berbagai konflik dan gerakan separatisme. Dengan itu, peningkatan kesadaran nasionalisme harus ditempatkan dalam prioritas pertama.

Penempatan nasionalisme pada prioritas pertama juga berlaku bagi deretan dari tiga pilar bangunan Indonesia. Aburizal memberikan alasan kenapa nasionalisme ditempatkan pada posisi pertama dari tiga pilar Indonesia merdeka (nasionalisme, demokrasi, dan pembangunan politik), yakni, sejauh ini Indonesia, seperti disinggung di atas, tampaknya mengalami jenis konflik sekaligus. Di beberapa daerah menguatnya semangat separatisme bersenjata mengingatkan kita pada pengalaman-pengalaman menyedihkan pada masa lalu.¹⁷¹

Di beberapa daerah lainnya telah kita saksikan bahwa maraknya semangat kesukuan dan fanatisme agama telah membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Semua ini, dengan caranya sendiri-sendiri, seolah membuktikan sinisme kaum orientalis Belanda di

¹⁷¹ Ibid.

akhir abad ke-19 bahwa Nusantara sesungguhnya tidaklah lebih dari sekedar gugusan kepulauan, sebuah kenyataan geografis yang berisi kelompok-kelompok manusia tanpa ikatan-ikatan yang sama dalam semangat, cara hidup dan cita-cita.¹⁷²

Untuk mengatasi hal itu, Aburizal menyarankan agar, meskipun untuk konteks partai politik pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, bahwa tidak ada alternatif lain kecuali kita semua mampu meyakinkan masyarakat yang tersebar dari Aceh sampai Papua, bahwa Indonesia adalah wadah kita bersama dimana segala keunikan yang bersifat partikular dalam daerah, suku, dan agama dapat hidup berdampingan dan berkembang sepenuhnya tanpa harus saling menyikut atau mematikan satu dan lainnya. Menurutnya, hanya dengan berakarnya keyakinan semacam itulah Indonesia dapat menjadi tanah air tempat bersemainya kemajuan dalam segala bidang.¹⁷³

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Sucipto Umar, Op Cit, hlm. 155.

b. Soal Pri-Nonpri: Urgensi Pembauran Etnis Cina di Indonesia

Wacana “pribumi dan non-pribumi”, baik dalam bidang politik maupun dalam ekonomi, kerap kali mencuat ke permukaan bumi Indonesia, baik pada era penjajahan, era kemerdekaan, era Orde Lama, maupun era Orde Baru. Hal itu, selain dikarenakan faktor akar historis, muncul-tenggelamnya wacana tersebut, juga sebagai konsekuensi logis dari keberagaman warga negara Indonesia.

Dalam konteks itu, menurut Aburizal, secara faktual, di Indonesia paling tidak dikenal tiga bentuk kemajemukan. *Pertama*, kemajemukan horizontal seperti suku, ras, agama, termasuk juga kelompok-kelompok etnis dengan bahasa dan adat-istiadat khas masing-masing. Boleh dikatakan, menurutnya, keragaman disini bersifar “given”, terhimpun dalam persekutuan-persekutuan kebudayaan lokal dan daerah,

sebagai warga bangsa dan masyarakat Indonesia dalam wadah negara kesatuan RI.¹⁷⁴

Kedua, keragaman vertikal yang biasa ditandai dengan katagori status sosial karena persepsi “darah”, tingkat pendidikan, hierarki kewenangan, penghasilan ataupun akumulasi kekayaan. Dan *ketiga*, keragaman yang lebih bersifat fungsional, seperti jenis-jenis pekerjaan, profesi keilmuan, orsospol, ormas, dan sebagainya. Karena itu, warga etnis yang sama masih mungkin memiliki keberbedaan, yakni unsur vertikal dan fungsional.¹⁷⁵

Diakui Aburizal bahwa disadari atau tidak, sumber-sumber keragaman baru dari ketiga katagori di atas justru semakin banyak. Barangkali itu termasuk bukti keberhasilan pembangunan nasional selama ini. Artinya, semakin berpengalaman kita membangun, semakin bermunculan pula pelaku-pelaku potensial baru, profesi-profesi baru, bahkan juga persekutuan-persekutuan baru atas dasar kesamaan atau proksimiti tertentu. Karena itu,

¹⁷⁴ Ibid, hlm. 336.

¹⁷⁵ Ibid.

ada benarnya pendapat yang menyatakan bahwa pluralitas sudah merupakan kelaziman kultural bangsa Indonesia.¹⁷⁶

Menurut Aburizal, hal itu tidak dapat dikontradiksikan dengan tatanan kesatuan dan persatuan negara. Bahkan, sejauh kaum nonpri tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku, hak hidup mereka harus dilindungi justru untuk menjamin peningkatan kualitas kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁷⁷ Berdasarkan itu Aburizal berkesimpulan bahwa baik etnis yang disebut pribumi maupun nonpribumi, sesungguhnya sama-sama memiliki potensi sentripetal atau pun potensi sentrifugal. Mereka bisa saja menjadi beban sosial dan nasional, tetapi juga bisa saling mendukung dan saling mengakses untuk kemajuan bersama.¹⁷⁸

Hal demikian menurut Aburizal telah menuntut bangsa ini segera dengan sukarela melepaskan pendikotomian pribumi dan nonpribumi, karena hal itu berpotensi

¹⁷⁶ Ibid, hlm. 336-337.

¹⁷⁷ Ibid, hlm. 337.

¹⁷⁸ Ibid.

menghambat terhadap segala laju pembangunan. Dengan melihat akar historis, Aburizal melihat, wacana pribumi-non pribumi tidak lebih dari warisan politik kolonialisme Belanda belaka. Menurutnya, pada masa pemerintahan kolonial, bangsa Indonesia didemarkasi antara WNI asli sebagai kelompok etnis pribumi, mayoritas dan pemilik tanah air dengan WNI keturunan—khususnya Cina sebagai etnis nonpribumi, minoritas, dan pendatang pencari lahan hidup.¹⁷⁹ Hal mana pemerintah kolonial lebih memberi angin kemudahan pundi ekonomi pada etnis keturunan Cina seraya menekan usaha ekonomi pribumi. Hal demikian tentunya secara psikologis memaksa pribumi mengambil jarak dengan etnis Cina itu sendiri dan menumbuhkan benih kebencian dan kecurigaan yang berkepanjangan.

Pola dikotomis pribumi-nonpribumi, khususnya keturunan etnis Cina, dalam pandangan Aburizal, boleh dikata terus mempengaruhi persepsi kedua belah pihak sampai pemberontakan G 30 S/PKI meletus.

¹⁷⁹ Ibid., hlm. 339.

Menurutnya banyak kalangan meyakini bahwa RRC termasuk “negara sahabat” yang paling berkepentingan dengan pemberontakan itu sehingga WNI keturunan Cina di Indonesia pun kembali ditempatkan pada posisi yang terpojok. Dari sinilah, menurutnya etnis Cina terpolarisasi. Sebagian memilih kembali ke RRC, sebagian semakin terpanggil menyatu lahir batin dengan rakyat dan bangsa Indonesia lewat pembauran; tapi ada pula yang bersikap ambivalen.¹⁸⁰

Dalam konteks negara demokrasi, bagi Aburizal demarkasi pri-nonpri dan segala dampak negatifnya harus segera diakhiri. Adapun langkah-langkah yang bisa segera diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menyingkirkan atau membuang segala sisa-sisa prasangka diantara keduanya. Dalam konteks sikap ambivalen, Ical mengingatkan bahwa barangkali ada benarnya, bagi perantauan—apapun latar belakang etnis dan rasnya—pepatah Romawi *Uni Bene Ibi Patria* yang dikutip Yap Thian Hien dalam uraiannya tentang pembauran di Indonesia.

¹⁸⁰ Ibid., hlm. 341.

Pepatah yang kurang lebih berarti “dimana hidupku, disanahlah tanah airku” itu secara implisit menggambarkan derajat kesetiaan warga negara perantauan.¹⁸¹

Kedua, dalam rangka mendukung upaya membuang prasangka, dibutuhkan penguatan dalam upaya pembauran. Pembauran ini harus diarahkan pada semua lahan, baik lahan pendidikan, lahan sosial-ekonomi, dan lahan politik. Masalahnya, menurut Aburizal Bakrie adalah terpulang pada komitmen, keterbukaan, kesungguhan, dan keikhlasan semua pihak untuk saling memberi dan menerima serta saling berkorban. Untuk itu, semua etnis, menurutnya harus berpola pikir positif dan dinamis sehingga selain bisa lebih jernih memandang keberadaan masing-masing, semua juga dapat mengoreksi kekeliruan pemaknaan keragaman.

Berkaitan dengan itu, Aburizal mempersyaratkan bahwa pembauran tidak sekedar menyaratkan kemampuan semua pihak bertenggang rasa, tetapi juga sebagai upaya

¹⁸¹ Ibid., hlm. 343.

pemanusiaan dan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, menurutnya, pembauran tidak terbatas sebagai gerakan pembangunan wawasan, melainkan sekaligus bagian pengembangan kualitas sumber daya manusia, masyarakat, dan istitusi-institusi—juga kualitas kebersamaan dalam mengelola aset nasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan cita-cita nasional.¹⁸²

C. Demokrasi

1. Pemerintah yang Berwibawa dan Keseimbangan Peran

Demokrasi dalam kacamata Aburizal ditempatkan sebagai pilar penting bagi penyelenggaraan bernegara yang bersih dan berwibawa. Dalam implementasinya, Aburizal Bakrie menyebutkan pentingnya terdapat keseimbangan peran: antara negara dengan masyarakat, antara legislatif dan eksekutif, antara

¹⁸² Ibid., hlm. 349.

sipil dan militer, dan antara pusat dan daerah.¹⁸³ Menurut Aburizal, hanya dengan melalui proses demokratisasi hal tersebut dapat tercapai. Demokrasi adalah gagasan berikutnya yang harus ditawarkan oleh partai kita (partai Golkar).

Dalam praktek lapangan, menurut Aburizal tidak sedikit orang, termasuk tokoh partai politik peserta Pemilu 2004, yang mengerti dengan baik hakekat demokrasi serta bagaimana sesungguhnya ia dihubungkan dengan praktek pemerintahan modern. Sehingga Aburizal memandang hal itu memberikan dampak negatif dari ketidakjelasan tersebut, salah satu dampak negatifnya disebutkan Aburizal bahwa sejak turunnya presiden Soeharto institusi pemerintahan cenderung melemah, tak mampu bersikap tegas manakala ketegasan dibutuhkan, tak berani bersikap konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan manakala

¹⁸³ Lihat Visi Missi Aburizal Bakrie sebagai calon presiden Konvensi Nasional Partai Golkar 2004, dalam tiga pilar kebangsaan.

konsistensi ini teramat diperlukan untuk mengangkat kembali wibawa pemerintah.¹⁸⁴

Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem pun, seperti konflik-konflik berdarah yang terjadi di Sampit, Poso, Maluku, pemerintah dalam beberapa waktu waktu tampak terperangah, tak sanggup menghentikan tindakan kekerasan, padahal hanya pemerintahlah yang saat itu sanggup melakukannya. Berkaitan dengan itu, mengutip James Madison salah satu pelopor pemikiran demokrasi, Aburizal menegaskan bahwa sebelum sistem demokrasi dapat dibangun, yang lebih dahulu harus ada adalah kemampuan pemerintah untuk mengontrol masyarakat (*A government must be able to control the governed before it is asked to control itself*).¹⁸⁵

Lebih lanjut, Aburizal menjelaskan bahwa tanpa ketegasan dan kewibawaan pemerintah, perasaan aman pada masyarakat tak mungkin terbangun. Dalam masyarakat yang resah, dalam situasi di mana orang per orang atau kelompok per kelompok dapat memegang hukum dalam

¹⁸⁴ Satria Wangsa, Op Cit., hlm 255.

¹⁸⁵ Ibid., hlm. 256.

tangannya sendiri, dimana satu pihak menjarah pihak lainnya tanpa hukuman samasekali, tanpa merasa takut terhadap aparat pemerintah dalam masyarakat seperti ini sistem demokrasi tak mungkin berjalan.¹⁸⁶

Namun demikian, untuk menepis anggapan publik bahwa dengan pandangan di atas Ical berkeinginan untuk kembali atau menghidupkan kembali masa Ore Baru, Aburizal menegaskan bahwa kita membutuhkan ketegaskan dan kewibawaan pemerintah, tidak berarti bahwa saat ini kita ingin kembali ke masa lalu, di mana pemerintah terkadang berada di atas hukum atau tidak jarang pula menjadi hukum itu sendiri. Justru kita ingin melihat ke masa depan. Sisten demokrasi harus dipertahankan. Namun kita menyadari bahwa praktek demokrasi dalam empat tahun terakhir mengandung sejumlah kelemahan.¹⁸⁷

Berkaitan dengan itu, Aburizal berpendapat bahwa solusi yang kita tawarkan bukanlah mengurangi atau mengebiri sistem ini, namun

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Ibid.

justru memperbaikinya. Karenanya, Aburizal mengingatkan bahwa seorang Sir Winston Churchill pernah berkata bahwa *democracy is not good system of goverment, except if you compare it to other systems*.¹⁸⁸

Dari situ, Aburizal sesungguhnya mengakui bahwa demokrasi memang bukan sistem yang ideal sepenuhnya, tetapi setidaknya di banyak negara ia sudah teruji oleh sejarah. Dengan susah payah sistem ini sekarang telah kita terapkan. Kita, menurut Ical, harus merasa terhormat bahwa setelah setengah abad merdeka, Indonesia kini sudah menjadi sebuah negeri demokratis. Bahwa banyak hal yang masih belum sempurna. Proses penyempurnaan itulah yang menjadi kita semua.¹⁸⁹

Dengan segala kekurangannya, Aburizal melihat bahwa di Indonesia demokratisasi di berbagai bidang kini tengah dilakukan dan tidak mungkin untuk dibalikan kembali (bersifat *irreversible*). Peran legislatif menjadi lebih kuat dan menjadi semakin kritis terhadap eksekutif.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Ibid.

Rakyat semakin memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berorganisasi. Kebebasan pers semakin tercipta dan opini semakin beragam. Melalui desentralisasi, peran daerah menjadi semakin penting dalam menentukan maju tidaknya daerah masing-masing.¹⁹⁰

Dalam konteks ini, Aburizal menyarankan bahwa kesemuanya ini harus kita jalani secara hati-hati dan terukur agar bangsa menjadi bangsa yang terhormat, semakin bermartabat dan berkeadilan. Kerangka kesatuan harus tetap terjaga tanpa memandulkan potensi dan keragaman lokal. Secara global, menurutnya, kita harus menjadi bangsa yang memiliki integritas dan karakter yang disegani. Warna ke-Indonesiaan harus tampil dalam mencerahkan bangsa-bangsa lain, terutama sesama negara berkembang.¹⁹¹

Dari berbagai paparan pemikiran politik Aburizal di atas, dapat disimak bahwa demokrasi

¹⁹⁰ Aburizal Bakrie, visi misi disampaikan oleh Aburizal Bakrie pada Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar 2004.

¹⁹¹ Ibid.

oleh Aburizal Bakrie ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dari suatu negara bangsa dengan berpegang teguh pada prinsip keseimbangan dan kewibawaan pemerintah sebagai piranti demokrasi itu sendiri.

2. Pengakuan Terhadap Perbedaan dan Keberagaman

Bahwa demokrasi bukan saja harus menghargai dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga harus mengakuinya sebagai hal yang wajar. Demokrasi tidak boleh menindas perbedaan, mengintimidasi kemajemukan dan melakukan penyeragaman secara paksa. Sementara demokrasi juga harus mengakui dan melindungi hak-hak minoritas. Meskipun demokrasi merupakan pemerintahan suara mayoritas, tetapi hak-hak minoritas tidak boleh dilanggar dan ditindas.¹⁹²

Berkaitan dengan itu, dari sisi yang agak berbeda, Aburizal memandang bahwa munculnya keberagaman dan perbedaan merupakan indikasi

¹⁹² Lihat Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi; Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004) hlm. 147.

keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, pluralitas atau keberagaman memang harus diterima sebagai salah satu kelaziman kultural bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan menyebutkan data hampir 400 suku bangsa yang menyatu sebagai bangsa Indonesia, Aburizal mengatakan bahwa keragaman tersebut pada dasarnya konstan, hal itu karena sifat keragaman yang horisontal dan *given*.¹⁹³

Untuk konteks kekinian, Aburizal melihat bahwa keragaman dan perbedaan yang terdapat pada masyarakat cenderung mengacu pada keterbukaan, dan lebih mengacu pada ukuran-ukuran yang lebih rasional¹⁹⁴. Pergeseran fenomena itu, menurutnya antara lain disebabkan oleh faktor pendidikan dan informasi yang kemudian memunculkan bentuk-bentuk keragaman baru yang sifatnya kualitatif, vertikal, dan fungsional, misalnya dalam menuntut hak-

¹⁹³ Aburizal Bakrie, Op Cit, hlm. 286.

¹⁹⁴ Untuk sebaliknya Ical melihat, keragaman masyarakat dulu cenderung lebih tertutup dan lebih involutif, dengan struktur yang sangat hierkis dan atas status sosial, yang umumnya mengacu pada persepsi perbedaan warna darah. Lihat, Ibid

hak sosial dan politik. Untuk itu, dalam pengamatan Aburizal bahwa sebagian masyarakat kini memilih artikulasi langsung. Bahkan pikiran-pikiran kritis dan kritik yang terbuka, sejauh sifatnya membangun, oleh pemerintahan telah dipersepsikan sebagai keharusan.¹⁹⁵

Menurut Aburizal, apa yang bisa dipelajari dari perubahan atau pun keragaman-keragaman baru tersebut ialah, bahwa sistem sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat kita ternyata umumnya cukup terbuka. Barangkali juga dapat dikatakan cukup sensitif pada perubahan dan dinamika.¹⁹⁶ Karena itu, menurutnya dalam transformasi tatanan masyarakat agraris-tradisional ke tatanan masyarakat industri maju dan mandiri, yang diperlukan menurutnya adalah katalisator yang kreatif, dialogis, dan peka pada dorongan-dorongan yang ada secara intrinsik dalam nilai-nilai budaya masyarakat tersebut.¹⁹⁷ Hal itu, barangkali berlaku pula bagi proses transformasi dari sistem otoriterian ke tatanan demokrasi,

¹⁹⁵ Lalu Mara, Op Cit, hlm. 287.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid.

yakni dibutuhkan katalisator yang lebih dialogis dan transparan.

Untuk menguatkan potensi signifikan di atas, masyarakat harus lebih disiapkan dan perlu dididik mengenai bahwa eksklusivisme dan individualisme bukanlah bagian dari tata nilai bangsa kita untuk menghargai perbedaan. Tetapi, perbedaan dan keragaman-keragaman itu sendiri harus dibuktikan sebagai basis kesatuan dan persatuan. Paham kebangsaan kita adalah integralistik, yang disimbolkan lewat Bhineka Tunggal Ika.¹⁹⁸

Oleh karena itu, tambahannya, dalam mengelola perubahan dan keragaman masyarakat kita yang perlu dipertajam bukanlah budaya resistensi nilai-nilai sosial dan kulturalnya, melainkan kemampuan seleksi nilai yang mendukung serta kemampuan memahami dan menghargai perbedaan. Itu berarti, diperlukan lebih banyak lagi dialog-dialog kultural yang konstruktif, sehingga segmen-segmen kultural

¹⁹⁸ Ibid, hlm. 288.

masyarakat menjadi terbuka dan semakin luas wawasannya.¹⁹⁹

3. Demokrasi Ekonomi yang Produktif

Pada tahun 1998, ketika menjadi nara sumber pada munas V Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Aburizal mengatakan bahwa tahun-tahun mendatang, para pelaku utama ekonomi di Indonesia akan mengalami tekanan yang makin kuat mengenai penegakan demokrasi ekonomi--yang kini muncul sepaket dengan demokrasi politik dan demokrasi sosial. Ketiga tekanan tersebut amat solid, karena secara nasional semuanya telah langsung saling mempengaruhi, positif maupun negatif.²⁰⁰

Menurut Aburizal, dengan tingkat “kemajuan” masyarakat kita sekarang menghendaki tiga-tiganya sekaligus sebagai panglima. Belum dapat dipastikan apakah hal itu hanya mereflesikan daya kritis masyarakat atau refleksi semangat reformasi menyeluruh--sebagai

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Lalu Mara, Op Cit, hlm. 321.

substansi dari suatu paradigma sosial baru yang sedang mengemuka atau refleksi kedua-duanya.²⁰¹

Berkenaan dengan itu, Aburizal berpendapat bahwa apa yang dikemukakan di atas adalah merupakan logika zaman yang membersit lewat pembuluh-pembuluh aspirasi di semua komponen masyarakat kita, yang bersentuhan dengan konsekuensi globalisasi dan interpedensi. Namun demikian, menurutnya, menyangkut topik dalam tulisan ini, amatlah jelas bahwa salah satu faktor yang paling menentukan semakin tingginya derajat atau kualitas demokrasi ekonomi, ialah makin meluasnya cakupan dan jangkauan redistribusi sumber-sumber daya ekonomi itu sendiri.²⁰²

Sasarannya, menurut Aburizal sebagaimana dapat dipelajari dari semangat atau tuntutan reformasi menyeluruh, bukan lagi sekedar tampilnya struktur ekonomi dan struktur dunia usaha yang seimbang. Juga tidak terbatas hanya pada diraihnya kembali--untuk kemudian menjaga *sustainabilitasnya*--momentum

²⁰¹ Ibid.

²⁰² Ibid.

pertumbuhan, terciptanya peluang dan kesempatan kerja baru, atau bahkan makin tingginya standar kehidupan (*living standards*) dan pendapatan per kapita secara nasional.²⁰³

Tetapi, lebih dari aspek-aspek kuantitatif seperti dikemukakan di atas, Aburizal berpendapat bahwa demokrasi ekonomi--khususnya komponen redistribusinya--akan sekaligus diuji lewat konkritisasi target-target strategis kualitatif komitmen reformasi di bidang ekonomi itu sendiri.

Demokrasi ekonomi dalam pandangan Aburizal sangat menuntut terjaminnya hak-hak setiap dan seluruh warga negara untuk berkreasi, berinisiatif, dan berpartisipasi semaksimal mungkin (*full participation*) dalam kehidupan dan atau pembangunan ekonomi kita sebagai bangsa. Adapun substansi dari demokrasi ekonomi adalah *pertama*, peningkatan kualitas kehidupan (*quality of life*). *Kedua*, persamaan hak-hak (*equality*) ekonomi setiap orang. *Ketiga*, partisipasi

²⁰³ Ibid.

semaksimal mungkin (*full participation*). Dan keempat, keseimbangan kebijakan.²⁰⁴

Untuk substansi yang disebutkan keempat, yakni keseimbangan-keseimbangan, menurut Aburizal adalah sesuatu yang mendasar bagi agenda pemberdayaan ekonomi rakyat di satu sisi, dan pada sisi lain mendasari pemerataan kesempatan dan peluang usaha, disertai dengan penanggulangan kendala-kendala bagi terwujudnya partisipasi optimal tersebut.²⁰⁵

Keseimbangan dalam konteks politik ekonomi, dicontohkan oleh Aburizal adalah bagaimana praktek redistribusi sumber daya ekonomi dilakukan dengan menjunjung tinggi persamaan hak. Berkaitan dengan itu Aburizal lebih jauh menjelaskan:

Makin tinggi mutu pelayanan dan perlakuan ekonomi dan perlakuan ekonomi kepada seluruh rakyat--tentunya juga kepada *counterparts* perekonomian kita di dunia internasional--bagi saya tidak hanya berkorelasi positif dengan legitimasi dan kredibilitas

²⁰⁴ Ibid, hlm. 322.

²⁰⁵ Ibid.

pemerintah. Pelayanan dan perlakuan tersebut adalah juga bagian dari substansi target strategis-kualitatif. Itu berarti, baik asumsi keistimewaan maupun *pressure* psikologis dan sosial yang melahirkan apa yang disebut silent discrimination dalam manajemen sistem perekonomian nasional di tingkat makro dan mikro, sudah harus dibuang jauh.²⁰⁶

Dengan mencontohkan praktek redistribusi sumber-sumber daya ekonomi, sebagaimana disampaikan di atas, Aburizal menekankan secara tegas bahwa perbedaan faktor-faktor *given* seperti latar belakang SARA, sama sekali tak dapat dipakai sebagai rujukan. Menurutnya, kepahitan sejarah tidak boleh merancukan tata pikir kita sebagai bangsa, baik dalam upaya menanggulangi problem-problem sosial ekonomi hari ini maupun dalam merumuskan dan menggerakkan strategi menghadapi tantangan era perdagangan bebas.²⁰⁷

Untuk tidak mengulangi kepahitan sejarah seperti di atas, Aburizal berpendapat bahwa dari sudut dunia usaha, tidak ada cara lain kecuali

²⁰⁶ Ibid, hlm. 323.

²⁰⁷ Ibid.

bagaimana “demokrasi ekonomi yang produktif” senantiasa tetap menjadi acuan utama bagi segala praktek redistribusi sumber-sumber daya ekonomi. Menurutny, tidak perlu ada lagi *ultimate authority* maupun hak istimewa yang mendistorsi sistem ekonomi dan pasar. Itu berarti, menurut Aburizal, baik pemerintah (dengan fungsi regulasi dan perumusan kebijakan ekonomi), dunia usaha (dengan fungsi bisnis dan fungsi sosial sekaligus), maupun LSAM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (yang umumnya menyandang fungsi artikulasi dan penjaga kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat banyak) harus saling menghormati.²⁰⁸

Lebih dalam lagi Aburizal melihat bahwa demokrasi ekonomi menawarkan kepada kita bagaimana paradigma pembangunan ekonomi yang sesuai dengan realitas masyarakat. Demokrasi ekonomi tersebut menuntut adanya pembanguna ekonomi yang berorientasi pada

²⁰⁸ Ibid., hlm. 324.

fungsi dan performa ketimbang berorientasi pertumbuhan (*growth*) atau *size* semata.²⁰⁹

Pentingnya demokrasi ekonomi diterapkan di tengah pembangunan bangsa, Aburizal menyebutkan bahwa dirinya sepakat dengan pendekatan adaptasi komplementer atau *co-evolution*, demikian juga pendekatan *corresponding responsibilities* yang ditawarkan masing-masing oleh James F. Moore (*co-evolution*) dalam bukunya *Death of Competition* (1996), dan Noordin Sopiee (*corresponding responsibilities*) dalam bukunya *Toward A New Asia* (1994).²¹⁰ Ical memaparkan bahwa Sopiee lebih menekankan adanya perlakuan politik ekonomi yang pragmatis. Dalam arti, menurut Ical adalah mengedepankan apa yang benar-benar dapat memaksimalkan aktualisasi potensi-potensi ekonomi rakyat, tetapi tidak perlu menimbulkan problem-problem sosial baru.²¹¹

Dalam konteks gambaran paling mikro dari produktivitas demokrasi ekonomi, menurut

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid., hlm. 325.

²¹¹ Ibid.

Aburizal adalah redistribusi pendapatan. Menurutnya, redistribusi pendapatan adalah komponen paling krusial dari redistribusi sumber daya ekonomi. Karenanya, Aburizal melihat, di level negara, cetak biru (*blue print*) pemberdayaan (dengan asumsi telah memiliki legitimasi), harus terefleksi pada APBN, pada kebijakan fiskal dan moneter, yang semuanya memang dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan demokrasi ekonomi yang produktif.²¹²

²¹² Ibid., hlm. 326.

BAB 4
IMPLIKASI PEMIKIRAN NASIONALISME-
DEMOKRASI TERHADAP PETA PEMIKIRAN
POLITIK DI INDONESIA

Setelah penulis menggambarkan mengenai objek material dan objek forma pada bab dua, maka pada bab ketiga ini penulis menyajikan pembahasan berupa analisis terhadap temuan objek di bab sebelumnya diakutkan dengan implikasinya pada peta pemikiran politik di Indonesia. Berikut di bawah ini pembahasan dimaksud.

**A. Implikasi Normatif-Sebagai Developmentalis
Progresif**

Dalam studi tentang pemikiran dan aksi politik Aburizal Bakrie sebagai kepanjangan

tangan partisipasi politik pengusaha Indonesia, tampaknya harus juga dilacak pada dua macam pemahaman, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dua macam pemahaman itu, dapat digunakan untuk menelusuri implikasi dari pemikiran dan aksi politik Aburizal Bakrie. Pemahaman normatif difokuskan pada pemikiran yang cenderung memiliki implikasi normatif, sementara pemahaman empirik akan difokuskan untuk menganalisis aksi-aksi politik yang cenderung berimplikasi empirik.²¹³

Pemahaman normatif mengajarkan tentang nilai-nilai ideal dari pemikiran politik, misalnya “keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan pemahaman empirik adalah rumusan pemikiran politik yang dimanifestasikan dalam aksi-aksi politik dengan sejumlah indikator atau

²¹³ Dua cara pemahaman di atas, digunakan oleh Afan Gaffar saat melakukan studi tentang demokrasi. Dua cara pemahaman itu dipinjam oleh Anas Urbaningrum untuk mengerjakan studi mengenai pemikiran demokrasi Nurcholis Madjid. Lihat Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 159. Lihat juga, Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3-10.

kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu, teori normatif berkenaan dengan resep apa yang seharusnya, misalkan, pemikiran tentang nasionalisme. Di sini nasionalisme sebagai tujuan, yakni bagaimana nasionalisme itu seharusnya. Atau pemikiran politik tentang demokrasi. Disini demokrasi ditempatkan sebagai tujuan, yakni, bagaimana demokrasi itu seharusnya. Begitupula dengan pemikiran tentang pembangunan ekonomi kerakyatan. Sedangkan teori empirik berkenaan dengan sistem politik atau pun realitas politik yang ada.

Sesuai dengan studi pada bagian ini, pemahaman normatif akan menjadi fokus, sementara konteks pemahaman empirik akan mendapatkan penjelasan lebih jauh pada bagian yang membahas nasionalisme demokratis Aburizal, implikasi empirik dan peta baru politisi pengusaha Indonesia.

Tidaklah mudah untuk mengetahui bagaimana implikasi normatif dari pemikiran politik Aburizal Bakrie terhadap wacana kebangsaan Indonesia melalui nasionalisme dan demokrasi, termasuk pembangunan ekonomi.

Namun demikian, hal itu tetap saja bisa dilacak setidaknya dilihat dari respons publik dan pemberitaan media massa.

Aburizal melihat bahwa pilar penting dari kebangsaan Indonesia adalah nasionalisme, demokrasi dan pembangunan ekonomi. Tiga pilar inilah yang selalu dikumandangkan oleh Aburizal dalam setiap kegiatan politiknya, termasuk pada kegiatan politik konvensi nasional partai Golkar. Ketiga pilar itulah yang ditawarkan Aburizal andaikan dirinya terpilih menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Sesungguhnya tema-tema pemikiran politik tersebut merupakan kompilasi dari berbagai pemikiran politik Aburizal semenjak aktif di organisasi profesi juga di organisasi politik Golkar. Sehingga implikasi dari tema-tema pemikiran politik masing-masing kadarnya sangat berbeda-beda.

Wacana dari tema nasionalisme yang sering diungkapkan Aburizal dalam berbagai kesempatan ceramah maupun tulisan-tulisannya terutama pada saat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, yang memiliki implikasi cukup luas adalah wacana hubungan pribumi dan non pribumi pada

awal tahun 1980-an sampai pada medio tahun 1990-an. Pemikiran Aburizal tentang hubungan antara pri dan non pri tersebut sangat dinamis dan kontekstual atau bahkan terkesan tidak konsisten. Untuk pertama, misalnya Aburizal mempermasalahkan hubungan pri dan non pri dengan menunjukkan keberpihakannya terhadap kalangan pengusaha pribumi, namun di kesempatan berikutnya, Aburizal memandang sebenarnya tidak ada masalah hubungan pri dan non pri. Untuk yang kedua, misalnya Aburizal pernah “mengolah” wacana pri dan non pri itu menjadi issue guna memperoleh posisi menteri tertentu.

Meskipun bukan satu-satunya orang yang mempopulerkan atau mendorong wacana yang berdimensi etnis tersebut, namun gagasan Aburizal Bakrie setidaknya telah memberi warna tersendiri dan menimbulkan resonansi luas dengan mendapatkan perhatian yang beragam, baik dari kalangan pengusaha itu sendiri, politisi, maupun media massa.

Dari kalangan pengusaha misalnya wacana pri-nonpri mendapat perhatian yang luar biasa

dan memunculkan dinamisasi wacana yang cukup panjang. Hal itu setidaknya ditunjukkan dalam dinamika pengusaha-pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi profesi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang pada tahun 1977-1979 Aburizal Bakrie sendiri pernah dipercaya menjadi Ketua Umum-nya.²¹⁴

Posisi Ketua Umum HIPMI yang pernah dijabat Aburizal Bakrie tersebut, begitu juga dalam lingkup yang lebih besar, sebelum terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia, harus diakui langsung atau tidak langsung ikut membantu dalam memperluas implikasi dari pandangannya mengenai hubungan antara pribumi dan non-pribumi yang bermasalah karena tidak ada keseimbangan. Pada konteks itu, kalangan pengusaha non pribumi memiliki posisi ekonomi yang kuat dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah Soeharto. Sementara itu, posisi

²¹⁴ Organisasi profesi HIPMI didirikan Aburizal bersama Abdul Latief. Pada tahun 1973-1975, Ical ditunjuk sebagai Wakil Ketua Departemen Perdagangan HIPMI, berikutnya tahun 1975-1976, duduk sebagai Ketua. Setahun kemudian Ical terpilih dan dipercaya sebagai Ketua Umum HIPMI untuk periode 1977-1979. Lihat, Bambang Soesatyo, Op Cit, hlm. 196.

ekonomi kalangan pribumi sangat lemah dan tertekan. Disebutkan bahwa salah satu perhatian pemerintah yang timpang dan menjadi pemicu tidak mesranya hubungan pri dan non pri adalah soal pembagian fasilitas kredit.²¹⁵

Dengan asumsi dan persoalan itulah hubungan ekonomi pribumi dan non-pribumi, menurut Ical harus dibenahi dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan (baik sebagai regulator maupun administrator), dalam pandangan Aburizal dalam hal itu harus berfihak kepada pengusaha pribumi yang tengah dalam posisi lemah sebagai stimulus untuk mencapai keseimbangan dalam persaingan.

Wacana pri-nonpri tersebut, di awal tahun 1990-an misalnya kian menyeruak dalam diskusi nasional yang diselenggarakan HIPMI di Ciloto

²¹⁵ Ketimpangan pemberian fasilitas kredit tersebut di atas, misalnya berdasarkan laporan Bank Indonesia, dari Rp 135,412 triliun kredit yang disalurkan per Juni 1993, 76 persennya masuk ke kantong konglomerat, jadi tidak heran jika pengusaha-pengusaha non pri ini mampu menimbun kekayaan hingga Rp 70 triliun. Sementara, pengusaha pribumi lainnya yang berjumlah ribuan itu terseok-seok akhirnya gulung tikar akibat sulitnya memperoleh kredit. Ibid, hlm. 124.

tahun 1991. Persoalan hubungan antar etnis pri dan non pri tersebut mampu menggeser tema utama dari diskusi nasional HIPMI yang menyoroti pada permasalahan hubungan pengusaha besar (konglomerat) dan menengah dengan yang kecil. Hal itu membuktikan bahwa masalah pri dan non pri itu terus meluas dan ada.

Dalam katagori Bambang Soesatyo, sesungguhnya yang membedakan antara kalangan yang menyuarakan dan tidak menyuarakan hubungan pri dan non pri adalah sudah atau belumnya mereka melakukan kemitraan usaha dengan kalangan pengusaha non pri. Menurutny, mereka yang menyuarakan hubungan negataif pri dan non pri umumnya belum memiliki pengalaman menjalin kemitraan dengan kalangan pengusaha non pri, sementara yang banyak terdiam dalam melihat permasalahan adalah mereka yang sudah melakukan hubungan bisnis dengan kalangan pengusaha non pri.²¹⁶ Misalnya yang disebutkan terakhir adalah Kodel (Fahmi Idris) atau Ariobimo (Cicip S. Sutardjo).

²¹⁶ Ibid., hlm. 122.

Kedua mantan pengurus dan dan ketua umum HIPMI tersebut di atas, sudah lama menjalin kerjasama dengan Salim Group dalam dua bidang, yakni, pertama, produksi obat nyamuk bermerek Baygon di Cileungsi, Jawa Barat. Dalam usaha pataungan itu, Kodel, Ariobimo dan Salim memegang 51% saham yang dibagi rata di antara mereka. Sedangkan sisanya 49% dimiliki Bayer selaku pemegang hak atas merek Baygon. Dan kedua, kerjasama dalam industri kimia, sodium tripoli fosfat di Gresik, Jawa Timur. Mereka-mereka yang sudah punya pengalaman inilah yang bisa meletakkan persoalan dengan enak. Dicontohkan berberapa argumen, diantaranya disebutkan bahwa dalam menjalin hubungan bisnis dengan kаланagn non-pri, harus bisa dengan tegas membedakan bahwa mereka melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis. Jangan sampai hubungan bisnis itu terlalu diwarnai dengan dimensi politik.²¹⁷

Tampak jelas jika menggunakan katagori Bambang di atas bahwa pemikiran pri dan non pri

²¹⁷ Ibid., hlm. 123.

Aburizal Bakrie selain berdasarkan dari pemikiran nasioalisme, juga dimungkinkan besar karena selam itu, Aburizal tidak memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan kelompok pengusaha non pribumi. Jika saja Aburizal sudah memiliki pengalaman dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha non-pri, seperti yang dilakukan Fahmi Idris dan Cicip Sutardjo, Aburizal akan senantiasa melihat bahwa tidak ada permasalahan hubungan antara pri dan non pri. Bertolak dari itu, tampak ada ketidak konsistenan pemikiran nasionalisme yang diusung oleh Aburizal terhadap tema hubungan pri dan non pri dalam dunia ekonomi bisnis. Hal itu tentunya bila merujuk pada pendapat Bambang, wacana pri dan non pri yang dimunculkan Aburizal lebih berimensikan politik.

Dimensi politik ini, misalnya, ditunjukkan juga oleh Aburizal ketika kembali mengangkat wacana pri dan non pri menjelang dan pasca Pemilu 1997. Wacana pri dan non pri itu oleh Aburizal dijadikan isue utama guna merebut perhatian kelompok Habibie (ICMI dan CIDES) yang dipastikan akan menjadi wakil presiden RI.

Isue tersebut diharapkan Aburizal untuk mempermudah jalan menuju menteri pada Kabinet Pembangunan VII. Namun realitas politik menunjukkan hal lain, dimana Aburizal tidak masuk dan hanya sampai pada bursa calon saja.

Ketidak konsistenan dalam masalah wacana pri dan non pri, tiga tahun sebelum manuver politik untuk meraih posisi menteri dengan isue tersebut, ditunjukkan Aburizal ketika memberikan ceramah pada sebuah seminar (15 Agustus 1994). Pada momentum tersebut Ical terkesan mengoreksi pandangannya sendiri yang melihat bahwasanya terdapat permasalahan akut yang menimpa hubungan antara pri dan non pri. Pada tahun tersebut, inti pandangan Aburizal yang dikemukakan adalah sudah saatnya bahwa bangsa ini tidak perlu lagi mengutik-ngutik hubungan pri dan non pri atau terjebak pada upaya pendikotomian terhadap keduanya. Pertanyaannya kemudian kenapa Aburizal berpikiran untuk menghapus pendikotomian anatar pri dan non pri, yang sebelumnya Aburizal justru kerap kali mempersoalkan hubungan tersebut? apakah ini bentuk dari ketidak

konsistenan pemikiran Aburizal ataukah ada argumen politik lain yang membuat Aburizal berpenadad beda?

Berhubungan dengan pertanyaan itu, Lalu Mara, sebagai juru bicaranya Aburizal, buru-buru menjelaskan bahwa hal itu jangan dilihat secara tekstual, namun harus dilihat dari sisi konteksnya. Lebih lanjut Lalu Mara mengemukakan bahwa untuk pandangan yang pertama dari Aburizal yang mempersoalkan hubungan pri dan non pri, lebih dilihat dari konteks bagaimana mengangkat nasib pengusaha yang saat itu sangat lemah dan dilemahkan. Sementara pada tahun dimana Aburizal Bakrie mengumandangkan tidak perlunya pendikotomian pri dan non pri, konteksnya adalah para pengusaha Indonesia saat itu sedang bangkit dan hampir mendapat perlakuan sama dari pemerintah, termasuk dalam pembagian fasilitas kredit. Selain dorongan itu, menurut Lalu Mara, Aburizal sangat tertarik terhadap pelaksanaan bisnis yang dilandaskan demokrasi ekonomi.²¹⁸

²¹⁸ Wawancara di Wisma Bakrie Lt. 4, Jakarta, 13/12/2004.

Berakitan dengan itu, yang harus menjadi catatan disini, misalnya Bambang Soestayo berkomentar bahwa pandangan itu adalah bagian dari orang-orang yang berupaya menutup-nutupi permasalahan yang sebenarnya mengenai hubungan antara etnis pri damn non pri. Bahkan Bambang mengatak bahwa pemikiran untuk tidak kembali mendikotomikan pri dan non pri adalah gerakan untuk menghapuskan kosakata nonpri. Bambang melihat, pandangan-pandangan semacam itu sangat sulit dilakukan, karena hal itu sudah merupakan realitas sosial.²¹⁹

Hal lain yang dikembangkan dan kemudian menjadi wacana yang cukup dominan adalah tentang Pakta Anti Suap. Sebagaiman digambarkan di awal bahwa gagasan Pakta Anti Suap yang dikumandangkan dan dikembangkan Aburizal Bakrie adalah elaborasi dari gerakan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang didasari oleh pemikiran pembangunan ekonomi yang bersih, transparan, profesional, dan bertanggung jawab

²¹⁹ Soesatyo, Op Cit, 122.

(akuntabilitas). Dalam kaitan dengan Pakta Anti Suap ini, salah satunya adalah Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS) 2003-2004 dan Gerakan Nasional Anti Suap 2005-2015. Kampanye atau Gerakan Nasional Anti Suap menjadi agenda penting dari gagasan Aburizal Bakrie karena banyak fakta yang memberikan gambaran menyedihkan tentang praktek-praktek suap yang dilakukan kalangan pengusaha. Padahal maraknya praktek suap menjadi ironi besar karena berlangsung di era gerakan Reformasi di semua lini kehidupan berbangsa dan negara, termasuk lini dunia usaha.

Wacana atau pakta yang dikembangkan Aburizal Bakrie untuk membasmi praktek suap di dunia usaha, bukan saja relevan dengan kebutuhan untuk mengurangi praktek korupsi pada era Reformasi, tetapi juga relevan dengan karakter pengusaha sebagai kelas menengah sebagai penyangga bagi kekokohan nasionalisme dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dengan berani Aburizal menyerukan bahwa saatnya telah tiba bagi kalangan dunia usaha untuk menggunakan potensi (semangat pembaharuan dan

keadilan) sebesar-besarnya guna menolak godaan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kita harus berlaku jujur pada sejarah serta pada diri sendiri dan mulai menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus kompak menyatakan bahwa praktek suap dalam segala bentuknya di negara ini harus segera diakhiri karena: tidak sesuai dengan etika usaha; memporakporandakan tatanan ekonomi dan tatanan bisnis yang sehat; merusak moral serta merendahkan harkat dan martabat bangsa; dan menyengsarakan rakyat.²²⁰

Sampai sejauh ini, gagasan Pakta Anti Suap, Kampanye Nasional Anti Suap, dan Gerakan Nasional Anti Suap telah memposisikan isu-isu tersebut tidak lagi menjadi isu yang aneh, tetapi sudah menjadi arus besar (*mainstream*) dalam wacana perang terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia.²²¹ Ini dapat

²²⁰ Aburizal Bakrie, *Membangkitkan Kembali Semangat Membangun Bangsa*, dalam Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia (Jakarta: Kadin Indonesia, 2003), hlm. 2-3.

²²¹ Apalagi saat ini Aburizal tengah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian yang memiliki otoritas untuk membenahi dunia usaha yang dianggap penuh dengan praktek suap. Selain itu, dengan posisi politik demikian, Aburizal dapat lebih memperkuat kampanye dan gerakan anti suap tersebut.

dilihat misalnya dari berbagai gerakan internal perusahaan dan asosiasi yang merumuskan etika usahanya dan mengeluarkan pernyataan sikap dukungan terhadap Pakta Anti Suap. Misalnya bisa disebutkan disini adalah Pakta Anti Suap yang dipernyatakan oleh PT. INPORMA ENGINEERING yang ditandatangani oleh Dr. Ing. Ilhamy Elias dalam Piagam Pakta Anti Suap.²²² Begitu pula dilakukan oleh GAPENSI, PT. RATELINDO, ASPERINDO, DE MONO, EXPRES ACROSS NATIONS dan lain sebagainya.

Perhatian serupa ditunjukkan oleh berbagai tokoh agama dan media massa, misalnya diamna, KH. Abdullah Gymnastiar (Pimpinan Pesantren Daruttauhid Bandung) menyatakan dukungannya terhadap Pakta Anti Suap yang dikumandangkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Aa Gym—demikian biasa Abdullah Gymnastiar dipanggil—mengingatkan bahwa percayalah, menyuap dan disuap termasuk

²²² Piagam Pakta Anti Suap ini, dianjurkan untuk digantung di dinding ruang kerja, atau diletakan berdiri pada meja kerja. Memang bagi pengusaha yang mendukung untuk tidak melakukan praktek suap dakan diberikan Piagam Pakta Anti Suap.

perbuatan terkutuk yang diharamkan. Walaupun mendapatkan kemudahan, tidaklah kita mendapatkan keberkahan. Menyuap adalah meracuni keluarga yang kita suap. Karena itu ingatlah mendapatkan suap, berarti memakan racun, kita berikan harta suap kepada keluarga kita, berarti, kita juga membinasakan keluarga dan keturunan kita.²²³

Lepas, dari petuah Aa Gym di atas, ternyata masih banyak keraguan media dan publik yang muncul. Sejauh ini yang menjadi keraguan atau pertanyaannya adalah mungkinkah gerakan di atas dapat terwujud dengan praktek suap yang sudah membudaya? Keraguan semacam itu bukan tanpa sebab. Hal itu banyak dikarenakan publik sulit menemukan jawaban dari pertanyaan apakah diantara deklarator, termasuk Aburizal sendiri, gerakan tersebut sendiri sudah bersih dari praktek suap-menyuap. Kaitannya dengan itu misalnya, Kompas menurunkan tajuk rencananya (4/10/2003) dengan judul “Kadin Memerangi Suap, Mungkinkah?”

²²³ Abdullah Gymnastiar, *Pesan Moral Aa Gym*, (Jakarta: Kadin Indonesia, 2003), hlm. 23.

Dikatakan dalam tajuk rencana tersebut bahwa meski dicanangkan dengan serius, keseriusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia wajar dipertanyakan. Sebab, keadaan di Indonesia sudah sedemikian rupa sehingga orang awam tidak lagi percaya korupsi, manipulasi, pemerasan, suap, dan hal-hal yang semacam itu bisa diberantas. Bahkan dikurangi pun tidak bisa.²²⁴

Sekalipun sudah berada dalam era reformasi dan demokratisasi, Presiden Megawati dan pemerintahannya (termasuk polisi, tentara, jaksa) tidak bisa memberantas semua praktik curang itu. Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman dan HAM juga tidak. Partai-partai tidak akan bisa, dunia usaha tidak akan bisa, apalagi rakyat biasa.²²⁵

Menurut Kompas, sekarang Kadin Indonesia berinisiatif akan memerangi suap, dimulai dari diri sendiri, dimulai dengan ikrar. Memang tidak bisa disangkal dalam urusan suap-

²²⁴ Kompas, *Kadin Memerangi Suap, Mungkinkah?*, Tajuk Rencana, 4/10/2003.

²²⁵ Ibid.

menyuap ini dunia usaha terlibat di dalamnya dan kini mereka mau menghentikannya. Kita segera bertanya, apa bisa? Dengan kondisi yang begitu parah, bisa diduga ikrar para pengusaha di lingkungan Kadin Indonesia untuk menghentikan suap, dimulai dari diri sendiri, merupakan tindakan yang sulit dilaksanakan.²²⁶

Alasan *pertama*, di AS dan di negara-negara maju lainnya, rakyatlah (termasuk dunia usaha) yang menentukan siapa pemerintah yang bakal memerintah mereka pada setiap kali pemilihan umum. Akan tetapi, di negara-negara berkembang, ada fakta bahwa pemerintah amat berkuasa. Kedudukan dunia usaha (sekalipun merupakan bagian dari rakyat pemilih) berada "di bawah" kedudukan pemerintah. Nasib mereka, bisnis mereka, dan keberhasilan mereka amat ditentukan oleh pemerintah (lewat perizinan, pemeriksaan, dan macam-macam persyaratan).²²⁷ Undang-undang dan peraturan membuat mereka ada "di bawah" kedudukan pemerintah. Untuk bisa bekerja, bahkan untuk bisa hidup, dunia

²²⁶ Ibid.

²²⁷ Ibid.

usaha harus "baik" kepada pemerintah. Harus membagi rezeki mereka dengan aparat pemerintah dan tidak sekadar memenuhi kewajiban membayar pajak. Kedudukan dunia usaha yang ada "di bawah" pemerintah membuat mereka bisa dipaksa menyuap dan diperas. Menjadi pertanyaan, apakah suap-menyuap bisa dihentikan atau paling tidak dikurangi kalau kedudukan dunia usaha masih terus "di bawah" kedudukan pemerintah.

Dan *kedua*, Kadin Indonesia resminya mencakup seluruh dunia usaha Indonesia. Tetapi kenyataan tidak demikian. Banyak sekali pengusaha yang merasa tidak ada kaitan dengan Kadin, yaitu para pengusaha yang pada umumnya tanpa wajah (*faceless*), tetapi kegiatan sehari-hari mereka menentukan jalan dan kelancaran ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, bisa saja ada sejumlah pengusaha yang berhenti menyuap, tetapi ada pengusaha lain yang dengan senang hati menyuap aparat birokrasi atau aparat keamanan, demi

memenangi persaingan bisnis dalam mekanisme ekonomi pasar yang tidak kenal ampun ini.²²⁸

Sudah terlalu lama dalam bisnis di Indonesia berlaku prinsip “cincay”, di mana dunia usaha berbagi rezeki dengan aparat birokrasi agar sama-sama bisa hidup damai dan sejahtera. Selama prinsip ini masih dianut, usaha memerangi suap tidak akan berhasil. Terlebih kalau mengingat ucapan pengusaha dan mantan menteri Tanri Abeng tentang kewiraswastaan pada tahun 1980-an. Wiraswasta, katanya, harus bisa survive dalam keadaan apa pun. Termasuk di tengah kecamuk perang atau di negara yang luar biasa korupnya. Itulah yang terjadi di Indonesia, salah satu negara yang paling korup di dunia. Rakyat menanggung beban ekonomi biaya tinggi, tetapi dunia usaha tetap survive dalam ekonomi Indonesia yang berbiaya tinggi itu. Pertanyaannya, kalau dunia usaha tetap survive dalam negara yang sangat korup, apakah mereka bisa

²²⁸ Ibid.

menghentikan prinsip cincay, dengan cara menyuap.²²⁹

Namun demikian dalam hal itu Kompas terlebih dahulu melihat bahwa kehendak baik Kadin Indonesia untuk memerangi suap harus kita sambut dengan sikap positif. Namun, agar bisa terlaksana, dibutuhkan kerja yang sangat keras. Seperti dikatakan sendiri oleh Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie, di antara para pengurus Kadin pun muncul skeptisisme, keraguan, keinginan ini akan bisa terlaksana. Namun, kalau tidak dimulai sekarang dan tidak diawali oleh kalangan dunia usaha, lalu siapa yang akan mulai menghentikan praktik suap-menyuap ini.²³⁰

Di ujung tulisan tajuk rencananya Kompas memberikan pendapat bahwa upaya ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Tanpa tindakan yang paralel dengan usaha menghentikan suap-menyuap oleh kekuasaan Presiden dan pemerintahan, serta aparat birokrasinya, baik itu

²²⁹ Ibid.

²³⁰ Ibid.

polisi, tentara, jaksa, maupun hakim, usaha Kadin Indonesia ini akan sia-sia.²³¹

Memang sejauh ini, gagasan tentang Pakta Anti Suap, Kampanye Nasional Anti Suap dan Gerakan Nasional Anti Suap belum sepenuhnya mampu menciptakan dunia usaha yang terbebas dari suap ataupun korupsi dalam praktek-praktek bisnis sehari-hari. Praktek suap acapkali muncul dan sukar untuk diselesaikan dengan sekedar pakta, kampanye dan gerakan. Tetapi yang jelas, sebagai wacana publik, yang penting bagi gerakan perang terhadap korupsi apa yang digagas oleh pengusaha kritis, seperti misalnya, Aburizal Bakrie, telah menjadi wacana yang dominan.

Subtansi yang amat penting berikut dari implikasi pemikiran politik Aburizal bakrie tentang nasionalisme, demokrasi dan pembangunan ekonomi, terutama dalam katagori peta pemikiran politik Indonesia pasca 1965 sebagaimana dijelaskan Feith dan Castles di awal, adalah cenderung bergesernya katagori dalam peta pemikiran politik Indonesia.

²³¹ Ibid.

Seperti digambarkan di bab awal, bahwa pemikiran politik Indonesia pasca 1965 (era Orde Baru, mungkin juga termasuk era Reformasi) dapat dipetakan menjadi dua katagori, yakni, pemikiran politik “developmentalis integralis” dan pemikiran politik “kritis pluralis”. Adapun letak atau pokok pengajaran dari pemikiran politik developmentalis integralis adalah *pertama*, memprioritaskan pembangunan ekonomi, *kedua*, stabilitas, *ketiga*, keamanan dengan pengaruh militer yang dominan, *keempat*, keserasian sosial, *kelima*, keutuhan wilayah, dan *keenam*, pemerintah yang kuat.

Sedangkan letak pengajaran pemikiran politik kritis pluralis adalah *pertama*, mencegah korupsi, *kedua*, memberantas unsur kesewenang-wenangan dalam tata kerja pemerintah, *ketiga*, menegakan *rule of law*, *keempat*, emansipasi masyarakat kecil, *kelima*, pembongkaran berbagai instrumen negara yang mengawasi kehidupan politik atau masyarakat lainnya, *keenam*, hak-hak organisasi, *ketujuh*, otonomi daerah, dan *kedelapan*, otonomi komunitas etnis.

Pemikiran politik Indonesia yang dipetakan pada dua katagori tersebut akan mengalami kesulitan untuk diterapkan pada pemikiram politik. Dimana jika katagorisasi demikian, tampak bahwa pemikiran politik Aburizal bakrie tidak dimasukan pada salah satu kategori, developmentalis integralis saja, atau kritis pluralis saja. Ada pemikiran-pemikirannya yang lebih tepat dimasukan pada katagori developmentalis integralis, tetapi juga ada pemikiran-pemikiran lainnya yang masuk wilayah kritis pluralis.

Beberapa pemikiran politik Aburizal yang dapat dikategorisasikan sebagai developmentalis integralis adalah gagasan prioritas pembangunan ekonomi, keutuhan wilayah, peran TNI yang dominan, dan pemerintahan yang berwibawa dan keseimbangan peran. Sementara pemikiran-pemikiran yang dapat terkatagorikan kritis pluralis, diantaranya, pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman, penghilangan dikotomi pri dan non pri, dunia usaha dan otonomi daerah, dan Pakta Anti Suap.

Jika dicermati dari berbagai gagasan atau pemikiran politik Aburizal Bakrie di atas, bahwa

kategori Aburizal tidak bisa berada di salah satu kategori pemikiran politik di atas, melainkan pemikiran politik Aburizal cenderung merupakan sinergis atau pun sintesa dari kedua katagori di atas. Sintesa pemikiran politik tersebut, barangkali dapat diberi cap katagori “developmentalis progresif”. Namun demikian, sesungguhnya penulis tidak sepenuhnya yakin bahwa sebutan itulah yang paling tepat, namun itulah yang penulis pilih pada saat ini.

Hanya saja ada beberapa alasan yang setidaknya bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih kategori tersebut, *pertama* dari perspektif “masa” dikumandangkannya tema pemikiran politik tersebut, yakni gagasan yang dikumandangkan pada masa Orde Baru dan gagasan yang dikumandangkan pada masa era Reformasi. Unsur pemikiran developmentalis Aburizal Bakrie cenderung berkumandang pada masa Orde Baru, sedangkan unsur pemikiran progresif acapkali berkumandang pada era Reformasi.

Dan *kedua*, dari perespektif basis pemikiran dan karakter sikap. Sudah diketahui

sebelumnya bahwa basis pemikiran Aburizal Bakrie adalah ekonomi bisnis. Dan basis demikian merupakan unsur hakiki dari kategori pemikiran politik developmentalis. Sementara karakter percaya diri untuk terus maju, dan berbuat nyata bagi masyarakat dan negara adalah pandangan dan sikap yang sejauh ini dikembangkan Aburizal Bakrie. Dan karakter demikian itu adalah unsur terpenting dari langkah-langkah progresif.²³²

B. Nasionalisme dan Demokrasi: Berparadigma Ekonomi Bisnis

Memahami aksi politik Aburizal Bakrie dari sudut pandang pemikiran politik mengenai nasionalisme dan demokrasi, kiranya harus dilacak pada tiga konsep besar, yakni, ekonomi bisnis, masyarakat, dan globalisasi. Pemikiran politik Aburizal Bakrie, termasuk aksi politik yang diperagakannya, sangat dilandasi pertimbangan

²³² Lawan dari progresif adalah kategori reaksioner, yakni sikap yang tidak puas dengan kondisi yang ada dan menghendaki perubahan dengan kembali ke masa lalu. Selain itu ada juga katagori konservatif, yakni puas dengan keadaan yang ada dan berkehendak untuk mempertahankannya.

nilai-nilai ekonomi bisnis, orientasi masyarakat, dan nilai-nilai arus global sebagai realitas.

Pada bagian ini, hanya akan dibahas bagaimana hubungan nilai-nilai ekonomi Bisnis dengan pemikiran politik Aburizal Bakrie. Sedangkan konsep masyarakat dan nilai-nilai globalisasi akan mendapatkan penjelasan lebih jauh pada bagian yang membahas nasionalisme Aburizal Bakrie sebagai nasionalis ekonomi terbuka.

Pada hakikatnya Aburizal Bakrie adalah pelaku bisnis yang memiliki ketajaman dalam pemikiran ekonomi bisnis. Walaupun lulusan elektro ITB, yang relatif jauh dari kurikulum atau ajaran-ajaran bisnis, namun Aburizal telah membuktikan naluri bisnisnya melalui kemampuan Ical dalam menjalankan amanat ayahanda Achmad Bakrie untuk mengembangkan Kelompok Usaha Bakrie. Sampai saat inipun, Aburizal Bakrie tetap lebih kental dikenal sebagai tokoh pengusaha yang mempunyai segudang pemikiran ekonomi bisnis, ketimbang seorang politisi pengusaha yang memiliki pemikiran dan karier politik puncak. Namun demikian, karena

perilaku bisnis dan pemikiran ekonomi bisnis yang dinamis dan kontekstual, secara otomatis akan menyangkut dimensi-dimensi kehidupan sosial, politik dan kenegaraan.

Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa pemikiran politik sekaligus aksi politiknya adalah konsekuensi derivatif dari pemikiran ekonomi bisnisnya. Sangat mudah dimengerti jika keterlibatan Aburizal Bakrie dalam berbagai partisipasi politik di Indonesia, sebagai kepanjangan tangan (*extension*) dari logika berpikir ekonominya dan bahwa persepsi Aburizal Bakrie tentang pemikiran politik nasionalisme dan demokrasi justru tegak kokoh pada persepsinya tentang pembangunan ekonomi. Ical melihat bahwa ekonomi adalah “fondasi utama”, sementara yang lainnya, termasuk politik (nasionalisme dan demokrasi) adalah “ikutan”.

Tema besar pemikiran politik Aburizal Bakrie, yakni nasionalisme dan demokrasi, misalnya dengan tegas Aburizal mensyaratkan harus dikaitkan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Bagi Aburizal, pembangunan ekonomi adalah basis atau infrastruktur yang menentukan

kualitas dari terbangunnya kesadaran nasionalisme dan kualitas demokrasi masyarakat. Dengan itu Ical melihat bahwa nasionalisme dan demokrasi adalah bagian dari bangunan atas atau superstruktur yang membutuhkan bangunan bawah yang kokoh sebagai penyangga bagi keduanya. Ini jelas menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi sebagai bagian dari tiga paket pilar kebangsaan, sebagaimana sering Ical ungkapkan, namun dalam realitas kebijakan, pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas pertama.

Hal itu sama seperti ketika Aburizal menjelaskan tentang pentingnya memomorsatukan pembangunan nasionalisme sebelum membangun demokrasi. Ical melihat pentingnya nasionalisme dipertamakan adalah misalnya Ical berargumen bahwa semangat nasionalisme Indonesia selama ini sangat rapuh. Hal itu paling kurang, menurutnya dapat dilihat dari potensi ancaman separatisme yang makin meningkat di setiap daerah, terutama di daerah Nangroe Darussalam Aceh, Papua, dan Maluku. Selain itu, menurutnya

lagi adalah makin maraknya peristiwa kerusuhan yang bermuatan SARA (Suku, Agama, dan Ras).

Dalam hal itu, Aburizal berkeyakinan bahwasanya selama nasionalisme belum terbangun secara kokoh dan tangguh, maka dipastikan demokrasi model apa pun akan mengalami kesulitan untuk diterapkan secara utuh dan menyeluruh di bumi Indonesia ini. Bahkan sebaliknya kalau pun demokrasi dipaksakan dengan realitas nasionalisme yang labil tersebut, justru demokrasi akan serta merta menjadi ancaman besar bagi keutuhan nasional, baik keutuhan wilayah maupun keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Aburizal berpikiran bahwa sebelum demokrasi diterapkan, kita harus terlebih dahulu membenahi kesadaran nasionalisme ke-Indonesia-annya sebagai prasyarat.

Demikian juga tentang pentingnya bangunan ekonomi bagi nasionalisme dan demokrasi sebagaimana disinggung di atas. Sampai-sampai di setiap pemikiran politik Aburizal berikutnya, sebagai “turunan” dari pemikiran nasionalisme dan demokrasi hampir

senantiasa dikaitkan dengan dimensi “serba” ekonomi.

Terdapat tujuh tema besar pemikiran ekonomi yang kerap kali mempengaruhi “mayoritas” pemikiran politik Aburizal Bakrie. Adapun ketujuh tema besar tersebut oleh Aburizal sendiri dipopulerkan dengan sebutan “sapta sukse pembangunan ekonomi”. Fokus pemikiran aplikatif tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, resolusi masalah utang publik. Penyelesaian masalah utang publik harus menjadi prioritas utama dalam jangka dekat ini ini karena akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi makro. Sasarannya adalah menurunkan beban bunga dan pokok utang sampai level yang aman yaitu tidak lebih dari 20 % dari penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan non-konvensional.²³³

²³³ Lihat Aburizal Bakrie, Visi Misi Calon Presiden Aburizal Bakrie pada Konvensi Nasional Partai Golkar 2003-2004.

Kedua, stabilitas ekonomi makro. Program stabilitas ekonomi makro dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha sehingga akan mendorong investasi swasta. Hal ini dicapai dengan cara menekan angka inflasi serendah mungkin, mengarahkan suku bunga ke level yang kompetitif secara internasional, menjaga stabilitas nilai tukar, menekan defisit anggaran, serta meningkatkan disiplin anggaran.²³⁴

Ketiga, pertumbuhan berbasis tenaga kerja (*employment based growth*). Pertumbuhan yang sekaligus menciptakan pemerataan akan dapat dicapai secara otomatis jika pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan sekaligus kompetitif. Sektor-sektor yang berpeluang dalam hal ini adalah industri yang berbasis sumber daya alam, infrastruktur, sektor jasa, dan industri manufaktur terutama elektronik.²³⁵

Keempat, pendalaman penguasaan teknologi (*technological*). Dalam era persaingan

²³⁴ Ibid.

²³⁵ Ibid.

global, salah satu faktor yang paling menentukan daya saing adalah tingkat penguasaan teknologi. Oleh karena itu dunia usaha harus diberi insentif dalam melakukan reseach and development berupa penyediaan fasilitas publik dan insentif fiskal. Disamping itu sistem pendidikan nasional harus diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional.²³⁶

Kelima, reformasi sektor keuangan dan perbankan. Pembaharuan dalam sektor keuangan dan perbankan ditujukan untuk memulihkan fungsi sektor ini sebagai urat nadi perekonomian. Hal ini akan dicapai dengan cara penguatan dalam prudential regulation, penataan kembali aritektur jasa keuangan, dan peningkatan prinsip kehati-hatian.²³⁷

Keenam, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah adalah sangat penting dalam menarik investasi, mengurangi struktur ongkos dunia usaha, serta membuka akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Diperkirakan,

²³⁶ Ibid.

²³⁷ Ibid.

untuk menopang pertumbuhan investasi, penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur setidaknya harus mencapai 5 persen dari GDP setiap tahunnya.²³⁸

Dan *ketujuh*, peningkatan kualitas hidup. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata ditunjukkan untuk peningkatan pendapatan tetapi justru pada akhirnya harus ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini akan dicapai dengan cara peningkatan fasilitas air bersih, sarana kesehatan masyarakat yang terjangkau, akses yang merata terhadap pendidikan, dan pengelolaan lingkungan secara beradab.²³⁹

Dalam pengimplementasian dari sapa sukses pembanguna di atas, Aburizal Bakrie mempersyaratkan untuk berparadigma integralitik dan berorientasi keadilan masyarakat, sebagaimana disebutkan di bab III. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi ekonomi yang diarahkan untuk mengubah sistem ekonomi yang dicirikan oleh kapitalis kroni (*crony capitalism*) menjadi sistem

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Ibid.

ekonomi pasar yang berkeadilan. Menurutnya, kita tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan semata. Tapi yang terlebih penting lagi adalah bagaimana pertumbuhan dapat dipacu dengan titik berat pada pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kita harus harus menuju pada satu sistem ekonomi dimana kemiskinan dan ketimpangan dapat dihapuskan, pengangguran dapat ditekan sampai suatu tingkat yang alami (*natural rate of unemployment*), dan kualitas hidup dan lingkungan tetap terjamin.²⁴⁰

Berikut akan dijabarkan beberapa contoh tentang pemikiran-pemikiran politik kritis Aburizal Bakrie yang berdimensikan ekonomi: *Pertama*, gagasan otonomi daerah yang berkomitmen pada keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinyatakan oleh Aburizal Bakrie sebagai bagian terpenting dari bingkai pembangunan nasionalisme Indonesia. Yang berpotensi menjadi jembatan kedua variabel tersebut, Aburizal menyebutkan pentingnya landasan aktif dan riil dari

²⁴⁰ Ibid. Lihat, *Transformasi Kebangkitan Indonesia*, dalam Visi Misi Aburizal Bakrie calon presiden 2004.

pembangunan ekonomi. Pembanguna ekonomi dimaksud, dalam kacamata Aburizal, seperti disinggung di atas adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi masyarakat atau rakyat kecil.

Kenapa masyarakat harus menjadi orientasi dalam pembangunan ekonomi, Aburizal berargumen bahwa berdasarkan pengamatannya selama ini banyak para pelaku ekonomi atau pengusaha yang hanya mementingkan atau berorientasikan uang dan keuntungan *an sich* dengan mengabaikan kepentingan rakyat untuk bisa bekerja dan makan.

Dalam konteks pemikiran otonomi daerah berkomitmen keutuhan wilayah, Ical pun melihatnya dari kacamata bagaimana pembangunan ekonomi bagi dunia usaha akan lebih otonom. Ical tidak melihat otonomi daerah, meskipun merupakan buah dari keputusan politik, sebagai potensi untuk persebaran kekuasaan yang membuka lebar bagi ekspansi politiknya. Namun Ical konsisten melihat otonomi daerah benar-benar sebagai potensi bagi upaya persebaran pembangunan ekonomi yang akan menguntungkan, selain buat kelompok usahanya

juga tentunya masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan persebaran kekayaan ekonomi, dengan jaringan usahanya, dalam pandangan Ical tentunya akan berimplikasi positif bagi pembukaan atau penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya²⁴¹.

Dengan penciptaan lapangan kerja demikian tersebut dalam konteks otonomi daerah, dari perspektif dunia usaha diharapkan pemerintah daerah mampu menjamin sistem yang bertujuanan bagi upaya peningkatan ekonomi warga dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, bagi dunia usaha, Aburizal memandang bahwa prinsip-prinsip otonomi daerah di Indonesia--sebagaimana

²⁴¹ Dalam perkara bisnis, pembukaan atau penciptaan lapangan kerja melalui jaringan usaha Bakrie merupakan obsesi Aburizal Bakrie yang paling utama. Ical senantiasa mengingat dan memperhatikan pesan ayahnya Achmad Bakrie, yakni “untuk terus berusaha sehingga jumlah orang yang ‘makan’ bersama Group Bakrie semakin bertambah pula”. Berkenaan dengan itu, pada tahun 2000 misalnya Ical mentargetkan dapat mempekerjakan 25.000 orang. Ical berasumsi jika masing-masing pekerja memberi makan 4 orang (satu istri dan dua anak), maka secara tidak langsung Group Bakrie telah memberi makan pada 100.000 orang Indonesia. “Saya baru bisa merasa hidup jika rencana ini menjadi kenyataan”. Hal itu Ical sampaikan kepada wartawan majalah Warta Ekonomi, 5/6/1989. Lihat, Nasir Tamara, Op Cit, hlm. 51.

tertuang dalam UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah--merupakan sebuah sistem pemerintahan yang secara strategis memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah. Hal ini semestinya diikuti porsi penerimaan keuangan bagi daerah yang lebih besar untuk membiayai pelaksanaan fungsinya yang makin luas (*money follpws function*).²⁴² Dalam kaitannya dengan iklim investasi, penting dicermati apakah kewenangan dan sumber pendapatan keuangan daerah otonomi di era desentralisasi ini telah meningkat secara berarti dibanding masa sentralisasi.

Otonomi sebagai peluang daerah menyongsong investasi juga dipertegas oleh Aburizal Bakrie. Ia mengingatkan bahwa untuk menyongsong investasi di era otonomi, paling tidak terdapat empat hal yang mesti diyakini dan dihayati; *pertama*, bahwa pembangunan ekonomi mensyaratkan rentang waktu jangkauan panjang

²⁴² Aburizal Bakrie, *Tantangan dan Peluang Investasi Usaha di Era Otonomi*, dalam Lalu Mara Satria Wangsa, Op Cit, hlm. 198.

untuk memetik hasilnya. Sejalan dengan kesepakatan Johannesburg, pembangunan ekonomi mesti berdimensi *sustainable (economic) development*. Aspek-aspek untuk kepentingan generasi mendatang--dengan tidak mengabaikan kepentingan masa kini--harus menjadi semacam dogma untuk diterapkan. Prinsip ini mensyaratkan kesetaraan mind set penyelenggara pemerintah dan para *stakeholder* pembangunan ekonomi lainnya. Akan menyedihkan bila untuk kepentingan jangka pendek, pungutan-pungutan terhadap aktivitas dunia usaha akhirnya memandulkan daya saing ekonomi daerah sehingga dijauhi investasi.²⁴³

Kedua, dalam hal kompetisi, daerah-daerah otonom harus mampu menghasilkan blue

²⁴³ Ibid, hlm. 201-202. Ical juga melihat, untuk melengkapi mind set tersebut penting ditekankan sikap proaktif--jemput bila--dari aparat pemerintah daerah untuk merebut investasi. Menurutnya, harus ditinggalkan sikap yang terlalu mengandalkan segala keunggulan komparatif Indonesia berupa kekayaan alam., jumlah penduduk yang besar, posisi geografis yang mendukung, dll. Sebab, tanpa kemampuan meng-capitalize keunggulan-keunggulan komparatif tersebut, akan sangat sedikit nilai ekonomis yang didapatkan. Dalam era global, daerah-daerah lain di luar negeri siap berlomba mempercantik diri untuk merebut investasi tersebut.

print mengenai *strategic plan* arah pembangunan ekonomi daerah yang *aplicable* dengan kelengkapan *action plan*; tidak berhenti pada sekedar dokumen perencanaan pembangunan yang hanya tertumpuk sebagai arsip-arsip pemerintah. Dalam penyusunan *strategic plan* tersebut perlu dikenali faktor-faktor yang merupakan keunggulan komparatif maupun kompetitif daerahnya yang bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya masyarakat, dan lain-lain. Dari sana bisa dipetakan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut; apakah sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian pangan, perikanan, manufaktur, pariwisata, jasa, dan lain-lain.²⁴⁴

Ketiga, di samping kompetisi yang menjadi titik tekan pengembangan ekonomi daerah, sangat disadari bahwa tidak satu pun daerah atau bahkan negara sekalipun yang bisa

²⁴⁴ Ibid, hlm. 202. Selain itu, Ical juga menyarankan agar lebih komprehensif dalam merumuskan *strategic plan*, perlu juga untuk mengenali potensi yang dimiliki daerah-daerah otonom lainnya di Indonesia. Hal itu penting, mengingat menyatunya perekonomian dunia yang mengkondisikan suatu daerah untuk menempatkan dirinya secara tepat dalam persaingan ekonomi global.

sepenuhnya independen. Independensi wilayah juga menjadi faktor yang penting diperhitungkan dan karena itu sinergi kerja sama antar daerah otonom juga diperlukan. Selain pertimbangan skala ekonomi, kerjasama antardaerah mutlak diperlukan untuk memfasilitasi jenis-jenis usaha yang unit usahanya melintasi wilayah administrasi kabupaten/kota, bahkan provinsi.²⁴⁵

Dan *keempat*, di luar beberapa hal di atas, studi-studi baru ini yang dilakukan KPPOD mengenai Peningkatan Daya Tarik Investasi 134 kabupaten/kota menunjuk 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah: kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, produktivitas dan tenaga kerja, serta infrastruktur fisik.²⁴⁶ Dari kelima faktor tersebut,

²⁴⁵ Ibid, hlm. 203. Hal itu merujuk pada pasal 87 UU 22/1999 yang menghendaki adanya kerjasama antardaerah otonom. Dan diharapkan terjadi simbiosis mutualisme.

²⁴⁶ Ibid, hlm. 204. Dalam konteks kelembagaan tersebut, menurut Ical tidaklah berlebihan bila dunia usaha terus berupaya mewujudkan *good corporate governance*. Dunia usaha menuntut agar pemerintah daerah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Rumusan-rumusan sederhana tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance*, bila dapat diterapkan secara konsisten, kiranya dapat memberi harapan bagi pembangunan ekonomi. Sebab,

Ical melihat faktor kelembagaan (peraturan daerah, kualitas pelayanan aparat, dan kepastian hukum) menempati bobot yang paling tinggi bagi pelaku usaha dalam menentukan kebijakan ekonominya.

Dengan menempatkan pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti yang dipaparka di atas, maka Aburizal Bakrie lebih meyakinkan kepada kita bahwa ekonomi merupakan basis atau infrastruktur bagi upaya pemeliharaan keutuhan wilayah melalui kebijakan politik otonomi daerah. Dari situ, Aburizal optimis bahwa nasionalisme Indonesia akan tegak-kokoh di tengah-tengah terjangan arus globalisasi. Maka karean itu, menghadapi era globalisasi adalah saatnya para pelaku ekonomi bersama masyarakat luas untuk dapat dengan kongkrit memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi dalam memperkokoh tali nasioanalisme.

Kedua, gagasan Aburizal Bakrie tentang pembasmian korupsi melalui Pakta Anti Suap

menurut Ical, praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* itulah yang selama ini secara revolusioner menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia.

mempunyai penjelasan ajaran ekonomi bisnis yang mendasar. Selain sebagai gagasan politik, seperti diakui Aburizal sendiri dalam bab III, gerakan anti suap tersebut juga sebagai bagian dari gerakan moral agar orang malu dan takut melakukan suap.

Bagi Aburizal Bakrie, praktek korupsi di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan tata kelola ekonomi bisnis, dalam hal ini perusahaan yang baik dan bersih. Selama ini, Aburizal melihat bahwa membesarnya praktek korupsi di Indonesia, sampai-sampai Indonesia sukar beranjak dari lingkaran ranking enam besar negara terkorup di dunia dan lingkaran tiga besar di benua Asia, tidak lain karena tata kelola ekonomi yang buruk, baik yang dilakukan birokrasi pemerintah maupun para pelaku bisnis.

Dalam bahasa lain, Aburizal melihat bahwa praktek korupsi sesungguhnya muncul dari arah angin pelaku-pelaku ekonomi. Karena itu, dalam upaya pembasmian korupsi tersebut menurut Ical tidak ada alternatif lain kecuali dimulai dari pembersihan terhadap segala praktek negatif yang sering ditunjukkan oleh para pelaku

bisnis, terutama para pelaku bisnis besar. Praktek negatif yang menjadi embrio atas lahirnya budaya korupsi, menurut pandangan Aburizal, sebagaimana disebutkan pada bab III, adalah praktek suap-menyuap. Dimana selama ini, praktek korupsi di kalangan pengusaha dengan baju suap menjadi “budaya laten”. Jelas kondisi dan praktek demikian, baginya adalah perilaku ekonomi yang buruk dan berdampak luas bagi praktek-praktek buruk lainnya, termasuk praktek korupsi.

Bagi Aburizal Bakrie, penempatan gerakan anti suap dalam lingkaran gerakan membasmi praktek korupsi di Indonesia bukan tanpa sebab dan tujuan. Ical memandang gerakan anti suap tersebut akan lebih efektif dan juga akan menumbuhkan efek *snowball theory*. Maksudnya, semakin bersih dan baik tata kelola perusahaan-perusahaan (*good and clean corporates governance*) maka akan semakin berpengaruh terhadap upaya membangun pemerintahan bersih dan baik (*clean and good goverment*) yang terbebas dari budaya korupsi.

Gerakan Anti Suap dunia usaha itu sendiri, yang dilengkapi oleh konsep Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS) sesungguhnya dipersiapkan untuk Gerakan Nasional Anti Suap (GNAS) 2005-2015 bersama-sama dengan masyarakat sipil dan penyelenggara negara dalam rangka meningkatkan kembali harkat martabat bangsa.

Adapun sasaran anti suap tersebut antara lain, menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama kalangan dunia usaha untuk secara bersungguh-sungguh menekan peluang-peluang terjadinya suap se-optimal mungkin; mendorong para pengusaha untuk memiliki dan menerapkan kode etik perusahaan di perusahaannya masing-masing dalam rangka upaya mewujudkan praktek bisnis bertika; dan meraih komitmen bersama antara dunia usaha nasional, masyarakat sipil dan penyelenggara negara.²⁴⁷

Ketiga, toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman dalam pemikiran Aburizal Bakrie, sebagai salah satu nuktah pandangan pemikiran

²⁴⁷ Lihat Kadin Indonesia, Kampanye Nasional Anti Suap, Op Cit, hlm. 6.

politik demokrasi, lahir dari realitas hubungan ekonomi antara pribumi-non pribumi. Wacana pribumi-non pribumi (pri-nonpri) pada masa Orde Baru sempat menjadi “isue basah” untuk menaikkan atau menurunkan *bargaianing position* seseorang. Misalnya Aburizal sendiri, menurut pemberitaan sebuah website²⁴⁸, pernah “memainkan” wacana tersebut untuk kepentingan posisi menteri pada Kabinet Pembangunan VII.

Lepas dari perlakuan terhadap wacana pri-nonpri di atas, bahwa hal itu menjadi konteks dominan bagi pemikiran toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman Aburizal Bakrie. Adapun asumsi dari pemikiran tersebut adalah dalam bidang politik kaum pribumi adalah mayoritas dan kaum non-pribumi adalah minoritas. Sementara sebaliknya, dalam bidang ekonomi, kalangan pribumi adalah kelompok

²⁴⁸Lihat www.hamline.edu/13/3/1998. Disebutkan bahwa perhitungan Aburizal Bakrie adalah bahwa nayaiannya mengenai masalah pri-nonpri dapat menarik perhatian kelompok CIDES Adi Sasono dan kalangan ICMI yang sekarang sdang naik daun karena BJ Habibie sudah pasti menjadi Wapres. Adapun target politik Aburizal Bakrie adalah mendapat posisi menteri di Kabinet Pembangunan VII.

minoritas, sementara kalangan non-pribumi, dalam hal ini kalangan keturunan etnis Cina, adalah kelompok mayoritas.

Dengan komposisi demikian, bagi Abrurizal, hal itu tentunya tidak sehat dan berpotensi menunculkan ketidaksetabilan nasionalisme dan demokrasi. Lantaran itu, Ical berpendirian bahwa prinsip keseimbangan menjadi sesuatu yang penting dalam mengelola sebuah pluralisme atau perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia.

Untuk konteks kekinian, perbedaan dan keberagaman bagi Aburizal adalah indikator kuat bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Ical berargumen bahwa disadari atau tidak, sumber-sumber keragaman baru dari berbagai katagori, seperti disinggung sebelumnya, justru semakin banyak. Barangkali itu menurut Ical termasuk bukti keberhasilan pembangunan nasional selama ini. Artinya, semakin berpengalaman kita membangun, semakin bermunculan pula pelaku-pelaku potensial baru, profesi-profesi baru, bahkan juga persekutuan-persekutuan baru atas dasar kesamaan atau proksimiti tertentu. Karena

itu, ada benarnya pendapat yang menyatakan bahwa pluralitas sudah merupakan kelaziman kultural bangsa Indonesia.

Ical melihat bahwa untuk keberhasilan suatu pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan demokrasi, pendikotomian pri-nonpri dalam bingkai pemabnguan di atas sudah tidak relevan lagi. Karenanya, Ical menyarankan untuk lebih menekankan persaingan yang sehat, ketimbang harus terus disibukan dengan pendikotomian seperti yang selama ini berlangsung.

Tampak bahwa Aburizal Bakrie mengembangkan pedoman pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman suatu masyarakat tidak berdasarkan kacapandang politik dalam tatacara pergaulan sosial yang demokratis, tetapi merujuk pada bagaimana persebaran ekonomi yang seimbang dengan tidak melihat lagi pengelompokan atau pendikotomian antara pribumi dan non pribumi. Justru sebaliknya, Aburizal menyarankan agar perbedaan itu menjadi kekuatan yang signifikan bagi pembangunan bangsa.

Untuk menguatkan potensi signifikan di atas, menurut Aburizal, masyarakat harus lebih disiapkan dan perlu dididik mengenai bahwa eksklusivisme dan individualisme bukanlah bagian dari tata nilai bangsa kita untuk menghargai perbedaan. Tetapi, perbedaan dan keragaman-keragaman itu sendiri harus dibuktikan sebagai basis kesatuan dan persatuan. Paham kebangsaan kita adalah integralistik, yang disimbolkan lewat Bhineka Tunggal Ika.

Dan *keempat*, gagasan demokrasi ekonomi yang produktif untuk rujukan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Terdapat dua penegasan Aburizal yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi yang produktif, yakni pertama bahwa demokrasi baru bisa tegak manakala bangunan ekonomi sudah kokoh, dan kedua bahwa segala upaya pembangunan ekonomi harus berlandaskan demokrasi.

Dari dua ketegasan tersebut, secara sepintas tampak bertolak belakang. Namun demikian, bila dibaca secara seksama tidaklah demikian. Sebagai seorang pelaku ekonomi, dua ketegasan itu meyakinkan kepada kita bahwa apa

pun jenis demokrasi yang dikembangkan harus disangga oleh kokohnya bangunan ekonomi. Bertolak dari itu, menempatkan praktek demokrasi dalam kerangka ekonomi atau sebaliknya menempatkan praktek ekonomi dalam bingkai demokrasi, dalam pandangan Aburizal adalah keniscayaan.

Pengertian demokrasi ekonomi yang demikian telah menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie sangat konsen terhadap bagaimana menempatkan ekonomi dalam setiap aspek politik termasuk demokrasi. Disamping itu, dengan ekonomi mendapat tempat pada setiap aspek politik, maka dengan sendirinya, Aburizal menyarankan agar ekonomi pun sejalan dengan aspek yang ditempatinya itu. Misalnya, dalam aspek demokrasi, ekonomi dalam penerapannya harus sejalan (merujuk) dengan prinsip-prinsip demokrasi. Begitu juga dalam aspek sosial, penerapan ekonomi harus memperhatikan aspek-aspek sosial. Untuk yang pertama akan melahirkan demokrasi ekonomi atau ekonomi demokrasi, sementara yang kedua akan melahirkan sosial ekonomi atau ekonomi sosial.

Diantara penerapan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau pun sosial, menurut Aburizal dengan mengutip gerakan sosial ekonomi HIPMI yang pernah dipimpinya, adalah mengakui kebebasan berusaha; mengakui hak milik perorangan yang berfungsi sosial-ekonomi; mengakui hak perolehan keuntungan wajar; mengakui adanya persaingan yang sehat; memegang teguh etika duniausaha; mewujudkan sistem upah dan harga yang layak; mewujudkan sistem usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan semangat kebangsaan; menghindari sistem etatisme dalam pekonomian; dan menentang sistem monopoli yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan itulah Aburizal menekankan bahwa demokrasi ekonomi, sebagaimana disinggung pada bab III, sangat menuntut terjaminnya hak-hak setiap dan seluruh warga negara untuk berkreasi, berinisiatif, dan berpartisipasi semaksimal mungkin (*full participation*) dalam kehidupan dan atau pembangunan ekonomi kita sebagai bangsa. Adapun substansi dari demokrasi ekonomi adalah *pertama*, peningkatan kualitas kehidupan (*quality*

of life). *Kedua*, persamaan ha-hak (*equality*) ekonomi setiap orang. Dan *ketiga*, keseimbangan kebijakan.

Dalam perspektif partisipasi masyarakat semaksimal mungkin (*full participoation*), demokrasi ekonomi dalam pandangan Aburizal sangat berpotensi melahirkan produktifitas positif masyarakat. Konsep tersebut oleh Aburizal lebih dipopulerkan dengan konsep “demokrasi ekonomi yang produktif”, yang arti sederhanya demokrasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang riil.

Sesuatu yang riil tersebut menurut Aburizal adalah lahirnya kebijakan politik untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Berkaitan dengan itu, Aburizal mengatakan bahwa dalam lingkungan dunia usaha, demokrasi ekonomi yang langsung dan paling produktif adalah lapangan kerja yang berkelanjutan baik lewat rumus *effective combination of the tangible and intangible resources* dalam rangka inovasi produk, maupun lewat ekspansi pasar. Lebih lanjut Aburizal menjelaskan dan mencontohkan:

Penciptaan lapangan kerja, dalam konteks demokrasi ekonomi, memiliki fungsi ganda, yaitu

mendistribusi *wealth* dan sekaligus berpotensi mengkreasikannya lebih lanjut, misalnya gaji karyawan sebagian dialokasikan untuk tabungan (nasional) atau mendukung *self development*-nya sendiri dalam rangka produktifitas dan nilai tambah partisipasinya pada satuan-satuan kerja masing-masing.²⁴⁹

Untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan mereka dalam dunia usaha, dari sisi penerapan demokrasi ekonomi, diperlukan peran pemerintah (negara) sebagai fasilitator dan regulator. Dalam konteks seperti itu, Aburizal berpendapat bahwa usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi harus difasilitasi secara fungsional dan optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan usahanya dari waktu ke waktu. Menurutnya, yang mengembangkan usahanya ialah mereka sendiri, sedangkan pemerintah dan unsur-unsur dunia usaha lainnya hanya memfasilitasi. Berkaitan dengan itu, Aburizal mengingatkan kita bahwa "*The only kind of development possible is self-development.*" Tetapi,

²⁴⁹ Satria Wangsa, hlm. 326-327.

“one person or organization can encourage and facilitate the development of others”. Dan karena itu, menurutnya format fasilitasi tersebut harus memiliki nuansa pendidikan, solidaritas sosial, dan etika sosial sekaligus.²⁵⁰

C. Demokrasi Bernafas Nasionalisme

Kalau bicara soal nasionalisme, Roeslan Abulgani menyebutnya kebangsaan²⁵¹, tidak diragukan lagi, jika dicermati dari perjalanan *track record* (rekam jejak) para pengusaha Indonesia, baik di awal era Reformasi maupun era sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru), Aburizal Bakrie adalah sedikit dari banyak pengusaha yang mampu mengukuhkan rasa dan sikap nasionalis ke-Indonesia-annya.

Statemen di atas setidaknya dituliskan pada Harian Umum Suara Merdeka, bahwa ketika sebagian besar pengusaha besar melarikan diri ke luar negeri saat krisis, atau memindahkan investasinya ke negara lain, Aburizal memilih tetap tinggal di Indonesia. Ia tetap di Indonesia,

²⁵⁰ Ibid, hlm. 327.

²⁵¹ Lihat Herbert Feith & Lance Castles, Op Cit, hlm. 158.

menyelesaikan utang-utang perusahaannya, berlomba dengan waktu menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, lantas pelan-pelan bangkit.²⁵² Namun demikian, nasionalisme Aburizal Bakrie adalah nasionalis baru. Hal itu setidaknya dapat dilihat bahwa sekalipun tampak sangat nasionalis, Aburizal Bakrie tidak lantas tenggelam menjadi seorang yang masuk kategori nasionalis ekonomi. Aburizal tidak menolak privatisasi dan investasi asing. Aburizal Bakrie malah mengkampanyekan model ekonomi terbuka, bukan ekonomi tertutup.²⁵³

Nasionalisme yang dilatarbelakangi sebagai seorang pengusaha yang kukuh bertahan dalam suasana krisis, tampak Aburizal Bakrie berakar pada ekonomi. Oleh karena warna nasionalisme Aburizal Bakrie yang berakar pelaku ekonomi, maka sesungguhnya dalam peta pemikiran politik Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Herbert Feith & Lance Castles (lihat kerangka teori), maka

²⁵² Suara Merdeka, 31/10/2004

²⁵³ Lihat, Indra J Piliang, *Horison Pemikiran Aburizal Bakrie*, dalam Epilog buku *Merebut Hati Rakyat*, (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004), hlm. v.

Aburizal Bakrie cenderung masuk kelompok yang memandang nasionalisme sebagai keutuhan wilayah dan keadilan sosial.

Dalam katagori Feith & Castles, Aburizal Bakrie bukan pelaku ekonomi dan politisi yang memiliki pemikiran yang melihat nasionalisme semata-mata sebagai reaksi terhadap kolonialisme seperti pandangan kelompok sosialisme demokrat.²⁵⁴ Bukan kelompok sosialisme demokrat, Aburizal Bakrie bukan pula masuk dalam kelompok Tradisioalisme Jawa, Islam, apalagi Komunisme. Namun lebih tepatnya, dalam katagori Feith & Castles adalah nasionalisme radikal.

Kelompok nasionalisme radikal, seperti diwakili oleh pandangan Roeslan Abdulgani, melihat bahwa nasionalisme itu mempunyai tiga aspek, yaitu: *pertama*, aspek politis yang bersifat menumbangkan dominasi politik bangsa asing untuk menggantinya dengan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. *Kedua*, aspek sosial-ekonomis yang bersifat menghentikan

²⁵⁴ Lihat Feith & Castles, Op Cit, hlm. 162 dan 230.

eksploitasi ekonomi asing dan membangunkan suatu masyarakat baru bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Dan *ketiga*, aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kepribadiannya disesuaikan dengan perubahan zaman.²⁵⁵

Selain berkatagorikan nasionalisme radikal, sejalan dengan perkembangan dan pergeseran politik, dimana pasca 1965 katagori nasionalisme radikal surut dan termarginalkan dari kejayaannya, maka Aburizal Bakrie, dengan tetap melihat dari pemikiran-pemikiran dan aksi politiknya pun, dapat terkatagorikan kelompok “nasionalis ekonomi”. Sebelumnya katagori pemikiran tersebut menurut Feith dan Castles, sebagai pengaruh dari nasionalisme radikal senyatanya telah diwakili oleh tokoh-tokoh “nasionalis ekonomi” seperti BJ Habibie (politisi akademis), Ginanjar Kartasasmita (politisi-

²⁵⁵ Ibid, hlm 62. Roeslan Abdulgani membedakan nasionalisme yang tumbuh di Barat dan nasionalisme yang tumbuh di Indonesia. Nasionalisme Barat lebih dipicu oleh peralihan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Agen dari peralihan itu adalah kelas menengah. Sementara itu, nasionalisme Indonesia (atau pun nasionalisme Asia pada umumnya) lahir sebagai reaksi atas kolonialisme Eropa Barat.

pengusaha), dan Ibnu Sutowo (Pengusaha Nasional).²⁵⁶

Sebagai seorang tokoh yang terkatagorikan nasionalis ekonomi, Aburizal Bakrie sendiri menegaskan bahwa nasionalisme perlu dilandasi oleh dasar-dasar ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial sebagai sarana keharusan perlengkapannya. Dan lebih dari itu nasionalisme juga adalah keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesai. Berkenaan dengan itu Aburizal mengatakan bahwa dalam arti luas,²⁵⁷ nasionalisme harus didefinisikan sebagai upaya untuk menggapai keadilan sosial ekonomi dan mempertahankan integritas negara; satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dengan itu, perlu adanya penyelesaian yang menyeluruh dan manusiawi terhadap berbagai konflik dan gerakan separatisme.

²⁵⁶ Ibid., hlm. xxvi. Ide-ide pokok nasionalisme radikal dalam masyarakat, misalnya rumusan atau pokok pemikiran anti-imperialisme dan anti-ketergantungan.

²⁵⁷ Lihat Visi Missi Aburizal Bakrie sebagai calon presiden Konvensi Nasional Partai Golkar 2004, dalam tiga pilar kebangsaan.

Dalam perjalanan aksi nasionalisme Aburizal Bakrie yang tercermin dalam praktek bisnis Kelompok Usaha Bakrie (juga tentunya aksi politiknya), nasionalis ekonomi Aburizal mengalami elaborasi sesuai dengan langkah ekspansi jaringan usahanya ke level internasional. Sehingga peta katagori pemikiran politik Indonesia sebelumnya otomatis mengalami perubahan dan pergeseran. Yang terpenting dari itu adalah apakah dengan ekspansi tersebut atau bahkan membuka diri terhadap arus globalisasi menunjukkan bahwa nasionalisme Aburizal telah luntur, dan tinggal jiwa ekonomi saja?

Menjawab pertanyaan di atas, Aburizal Bakrie menegaskan bahwa Group Bakrie dikembangkan ke mancanegara bukan sekedar untuk hidup atau *survive*, melainkan juga untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi masyarakat luas. “Kita tidak cukup hanya berguna untuk keluarga sendiri. Duit yang kita miliki boleh hanya disimpan atau untuk foya-foya. Kita mesti

menciptakan sesuatu untuk masyarakat”.²⁵⁸ Dengan itu tampak bhwasanya masyarakat menjadi kata kunci dalam pengembangan usaha Bakrie.

Selain alasan di atas, Aburizal pun menyadari bahwa setiap pengusaha selalu berpikiran “bagaimana mengembangkan perusahaan dengan baik?” Ekonomi menurut Aburizal tidak mengenal batasan wilayah dan negara. Dimana ada keuntungan di situ ada kegiatan perekonomian. Namun demikian, Aburizal tetap mengingatkan agar pengusaha Indonesia tidak melupakan tanah airnya.²⁵⁹

Dengan keterbukaan Aburizal Bakrie terhadap upaya ekspansi jaringan usaha Bakrie ke mancanegara, berorientasi kerakyatan dan keterbukaan atas pergaulan ekonomi global, senyatanya telah serta merta membuat katagori baru yang melekat ke dalam katagori nasionalis ekonomi Aburizal Bakrie, yakni nasionalis ekonomi baru (*new economi nationalism*). Kategori

²⁵⁸ Nasir Tamara, Op Cit, hlm. 50. Disampaikan pada Republika, sesaat setelah terpilih menjadi Tokoh Bisnis Republika 1995.

²⁵⁹ Ibid, hlm. 49-50 dan 53.

tersebut itu dikonfirmasi dengan tegas oleh pengamat politik ekonomi, Rizal Mallarangeng dalam sebuah wawancara.²⁶⁰

Berkaitan dengan itu, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya, sesungguhnya nasionalisme atau nasionalis ekonomi yang dikembangkan Aburizal adalah nasionalisme baru (*open nationalism*). Artinya Aburizal sangat *welcome* terhadap arus globalisasi dengan tetap berorientasi rakyat, misalnya privatisasi yang berfihak ke nasib rakyat. Berdasarkan konteks itu, Aburizal Bakrie tidak hanya menempatkan dirinya sebagai manusia nasional, melainkan individu yang menjadi bagian dari persoalan-persoalan dunia dalam konteks globalisasi. Pengakuan Aburizal atas keyakinan demikian sangat berkaitan erat dengan ekonomi dari nasionalis, yang dalam pandangannya *fleksibel-rasional* tidak mengenal batas wilayah dan negara.

Dalam konteks itu, bagi Aburizal Bakrie, globalisasi bukanlah ancaman, melainkan peluang. Namun, sebesar apapun peluang itu,

²⁶⁰ Lihat, wawancara dengan Rizal Mallarangeng, di freedom Institute, Jakarta, 20/12/2004.

akan sangat tergantung kepada pengelolaan kemampuan dalam negeri, dengan pijakan awal kemandirian. Kemandirian menjadi kunci dari persaingan menghadapi globalisasi, apabila globalisasi dianggap sebagai proses liberalisasi ekonomi yang menghabiskan dan menenggelamkan tiang-tiang pancang batas-batas negara.

Berbicara mengenai relasi antara nasionalisme dan globalisasi dalam konteks pembangunan ekonomi, Aburizal mengakui hal itu sesungguhnya bisa disinergikan atau digabungkan. Namun untuk mencapai sasaran tersebut, Aburizal mempersyaratkan bahwa penggabungan globalisasi dan nasionalisme dapat dilakukan selama modal, teknologi, dan manajemen dari luar yang masuk ke Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat melalui penambahan lapangan kerja, penerimaan pajak negara, atau peningkatan produktivitas.

Bertolak dari berbagai paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa nasionalisme Aburizal Bakrie sangatlah terbuka dengan basis untuk

mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, sebetulnya nasionalisme warisan dari *founding father and mothers*. Dalam wadah keutuhan wilayah itulah, aspek-aspek kesejahteraan rakyat harus dipenuhi, sampai pada tingkatan paling tinggi, yakni keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dipetakan, dijelaskan dan dipahami pemikiran Nasionalisme-Demokrasi Aburizal Bakrie. Bahwa meskipun pada dasarnya Aburizal Bakrie adalah pengusaha sekaligus politisi yang jauh dari wilayah pemikiran, tetapi posisi itu tidak lantas mengurangi produktivitas pemikiran (atau gagasan) dan kontribusi wacana bagi khazanah pembangunan Indonesia, terutama dalam peningkatan partisipasi politik pengusaha Indonesia. Ketajaman wawasan dan pengalamannya yang luas dalam bidang bisnis justru kemudian menjadi landasan penting bagi produktivitas pemikiran politik, seperti tema nasionalisme dan demokrasi.

Membaca pemikiran politik Aburizal Bakrie sebagai bagian dari tidak dapat dilihat secara terpenggal-penggal, melainkan harus dilihat secara menyeluruh. Misalnya Aburizal Bakrie dilihat dari kacamata era Reformasi, namun juga harus dilihat dari sisi era Orde Baru. Hal itu penting, karena pemikiran politik Aburizal Bakrie tumbuh di dua era tersebut. Selain itu, menyimak pemikiran Aburizal Bakrie harus dilihat dari semua atribut yang dikenakan pada diri Aburizal Bakrie. Di sini misalnya Aburizal Bakrie dikenal bukan saja sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai organisatoris dan aktor politik (politisi).

Dari ketiga predikat di atas dapat digambarkan bahwa sebagai pengusaha Aburizal Bakrie mengembangkan pemisahan manajemen dengan pemilik, serta mengembangkan profesionalisme dengan orientasi masyarakat. Sebagai organisatoris, Aburizal Bakrie adalah tokoh puncak di organisasinya yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan ideal yang ditetapkan dan diamanatkan oleh organisasinya. Ia bertindak sebagai manager dalam

merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, dan mengontrol organisasi yang dipimpinnya.

Sementara sebagai aktor politik atau politisi, Aburizal Bakrie memainkan suatu peranan dalam wilayah politik yang berorientasi pada upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam sistem politik. Penekanan Aburizal Bakrie dalam upaya itu cenderung melakukannya dengan melihat sesuatu yang “serba” praktis dan berguna, kebutuhan realitas dengan mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) atau selalu bersangkutan dengan nilai-nilai praktis, dan dengan melihat bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus.

Tiga predikat di atas, yakni pengusaha, organisatoris, dan politisi dijalankan secara bersamaan. Namun demikian atribut yang paling menonjol pastilah akan ada dalam suatu periode kehidupannya. Pengakuan terhadap Aburizal Bakrie sebagai pengusaha dapat dengan mudah teridentifikasi dalam dua hal. *Pertama*, kepemilikan Aburizal terhadap berbagai perusahaan yang berhimpun dalam Kelompok

Usaha Bakrie (KUB). Tercatat Aburizal Asisten Dewan Direksi PT Bakrie & Brothers 1972-1974, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers 1988-1992, dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie 1992 sampai 2004. Dan *kedua*, pengakuan Aburizal Bakrie sebagai penguasah dapat dilihat dari banyaknya penghargaan sebagai tokoh pengusaha nasional maupun lintas nasional. Misalnya penghargaan yang diberikan Harian Umum Republika kepada Aburizal sebagai Tokoh Pengusaha 1995, *Businessman of the Year*. Selain itu penghargaan *The Outstanding Young People of The World* dari *the Junior Camber of Commerce* tahun 1986 dan penghargaan *ASEAN Business Person of The Year* dari *ASEAN Business Forum* tahun 1997.

Untuk pengakuannya sebagai organisatoris, misalnya dapat dilihat ketika Aburizal Bakrie senantiasa menjadi ketua umum pada organisasi profesi yang digelutinya. Dapat disebutkan disini, diantaranya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dua periode secara berturut-turut 1994-2004, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 1977-1979, Ketua Umum

Gabungan Pabrik Pipa dan Baja Seluruh Indonesia 1976-1989, dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 1989-1994.

Sementara pengakuan terhadap Aburizal Bakrie sebagai politisi akan lebih mudah teridentifikasi jika dilihat dari berbagai kegiatan dan aksi politik Aburizal Bakrie. Misalnya Aburizal pernah menjadi anggota MPR RI 1988-1997, sebagai kader Golkar sejak tahun 1988 hingga sekarang, menjadi anggota Dewan penasehat Partai Golkar periode 1998-sampai sekarang, sebagai calon presiden pada Konvensi Nasional Partai Golkar 2004, dan sekarang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk periode 2004-2009.

Di sela-sela ketiga predikat tersebut, Aburizal pun, sebagaimana disinggung di awal, acapkali melontarkan berbagai gagasan atau pemikiran yang tidak saja berkaitan dengan tema ekonomi bisnis, tetapi juga dengan tema-tema politik. Tema-tema pemikiran politik yang kerap kali Aburizal lontarkan adalah “nasionalisme baru” dan “demokrasi” dan “pembangunan ekonomi”. Untuk tema pemikiran politik

nasionalisme oleh Aburizal Bakrie didefinisikan sebagai keutuhan wilayah dan keadilan sosial, toleransi pri-nonpri, dan pembangunan ekonomi terbuka. Sementara itu, tema pemikiran politik demokrasi didefinisikannya kepada tiga hal utama, yakni, pemerintahan yang berwibawa dan keseimbangan peran, pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman, dan demokrasi ekonomi yang demokratis. Adapun tema pembangunan ekonomi banyak dikaitkan dengan: partisipasi pengusaha dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, Peran negara dan TNI, Otonomi Daerah, dan perang terhadap budaya suap.

Tema-tema pemikiran politik Aburizal Bakrie di atas, dapat dibaca mengenai bagaimana implikasi normatif dan basis pemikiran. Untuk implikasi normatif dari tema-tema pemikiran politik tersebut terhadap khazanah pemikiran politik Indonesia diletakkan pada peta antara pemikiran politik developmentalis integralis dan kritis pluralis. Posisi pemikiran politik Aburizal Bakrie dapat dikategorikan ke dalam peta developmentalis integralis sekaligus ke dalam peta pemikiran politik kritis pluralis. Keduanya tidak

bisa dipisahkan, bahkan menyatu dalam nafas pemikiran dan gagasannya.

Pada konteks yang lain, pemikiran politik Aburizal Bakrie merupakan sintesa dari peta dua katagori pemikiran politik Indonesia. Sintesanya terletak pada tema politik sebagai berikut: pembangunan ekonomi sebagai prioritas kebijakan, kewibawaan negara dan TNI, keutuhan wilayah, Pakta Anti Suap dan otonomi. Dari sintesa dua peta kategori pemikiran politik tersebut kiranya dapat dicap dengan katagori “developmentalis progresif”.

Dari perespektif basis, pemikiran nasionalisme-demokratis Aburizal Bakrie adalah berparadigma ekonomi. Hal itu menjadi konsekuensi dari ketokohan Aburizal sebagai pengusaha atau pelaku ekonomi. Pada dasarnya, segala pemikiran atau pun aksi politik Aburizal Bakrie merupakan derivatif dari ketajaman dan keluasan wawasan mengenai bagaimana memajukan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986)
- Amir Effendi Siregar, Ed, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik; Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi; Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004)
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2000)
- _____, *State and Civil Society in Indonesia* (Clyton, Victoria: Monash Paper on Southeast Asia No 22, Monas University, 1990)
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 2001)
- Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintah Amerika*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2003)

- Bambang Soesatyo, *HIPMI; Gerakan & Pemikiran*
(Jakarta: Pustaka Aksara, 1995)
- Baharuddin Aritonang dan Muslim Hutasuhut, ed,
Undang-Undang Politik 2003 (Jakarta: DPP
Partai Golkar, 2003)
- Basu Swasta DH dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar
Ekonomi Perusahaan Modern* (Yogyakarta:
Liberty, 1982)
- Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis
Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
- BN. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Sinar
Harapan, 1996)
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Cetakan Ketiga
(Bandung: Alfabeta, 2003)
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Khalayak dan
Efek* (Bandung: Remaja karya, 1989)
- David E. Apter, *Politik Modernisasi* (Jakarta:
Gramedia, 1987)
- _____, *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta:
LP3ES, 1996)
- Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi
Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta:
ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003),

Deden Faturahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2002)

Deddy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)

Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik; Paradigma dan Teori Pilihan Publik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

_____, *Politik Ekonomi Baru, Menuju Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2001)

Douglass North, *Structure and Change in Economic History* (New York & London: W.W. Norton and Company, 1981)

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, penerjemah Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1988)

David Thomson, *Pemikiran-Pemikiran Politik* (Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia, 1986)

Dwight Y. King, *Interest Group and Political Linkage in Indonesia 1800-1965* (Sidney: Northern Illinois University Allen and Unwin, 1982)

- Endah Triastuti, *Jenis-Jenis Penelitian*, (Jakarta: Modul Materi Kuliah MPS FISIP UI, 2001)
- Gabriel A Almond dan G. Bingham Powell, *Comparative Politics*, Bab XIII: *The Political Economy of Development*
- George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2002)
- Hans Dieter Evers, *Shadow Economy, Subsistence Production and Informal Sector: Outside of Market and State* (Jakarta: Prisma, No. 51, 1999)
- Herbert Feith & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Gerth, H.H. & C. Wright Mills (ed.), *From Max Weber; Essays in Sociology*, Bab IV: *Politics as a Vocations* (New York: Oxford Unversity Press, 1958)
- Ian Chalmers, *Indonesia in 1990; Democratization and Social Forces* (Singapura: Southeast Asian Affairs, 1991)
- Imam Sucipto Umar (Penyunting), *Aburizal Bakrie; Renaisans Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2004)

- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha* (Jakarta: Megapoin, 2000)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosda Karya, 2003)
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Rosda Karya, 1999)
- Isbodroini Suyanto, *Soekarno dan Nasionalisme, dalam Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)
- Jeffrey Frieden, *Debt, Development, Democracy, Modern Political Economy and Latin America, 1965-1985* (New Jersey: Princeton University Press, 1991)
- Jeffrey M. Paige, *Political Orientions and Riot Participation* (Dalam American Sociological Review, 1971)
- J. Mac Intyve, *Business and Politics in Indonesia* (Sydney: ASAA South East Asian Publication Series, 1991)
- John P. Kotter, *Paradigma Baru Dalam Bisnis; Cara Meraih Sukses di Dunia Masa Kini yang Tidak Didominasi Korporasi*, Alih bahasa Ronny Antonius Rusli (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997)

John W. Cresswell, *Research design: Qualitative & Quantitative Approaches* (California: SAGE Publication Inc, 1994)

Judith Goldstein and Robert Keohane (eds), *Ideas and Foreign Policy; Beliefs, Institutions and Political Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1995)

Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values* (New Haven: Yale University Press, 1951)

Komisi Pemilihan Umum, *Himpunan Undang-Undang Bidang Politik* (Jakarta, 2003)

_____, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Jakarta, 2004)

_____, *Tim Kampanye Pasangan Capres & Cawapres* (Jakarta: Media Center KPU, 2004)

Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, 1995)

Lalu Mara Satria Wangsa, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004)

- Lester W. Milbrat, *Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics?* (Cichago, 1995)
- Lucian W. Pye, *Aspects of Political Development* (Boston: Brown and Company, 1966)
- Manasse Malo dan Sri Trisnoningtias, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990)
- Martoyo Rachmat, *Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Kesepakatan Kerja Bersama* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991)
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Terjemahan Daniel Dhakidae (Jakarta: Rajawali Pers, 1983)
- M. Dawam Rahardjo, *Esei-Esei Ekonomi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1983)
- _____, *Ekonomi Politik; Teori, Paradigma, dan Prospek Baru* (Jakarta: CIDES, 1996)
- Miriam Budiadjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 1994)
- Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993)

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- M. Rush dan P. Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Muchtar Mas'oe'd dan MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995)
- Mochtar Mas'oe'd, *Ekonomi dan Struktur Politik* (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Nasir Tamara, *Aburizal Bakrie; Bisnis dan Pemikirannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998)
- Nazaruddin Sjamsuddin, (ed), *Soekarno; Pemikiran politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1993)
- Norman Frohlich dan Joe A. Oppenheimer, *Politik Ekonomi Modern*, Alih bahasa Anassidik (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992)

- Richard Robison and Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia; The Politics of oligarchy in an age of markets* (London: Routledge Curzon, 2004)
- Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Terjemahan Nur Imam Subono dkk (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Ricky W. Griffin dan Ronald J Ebert, *Bussiness Six Edition*, alih bahasa (Jakarta: Pranhallindo, 2003)
- Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002
- Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Robert E. Lane, *Political Life: Why People Get Involved in Politics* (Glencoe, Illionis, 1959)
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Edisi Revisi, Penerjemah M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Rudolf Hebarle, *Social Movement: An Introduction to Political Sociology* (New York: Appleton-century-Croft, 1951)
- Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Sangkala Pulsar, 1984)

- Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968)
- Sjahrir, *Pemikiran Politik Sjahrir* (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Suhersimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan; Teori, Struktur dan Perilaku* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2001)
- Thomas Mayer, *Demokratic Socialisme in 36 Theses* (Bonn: Forschung Institute der Friedrrich, 1981)
- V.O. Key, Jr., Dan Frank Munger, *Social Determinism and Election Decision; The Case of Indiana*, dalam Eugene Burdick dan Arthur Brodbeck, ed., *American Voting Behavior* (New York: The Free Press, 1959)
- Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik di Indonesia; Kebijakanaksanaan Ekomomi Indonesia 1950-1980*, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1991)

Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews (ed),
Masalah-Masalah Pembangunan Politik
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1995)

Yashihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1990)

W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,
2003)

TESIS

Muhammad Taufik, *Hubungan Kepentingan Pengusaha dan Penguasa Dalam Bisnis Pers; Studi Kasus Bisnis Pers Group Bakrie* (Jakarta: Tesis PPs Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2002)

Suryo Adi Pramono, *Partai Politik di Surakarta: Studi Mengenai Sivilitas Demokratis (Democratic Civility) pada Masyarakat Majemuk Perkotaan* (Depok: PPs Sosiologi Universitas Indonesia, 2001)

Jurnal dan Buletin

G. Rahman Zainuddin, *Machiavelli dan Kekuasaan; Peranan Obsesi Dalam Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 4 (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1989)

_____, *Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 7 (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1990)

Faisal Siagian, *Dinamika Pengaruh Kelompok Bisnis dalam Politik: Trend Indonesia Menuju Negara Korporatis* (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS, 1994)

Suryo Adi Purnomo, *Basis Ekonomi, Perilaku Politik dan Sivilitas Demokratis*, Jurnal iSiP (Yogyakarta: FISIP Universitas Atmajaya, Vol. 5/No. 1/Maret-Mei 2003), hlm 10 dan 11.

Buletin POKJA EKKU DPP Partai Golkar. 2004. *Dari Konvensi Menuju Presiden RI; Apa Kata Mereka?* Edisi Eksklusif, Jakarta

Koran dan Majalah

Faisal Basri, *Dua Bank Ditutup, Karena Apa?*, Kompas, 12/4/2004

Gatra, *Penyelesaian Hutang Swasta*, 11/12/ 1997

Kompas, *Kadin Memerangi Suap, Mungkinkah ?*
Tajuk Rencana, 4/10/2003.

Kompas, *Aburizal Bakrie Terima Penghargaan*,
24/10/2003

Kompas, *Pemerintah Baru Harus Fokus pada Sektor Riil dalam Program Kerja 100 Hari*,
14/10/2004

Suara Merdeka, *Pendekar Ekonomi Tanpa Beban*,
31/10/2004

Suara Merdeka, *Kampanye di Munas Kadin*,
20/2/2004

Suara Karya, *Bakrie & Brothers Ekspansi ke
Agrobisnis*, 6/12/2004

Website

www.hamline.edu - 13/3/1998

[www.tempo/apa & siapa.com](http://www.tempo/apa&siapa.com)

www.pikiran-rakyat.com, 21/10/2004

www.kompas.com, 24/10/2003

www.kompas.com, 25/6/2004

www.kompas.com, 21/10/2004

www.suaramerdeka.com, 22/10/2004

www.rakyatmerdeka.com, 22/10/2004

www.suarapembaharuan.com, 30/10/2004

www.liputan6.com, 21/10/2004

www.tempointeraktif.com, 12/5/2004

Tentang Penulis



Asep Abdul Sahid atau yang akrab dipanggil **Asep Gatara**, lahir di Garut, Jawa Barat. Menyelesaikan S1 pada 2001 dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang politik Islam; pada 2005 memperoleh Magister Sains (M.Si) dalam bidang ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI); dan doktor dalam bidang Kajian Budaya dan Media dengan peminatan Demokrasi dan Media dari Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 2014. Sejak tahun 2007 sampai 2016 penulis menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan pada tahun 2016 - sekarang menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Beberapa kegiatan ilmiah yang dilaksanakan penulis, di antaranya: Researcher in International Leading Research: Deradicalization of Religion Models: Comparative Study of Jamaah Tabligh Movement in the Region of Garut, Indonesia And Yala, Thailand, 2016; Guest lecturer in the

Lecturer Exchange at the Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Universiti Teknologi Mara (UiTM), Selangor, Malaysia, September 25-29, 2018; Panelist in the 18th Annual International Conference on Islamic Studies, Palu-Central Sulawesi, September 17-20, 2018; Speaker in the 2018 International Symposium on Indonesian Politics, Semarang State University (UNNES), April 6-7, 2018; Speaker in Emerging Leaders Academy (ELA), Session Four: Stakeholder Outreach and Public Branding, Internasioanl Republican Institite (IRI), September 17, 2020; Speaker in Emerging Leaders Academy (ELA), Session III: Political Communication: Building a Message as a 21st Century Leader, Internasioanl Republican Institite (IRI), October 13, 2021 dan beberapa lagi lainnya.

Adapun beberapa karya penulis yang telah terbit, di antaranya: *Ilmu Negara* (Buku, 2017), *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan* (Buku, 2009), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Buku, 2011), *Cyberdemocracy? Analisis Wacana Kritis terhadap Komentar Online Kompas.com pada Pemilukada DKI Jakarta 2012* (Buku, 2015), *Political Rights of*

the Citizen in the 2014 Election and the Democracy Index in West Java: The Importance to Strengthen the Accessibilities (Jurnal, 2018), *Demokrasi Nothing: Kritik Terhadap Konsep dan Praktik Cyberdemocracy* (Jurnal, 2016), *Model Pengembangan Ilmu Politik di PTKIN: Pengalaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jurnal, 2018), *Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai Politik* (Jurnal, 2018), *Politik Representasi Islam dalam Film 212 the Power of Love* (Jurnal, 2020), *Cendekiawan & Politik Programatik* (Opini Republika, 2018), *Politik Tanpa Kedengkian* (Opini Pokiran Rakyat, 2019), *New Normal dan Lagu Kehidupan* (Kolom Detikcom, 2020), *Pemilu 2024 dan Hak-Hak Politik Perempuan* (Opini Kompas, 2021).

Buku ini menyajikan topik tentang pemikiran politik kaum pengusaha Indonesia. Selama ini, pemikiran politik lebih banyak dikaji serta digali dari akademisi atau cendekiawan politik. Oleh karena itu, buku ini dapat melengkapi khazanah riset-riset pemikiran politik pada umumnya. Melalui studi yang dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa tema-tema pemikiran politik kaum pengusaha, khususnya dalam studi ini adalah Aburizal Bakrie sebagai aktor politik yang berlatar pengusaha, cenderung lebih berpusat pada tema ekonomi kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi. Di samping itu, tergambar bahwa pemikiran politik kaum pengusaha Indonesia memiliki implikasi normatif pada dua aspek, yakni pada aspek wacana di masyarakat serta di pemerintah, dan aspek peta pemikiran politik Indonesia. Hasil studi ini selain dapat digunakan sebagai sumber bahan kajian bagi mahasiswa ilmu politik, mahasiswa ilmu pemerintahan, dan mahasiswa sosial lainnya, namun juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Termasuk masyarakat luas yang melek politik dan sosial.

ISBN 978-623-99555-6-4 (PDF)



Gunung Djati Publishing